

**LAPORAN
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Triwulan III - 2006

**Kantor Bank Indonesia
Yogyakarta**

VISI BANK INDONESIA

“Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.”

MISI BANK INDONESIA

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan.”

NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

“Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan.”

VISI KANTOR BANK INDONESIA

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai *economic intelligence* dan unit penelitian.”

MISI KANTOR BANK INDONESIA

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisiensi dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.”



...Melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran dan informasi lainnya yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan kebijakan Kantor Pusat...

(Salah satu dari sepuluh tugas pokok Kantor Bank Indonesia)





Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Bank Indonesia Yogyakarta
Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter
Jl. P. Senopati No.4-6, Yogyakarta
Telp.0274-377755 Fax.0274-371707

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robbi karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III-2006 yang sebelumnya diterbitkan dengan judul Kajian Ekonomi Regional (KER) Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat hadir di tangan pembaca. Laporan yang kami buat dengan format baru, selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pihak ekstern (*external stakeholders*) terhadap informasi perkembangan ekonomi regional, maupun perkembangan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, serta informasi beberapa hasil survei yang kami lakukan.

Tidaklah berlebihan kiranya, apabila kami sampaikan bahwa Laporan Perkembangan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan salah satu publikasi dengan informasi yang relatif lengkap mengenai indikasi makro perekonomian suatu daerah. Di samping itu, untuk lebih melengkapi laporan kami, mulai triwulan II tahun 2006 pada setiap terbitan laporan akan disisipkan uraian singkat mengenai rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah, Dinas terkait atau stakeholders lainnya baik berdasarkan hasil asesmen terhadap perkembangan perekonomian terkini maupun berdasarkan hasil penelitian/survei yang kami lakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, atas nama Bank Indonesia Yogyakarta, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa pihak yang belum sepenuhnya memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya informasi/data ekonomi daerah, terbukti dari masih dijumpainya kendala dalam survei-survei yang kami lakukan, maupun terlambatnya penyampaian data yang kami perlukan. Oleh karena itu kami berharap agar hubungan yang lebih baik dapat terjalin di masa mendatang. Terlepas dari hal itu, kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas kajian ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengupayakan hasil kerja yang lebih baik.

Yogyakarta, Oktober 2006

BANK INDONESIA YOGYAKARTA


Djarot Sumartono
Pemimpin

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
RINGKASAN EKSEKUTIF DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	1
BAB 1 PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI	7
1. Pertumbuhan Ekonomi	7
1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (qtq)	7
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy)	7
2. Perkembangan PDRB Sisi Permintaan	9
2.1. Konsumsi Rumah Tangga	10
2.2. Konsumsi Pemerintah	10
2.1. Investasi (PMTB)	11
2.2. Lainnya	11
3. Perkembangan PDRB Sisi Penawaran	11
3.1. Sektor Pertanian	12
3.2. Sektor Penggalian	13
3.3. Sektor Industri Pengolahan	13
3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	14
3.5. Sektor Bangunan	14
3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	14
3.7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	15
3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	15
3.9. Sektor Jasa-jasa	16
4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	16
4.1. Kabupaten Gunungkidul	16
4.2. Kabupaten Kulonprogo	17
4.3. Kabupaten Bantul	17
4.4. Kabupaten Sleman	18
4.5. Kota Yogyakarta	18
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI	19
1. Inflasi Triwulanan	19
2. Inflasi Bulanan	21
2.1. Inflasi Juli	21
2.2. Inflasi Agustus	22

Daftar Isi

2.3. Inflasi September	22
3. Inflasi Tahunan	23
4. Inflasi Tahun Kalender Kota-kota di Pulau Jawa	23
BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN	25
1. Gambaran Umum	25
1.1. Perkembangan Kelembagaan	25
1.2. Perkembangan Kinerja	25
2. Perkembangan Bank Umum	30
2.1. Kelembagaan	30
2.2. Aset dan Aktiva Produktif	31
2.3. Penghimpunan Dana	32
2.4. Penyaluran dan Kualitas Kredit	33
2.5. Undisbursed Loans	35
2.6. Fungsi Intermediasi, Likuiditas dan Profitabilitas	35
2.7. Kredit UMKM	36
3. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat	37
3.1. Kelembagaan	37
3.2. Aset	37
3.2. Penghimpunan Dana	38
3.3. Penyaluran dan Kualitas Kredit	38
3.4. Fungsi Intermediasi	40
4. Perkembangan Perbankan Syariah	41
4.1. Aset	41
4.2. Penghimpunan Dana	41
4.3. Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan	42
4.4. Fungsi Intermediasi	42
Boks:	
1. Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk Korban Gempa DIY dan Jawa Tengah .	43
BAB 4 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	45
1. Sistem Pembayaran Tunai	45
1.1. Aliran Uang Masuk (<i>Cash Inflow</i>) dan Aliran Uang Keluar (<i>Cash Outflow</i>)	45
1.2. Penukaran Uang	46
1.3. Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	46
1.4. Temuan Uang Palsu	47
2. Sistem Pembayaran Non Tunai	48
1.1. Kliring	48

Daftar Isi

1.2. Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)	48
BAB 5 KEUANGAN DAERAH	51
1. Gambaran Umum	51
2. Pendapatan Daerah	52
3. Belanja Daerah	54
Boks:	
1. Kinerja dan Hambatan Realisasi Penyerapan APBD DIY	56
BAB 6 PROSPEK EKONOMI	59
1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi	59
2. Perkiraan Inflasi Triwulanan	60
3. Perkiraan Inflasi Bulanan	61
Boks:	
1. Implikasi Pencairan Dana Rekonstruksi Pasca Gempa terhadap Prospek Perekonomian DIY	63
LAMPIRAN:	
1. PDRB DIY Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku	67
2. PDRB DIY Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	68
3. Realisasi APBD Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Triwulan I-2006	69
4. Indikator Perbankan - Propinsi DIY	70
5. Indikator Bank Umum - Propinsi DIY	71
6. Indikator Bank Umum - Kabupaten Bantul	72
7. Indikator Bank Umum - Kabupaten Gunungkidul	73
8. Indikator Bank Umum - Kabupaten Kulonprogo	74
9. Indikator Bank Umum - Kabupaten Sleman	75
10. Indikator Bank Umum - Kota Yogyakarta	76
11. Indikator BPR - Propinsi DIY	78
12. Indikator BPR - Kabupaten Bantul	79
13. Indikator BPR - Kabupaten Gunungkidul	80
14. Indikator BPR - Kabupaten Kulonprogo	81
15. Indikator BPR - Kabupaten Sleman	82
16. Indikator BPR - Kota Yogyakarta	83
17. Laporan Survei Konsumen	85
18. Laporan Survei Penjualan Eceran	97
19. Laporan Survei Kegiatan Dunia Usaha	103
20. Laporan Survei Harga Properti Residensial	109

Daftar tabel

Tabel 1.1.	PDRB Sisi Permintaan	10
Tabel 1.2.	PDRB Sisi Penawaran	12
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	17
Tabel 2.1.	Sumbangan Komponen Inflasi Triwulanan	19
Tabel 2.2.	Inflasi Menurut Kelompok	20
Tabel 2.3.	Subkelompok Pemberi Andil Terbesar terhadap Inflasi Triwulanan	20
Tabel 2.4.	Komoditas Pemberi Andil Terbesar terhadap Inflasi Triwulanan	21
Tabel 2.5.	Inflasi Bulanan	22
Tabel 3.1.	Jaringan Kantor Perbankan	25
Tabel 3.2.	Aset Perbankan	26
Tabel 3.3.	Dana Pihak Ketiga Perbankan	27
Tabel 3.4.	Kredit Perbankan	28
Tabel 3.5.	Loan to Deposit Ratio Perbankan	30
Tabel 3.6.	Jaringan Kantor Bank Umum	30
Tabel 3.7.	Indikator Bank Umum	31
Tabel 3.8.	Dana Pihak Ketiga Bank Umum	32
Tabel 3.9.	Kredit Bank Umum	34
Tabel 3.10.	Kredit UMKM	36
Tabel 3.11.	Aset Bank Perkreditan Rakyat	37
Tabel 3.12.	Dana Pihak Ketiga Bank Perkreditan Rakyat	38
Tabel 3.13.	Kredit Bank Perkreditan Rakyat	39
Tabel 3.14.	LDR Bank Perkreditan Rakyat	40
Tabel 3.15.	Indikator Perbankan Syariah	41
Tabel 4.1.	Indikator Sistem Pembayaran Tunai	45
Tabel 4.2.	Penukaran Uang Pecahan Kecil	46
Tabel 4.3.	Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	47
Tabel 4.4.	Temuan Uang Palsu yang Dilaporkan	47
Tabel 4.5.	Indikator Sistem Pembayaran Non Tunai	48
Tabel 5.1.	Realisasi APBD	51
Tabel 5.2.	Realisasi Pendapatan Daerah	53
Tabel 5.3.	Realisasi Belanja Daerah	54
Tabel 6.1.	Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi	59
Tabel 6.2.	Perkiraan Inflasi Triwulanan	61
Tabel 6.3.	Perkiraan Inflasi Bulanan	61

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
Grafik 1.2. Komposisi PDRB Sisi Permintaan	9
Grafik 1.3. Komposisi PDRB Sisi Penawaran	11
Grafik 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	16
Grafik 2.1. Inflasi Triwulanan	19
Grafik 2.2. Sumbangan Komponen Inflasi	19
Grafik 2.3. Sumbangan Kelompok Barang	19
Grafik 2.4. Inflasi Tahunan dan Bulanan	21
Grafik 2.5. Inflasi Kota-Kota di Pulau Jawa	23
Grafik 3.1. Indikator Perbankan	26
Grafik 3.2. Indikator Bank Umum	31
Grafik 3.3. <i>Undisbursed Loans</i> Bank Umum	35
Grafik 3.4. Penyebaran Jaringan Kantor BPR	37
Grafik 3.5. Indikator BPR	37
Grafik 3.6. Indikator Perbankan Syariah	41
Grafik 4.1. Aliran Kas dan PTTB	45
Grafik 4.2. Transaksi Kliring	48
Grafik 4.3. Transaksi BI-RTGS	49
Grafik 6.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi	59
Grafik 6.2. Perkiraan Inflasi	60

Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Kebijakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tinjauan Umum Triwulan III-2006

Laju pertumbuhan tahunan (yoy) ekonomi DIY cenderung melambat pada periode pasca gempa. Dari sisi permintaan, selain karena belum optimalnya dukungan Konsumsi Pemerintah, melambatnya perkembangan ekonomi DIY terutama karena anjloknya surplus Komponen Lainnya (net ekspor dan perdagangan antar wilayah) hingga 11,39% (yoy)...

Pada periode satu triwulan pasca gempa 27 Mei 2007 laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperlihatkan perlambatan sebagaimana diindikasikan dari laju pertumbuhan tahunan yang cenderung menurun sejak awal tahun 2006. Meskipun secara triwulan ekonomi DIY tumbuh 2,24% (qtq), namun laju pertumbuhan tahunan pada triwulan III-2006 hanya tercatat 1,69% (yoy), turun dari 4,12% (yoy) pada triwulan I-2006 dan 3,47% pada triwulan II-2006. Dari sisi permintaan, perlambatan terjadi karena seluruh komponen permintaan menunjukkan kinerja yang belum optimal, terutama surplus komponen Lainnya (net ekspor dan perdagangan antar wilayah) yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar -11,39% (yoy) dan Investasi yang hanya tumbuh 1,07% (yoy), jauh lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III-2005 yang mencapai 13,35% (yoy). Dukungan pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap perekonomian DIY juga dirasakan belum optimal, meskipun tumbuh 7,13% namun masih lebih kecil daripada pertumbuhan triwulan III-2005 sebesar 14,18% (yoy). Sementara itu, masih rendahnya daya beli masyarakat dikonfirmasi oleh nilai Konsumsi Rumah Tangga yang hanya tumbuh 1,14% (yoy), sejalan dengan perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen yang cenderung menurun dalam 1 tahun terakhir, dari 96,50 pada triwulan IV-2005 menjadi 68,42 pada triwulan laporan.

Masih rendahnya dukungan Konsumsi Pemerintah tercermin dari rendahnya persentase realisasi APBD di wilayah DIY...

Sebagai proxy belum optimalnya dukungan Konsumsi Pemerintah terhadap perkembangan ekonomi DIY, tercermin dari persentase realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) yang relatif rendah. Pada semester I tahun 2006 realisasi Belanja Pemerintah Daerah hanya sebesar 27,61% atau Rp1.012 miliar dari rencana semula sebesar Rp3.663 miliar. Sedangkan dari sisi Pendapatan Daerah, mampu terealisasi sebesar 50,93% atau Rp1.747 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.431 miliar. Meskipun relatif rendah pada semester pertama, peran Konsumsi Pemerintah dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi DIY diperkirakan akan semakin besar menjelang akhir tahun 2006, mengingat karakteristik perencanaan (*plotting*) anggaran belanja umumnya terkonsentrasi pada semester kedua.

Dari sisi penawaran, tercatat dua sektor ekonomi yang menjadi faktor utama penghambat pergerakan roda perekonomian DIY pada triwulan III-2006, yaitu (1) sektor Industri Pengolahan yang tumbuh negatif sebesar -7,10% (yoy) dan (2) sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dengan laju pertumbuhan -21,34% (yoy). Meskipun faktor musiman telah mendorong peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (4,99%) dan sektor Bangunan (5,75%) pada triwulan laporan, namun hal itu nampaknya belum cukup kuat mengimbangi dampak kontraksi yang terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, sehingga angka pertumbuhan perekonomian DIY secara total menjadi relatif rendah.

Di saat perkembangan ekonomi DIY cenderung melambat, tekanan kenaikan harga yang diukur dari Indeks Harga Konsumen (IHK) masih cukup kuat pada triwulan laporan. Laju inflasi yang terjadi di Kota Yogyakarta tercatat 2,53% (qtq) pada triwulan III-2006, relatif sama dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 2,54% (qtq) namun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang hanya 1,16% (qtq). Menurut subkelompok, penyumbang utama inflasi Kota Yogyakarta pada triwulan laporan adalah Jasa Pendidikan sebesar 1,18%, diikuti oleh Biaya Tempat Tinggal sebesar 0,58%, Daging & Hasil-hasilnya sebesar 0,26%, Makanan Jadi sebesar 0,18%, Jasa Kesehatan sebesar 0,16% dan Buah-buahan sebesar 0,15%. Sedangkan menurut komoditas, penyumbang inflasi terbesar adalah berasal dari biaya pendidikan untuk tingkatan Akademi/Perguruan Tinggi, SLTP dan SLTA yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 17,88% (qtq), 54,24% (qtq) dan 14,64% (qtq), diikuti oleh Daging Ayam Ras dan Sewa Rumah dengan inflasi masing-masing 17,26% (qtq) dan 10,09% (qtq).

Melihat komoditas penyumbang inflasi tersebut nampaknya inflasi pada triwulan ini lebih didorong oleh faktor musiman bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. Hal ini memberikan dampak inflasi yang relatif besar bagi Kota Yogyakarta mengingat jumlah pelajar dan mahasiswa di wilayah DIY relatif banyak dibandingkan dengan jumlah populasi sehingga mendongkrak permintaan terhadap barang/jasa yang terkait dengan industri pendidikan. Seperti misalnya, inflasi subkelompok Perlengkapan/Peralatan Pendidikan telah memperlihatkan kenaikan sejak triwulan II-2006 dengan laju 6,15% (qtq), kemudian naik lagi pada triwulan III-2006 dengan laju 2,47% (qtq). Kuatnya tarikan permintaan terhadap pembentukan angka inflasi triwulan ini dikonfirmasi oleh andil Inflasi Inti

Dari sisi penawaran, faktor utama penghambat roda perekonomian DIY adalah sektor Industri Pengolahan dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan yang tumbuh negatif masing-masing sebesar -7,10% (yoy) dan -21,34% (yoy)...

Tekanan kenaikan inflasi Kota Yogyakarta menguat pada saat ekonomi tumbuh melambat. Inflasi IHK mencapai 2,53% (qtq) pada triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 1,16% (qtq). Menurut komoditas, inflasi didorong oleh cepatnya kenaikan biaya pendidikan, harga daging ayam ras dan biaya sewa rumah...

Besarnya sumbangan kenaikan biaya pendidikan terhadap inflasi Kota Yogyakarta mencerminkan bahwa faktor musiman merupakan faktor dominan dalam pembentuk inflasi pada triwulan laporan, bertepatan dengan periode tahun ajaran baru, sebagaimana dikonfirmasi oleh besarnya sumbangan inflasi inti (core inflation)...

(*core inflation*) yang dominan yaitu mencapai 2,42%, dibandingkan andil Inflasi *Administered* dan Inflasi *Volatile Food* yang tercatat masing-masing sebesar 0,10% dan 0,01%.

Inflasi tahun kalender (ytd) Kota Yogyakarta sebesar 7,80% (ytd) mencatat rekor tertinggi di Pulau Jawa...

Dengan perkembangan ini, maka laju inflasi kalender (Januari-September 2006) Kota Yogyakarta telah mencapai 7,80% (ytd), jauh lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 4,06% (ytd). Angka inflasi kalender Kota Yogyakarta tersebut memegang rekor tertinggi dibandingkan angka inflasi kota-kota lainnya di Pulau Jawa, yang umumnya berkisar antara 3 s.d. 5% (ytd).

Aset dan DPK Perbankan tumbuh positif meskipun melambat, sedangkan Kredit tumbuh semakin pesat sehingga LDR naik sebesar 1,76% menjadi 54,24% pada triwulan laporan. Namun percepatan akselerasi kredit tersebut disertai dengan memburuknya kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan rasio NPLs dari 5,37% menjadi 6,37%...

Hingga akhir triwulan III-2006 kinerja Perbankan DIY cenderung mengalami perlambatan sebagaimana terlihat dari kinerja Aset dan DPK. Meskipun tumbuh masing-masing sebesar 3,36% dan 1,38%, namun angka pertumbuhan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99%, dan 6,87% serta lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2005, dimana angka pertumbuhannya tercatat sebesar 4,16% dan 3,29%. Perlambatan pertumbuhan DPK Perbankan DIY diduga disebabkan oleh adanya realisasi dana program rekonstruksi kepada kelompok masyarakat yang belum seluruhnya kembali ke industri Perbankan DIY. Namun demikian, pertumbuhan Kredit yang tercatat sebesar 4,77% justru lebih tinggi dari angka pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,32%, namun lebih rendah dari angka pertumbuhan triwulan III-2005 sebesar 7,59%. Pertumbuhan Kredit yang lebih tinggi dari pertumbuhan DPK menyebabkan peningkatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 1,76% dari 52,47% pada triwulan II-2006 menjadi 54,23%. Sedangkan rasio lainnya yaitu Non Performing Loans (NPLs) mengalami kenaikan sebesar 1% dari 5,37% menjadi 6,37%.

Kinerja perbankan syariah mengalami perkembangan yang menggembirakan pada triwulan laporan, yang tercermin dari indikator Aset, DPK dan Kredit maupun indikator kualitas pembiayaan (rasio NPF)...

Di sisi lain perkembangan kinerja Perbankan Syariah pada triwulan III-2006 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, tercermin dari pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaannya masing-masing sebesar 12,85% menjadi Rp342 miliar, 8,72% menjadi Rp276 miliar dan 19,12% menjadi Rp407 miliar. Fungsi intermediasi Perbankan Syariah mengalami peningkatan, ditunjukkan dari peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebesar 12,89% dari 134,62% pada triwulan II-2006 menjadi 147,51% pada triwulan III-2006. Peningkatan ini telah terjadi sejak periode-periode sebelumnya. Kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah DIY juga mengalami perbaikan sebagaimana tercermin dari penurunan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dari 3,70% pada triwulan II-2006 menjadi 2,92% pada triwulan III-2006.

Dugaan semakin banyaknya jumlah uang beredar di wilayah DIY pasca terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006, yang terutama disebabkan derasnya arus masuk dana bantuan kemanusiaan kepada korban gempa, dapat dijelaskan oleh perkembangan indikator sistem pembayaran pada triwulan III-2006, baik tunai maupun non tunai. Pada indikator sistem pembayaran tunai, meningkatnya jumlah uang beredar di DIY tercermin dari aliran dana masuk netto (*net cash inflow*) dari sistem perbankan DIY ke Bank Indonesia Yogyakarta yang melonjak hingga 52,64% (qtq), yaitu dari Rp153 miliar menjadi Rp234 miliar per bulan. Hal ini bertolakbelakang dengan kondisi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan *net cash inflow* dari triwulan kedua ke triwulan ketiga tahun 2005 (lihat lampiran).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, pada aktivitas sistem pembayaran non tunai, aliran transfer masuk netto (*net incoming transfer*) ke dalam sistem perbankan DIY melalui sistem *Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) juga naik drastis hingga 107,29% (qtq), yaitu dari Rp660 miliar menjadi Rp1.231 miliar per bulan. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan nilai *incoming transfer* (59,40%) jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan *outgoing transfer* (45,40%).

Fenomena meningkatnya jumlah uang beredar pasca gempa di DIY sebagaimana terungkap dari pesatnya peningkatan *net cash inflow* dan *net incoming transfer* tersebut diduga akan terus berlanjut s.d. akhir tahun ini bahkan dengan tekanan yang semakin kuat. Hal ini paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: (1) Besarnya jumlah pemudik lebaran maupun wisatawan yang datang ke wilayah DIY selama masa liburan Idul Fitri tahun ini tentunya akan langsung disertai dengan masuknya uang dalam jumlah yang cukup signifikan, yang gilirannya akan mengalir masuk ke dalam sistem perbankan DIY, dan pada akhirnya akan masuk ke kas Bank Indonesia Yogyakarta sekitar yang dapat berlangsung s.d. 2 bulan setelah lebaran; (2) Selain faktor musiman (*seasonal factor*) tersebut, khusus untuk tahun ini, derasnya arus uang masuk ke DIY akan semakin diperhebat dengan adanya pencairan dana rekonstruksi dari Pemerintah Pusat yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Prospek Triwulan IV-2006

Pada triwulan yang akan datang, sesuai dengan siklus musimannya, perekonomian DIY diperkirakan akan mulai bangkit dan tumbuh dengan estimasi titik sebesar 8,14% (yoy), jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan triwulan ini (1,69%). Perkiraan ini didasarkan oleh siklus bisnis beberapa sektor ekonomi

Indikasi peningkatan uang beredar pasca gempa terlihat pada kenaikan net cash inflow melalui kas maupun net incoming transfer melalui BI-RTGS...

Melalui BI-RTGS, net incoming transfer ke dalam sistem perbankan DIY naik hingga 107,29% (qtq)...

Diperkirakan, kecenderungan derasnya aliran uang masuk ke wilayah DIY akan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2006, sebagai implikasi masuknya uang pemudik lebaran dan pencairan dana rekonstruksi pasca gempa yang mencapai Rp1,7 triliun...

Pada akhir tahun, sesuai dengan siklusnya, perekonomian DIY akan tumbuh lebih cepat dengan estimasi titik sebesar 8,14% (yoy, yang terutama didorong oleh booming sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran...

yang cenderung tumbuh pesat pada setiap triwulan keempat. Selain dipengaruhi oleh pelaksanaan program rekonstruksi oleh pemerintah dan maraknya aktivitas perbaikan rumah/tempat usaha pasca gempa secara swadaya oleh masyarakat, tingginya peningkatan kinerja sektor Bangunan pada triwulan IV-2006 juga dipengaruhi oleh intensitas pelaksanaan proyek Pemerintah Daerah yang cenderung melonjak untuk mengejar waktu penyelesaian sebelum tutup tahun anggaran. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja sektor Bangunan pada triwulan IV-2006 secara triwulanan diperkirakan akan naik 44,99% (qtq) dan secara tahunan akan tumbuh 11,97% (yoy). Dengan meningkatnya aktivitas Pemerintah Daerah, subsektor Jasa Pemerintah Umum turut meningkat sehingga sektor Jasa-jasa diperkirakan akan tumbuh 18,94% (yoy). Sejalan dengan tibanya liburan perayaan hari keagamaan dan liburan akhir tahun, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran diperkirakan tumbuh 12,55% (yoy). Sedangkan perkembangan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Penggalian dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan pada triwulan IV-2006 diduga masih akan terjadi perlambatan.

Pada tahun 2006, secara keseluruhan ekonomi DIY diperkirakan tumbuh 4,29%, jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2005 sebesar 4,74% dan tahun 2004 sebesar 5,13%...

Dengan mengacu pada proyeksi di atas, maka perekonomian DIY 2006 diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 4,29%, lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2005 dan tahun 2004 yang masing-masing tercatat sebesar 4,74% dan 5,13%. Dorongan pertumbuhan ekonomi DIY 2006 diperkirakan berasal dari kinerja sektor Pertanian yang diperkirakan tumbuh 7,11%, sektor Bangunan (7,37%) dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (6,63%), sedangkan andil negatif berasal dari sektor Industri Pengolahan yang diperkirakan turun 3,27%, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan sektor Penggalian yang akan mengalami kontraksi masing-masing -5,95% dan -1,98%.

Tekanan kenaikan harga diperkirakan akan berlangsung pada triwulan mendatang dengan estimasi titik sebesar 2,73% (qtq), yang terutama dipicu oleh kuatnya tarikan permintaan pada akhir tahun bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, Natal dan liburan akhir tahun...

Memasuki triwulan IV-2006, tekanan kenaikan harga diperkirakan semakin menguat dengan estimasi titik sebesar 2,73% (qtq), lebih tinggi dari inflasi triwulan III-2006 sebesar 2,53% (qtq). Inflasi triwulan IV-2006 terutama dipengaruhi oleh kuatnya tarikan permintaan (*demand pull*) sehubungan dengan adanya perayaan keagamaan. Selain faktor tersebut, cepatnya laju inflasi triwulan IV-2006 juga diduga karena pengaruh dampak pencairan dana rekonstruksi yang akan langsung berpengaruh pada kenaikan harga bahan bangunan. Inflasi kelompok Bahan Makanan, dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau diperkirakan masing-masing akan mencapai 5,80% (qtq) dan 3,50% (qtq), sementara perkiraan inflasi kelompok Sandang dan kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan masing-masing sebesar 2,42% (qtq) dan 1,57% (qtq). Sedangkan untuk kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga diperkirakan terjadi deflasi dengan estimasi sebesar -2,79% (qtq).

Berdasarkan proyeksi tersebut di atas, maka perkiraan laju inflasi Kota Yogyakarta tahun 2006 diperkirakan akan menembus angka *double digit*, dengan estimasi titik sebesar 10,74% (yoy). Selain berasal dari dorongan kenaikan harga kelompok Bahan Makanan dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau, tingginya angka inflasi tahun 2006 juga dipengaruhi cepatnya kenaikan harga barang/jasa pada kelompok Kesehatan dan kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga yang masing-masing diperkirakan akan mencapai 16,55% (yoy) dan 11,35% (yoy).

Inflasi Kota Yogyakarta 2006 diperkirakan akan menembus "double digit" dengan estimasi titik sebesar 10,74% (yoy)...

REKOMENDASI KEBIJAKAN

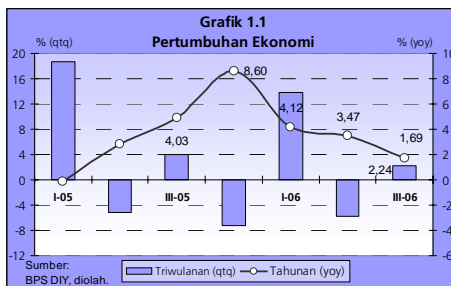
Berdasarkan asesmen terhadap perkembangan perekonomian DIY triwulan III-2006, dengan ini dihasilkan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pada akhir tahun sesuai dengan siklus ekonominya (*economic cycle*), perekonomian DIY akan tumbuh lebih cepat. Oleh karenanya, para pengambil kebijakan dan para pengusaha terutama pada industri pariwisata dan properti dapat berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih terarah dan lebih erat untuk memanfaatkan siklus ekonomi akhir tahun ini sebagai momentum kebangkitan UMKM DIY pada khususnya dan perekonomian DIY pada umumnya.
2. Dalam rangka transparansi laporan realisasi APBD, Departemen Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan telah membuat *website* Sistem Informasi Keuangan Daerah (www.sikd.djap.k.go.id) yang menampilkan data gabungan masing-masing Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja sangat memberikan manfaat bagi *stakeholder* Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun demikian, data yang tersaji belum *up to date* sehingga terjadi perbedaan antara data pada *website* dan masing-masing Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem ini dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing Pemerintah Propinsi agar dapat mengisi data pada *website* tersebut secara *on-line*.
3. Terkait dengan pencairan dana rekonstruksi, Pemerintah DIY diharapkan mampu mendorong percepatan terbentuknya Kelompok Masyarakat (Pokmas) sehingga dana program rekonstruksi dapat dicairkan, berkenaan dengan batas waktu pencairan yaitu akhir tahun 2006. Apabila tidak dipakai, maka dana tersebut akan ditarik dan dikembalikan ke Kas Negara. Selain itu, koordinasi secara intensif antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat diperlukan dalam upaya penyaluran bantuan dari lembaga-lembaga donor maupun masyarakat, agar dana tersebut segera dapat diterima oleh korban gempa.

Bab 1: Perkembangan Makroekonomi

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan (qtq)



Dibandingkan triwulan sebelumnya, sesuai dengan siklus ekonominya (*economic cycle*), perekonomian DIY tumbuh positif pada triwulan laporan sebesar 2,24% (qtq), sedikit lebih tinggi dari angka perkiraan (estimasi titik) yaitu sebesar 1,12% (qtq) namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya (triwulan III-2005) yang tercatat 4,03% (qtq). Dengan perkembangan ini nilai output riil perekonomian DIY pada triwulan III-2006 yang diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 tercatat sebesar Rp4.407 miliar.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan positif ekonomi DIY triwulan laporan terutama didorong oleh mulai bangkitnya kegiatan Investasi, yang diukur oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang tumbuh positif hingga 6,34% (qtq). Andil positif kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY triwulan laporan adalah Konsumsi Pemerintah yang mengalami kenaikan sebesar 7,69% (qtq), yang terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran gaji ke-13 kepada PNS, TNI/Polri dan pensiunan. Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga memberikan andil positif yang relatif kecil dan hanya tumbuh 1,32% (qtq), sedangkan nilai komponen Lainnya (termasuk kegiatan ekspor-impor dan perdagangan antar wilayah) merosot drastis hingga 30,47% (qtq) dengan andil sebesar -1,71%.

Dari sisi penawaran, tercatat 3 (tiga) sektor ekonomi yang berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi DIY triwulan laporan, yaitu (1) sektor Jasa-jasa, (2) sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan (3) sektor Bangunan, yang mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 22,13% (qtq), 4,85% (qtq) dan 8,12% (qtq). Pesatnya peningkatan kinerja sektor Jasa-jasa lebih disebabkan oleh lonjakan nilai Jasa Pemerintahan terkait dengan adanya tambahan belanja pegawai untuk pembayaran gaji ke-13. Sementara itu, pertumbuhan positif pada sektor Perdagangan, Hotel & Restoran ditunjang oleh bangkitnya kinerja subsektor Perdagangan, sedangkan subsektor Hotel & subsektor Restoran masih terjadi kontraksi karena masih rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tiga bulan pertama sejak terjadinya gempa tektonik

27 Mei 2006. Upaya rekonstruksi bangunan tempat tinggal/usaha yang telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat mempercepat akselerasi peningkatan kinerja sektor Bangunan yang cenderung melonjak menjelang akhir tahun atau penutupan tahun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APDB).

Kontraksi yang terjadi pada sektor Pertanian pada musim kemarau memberikan andil negatif terbesar kepada total laju pertumbuhan ekonomi DIY. Pada triwulan III-2006 sektor Pertanian tumbuh negatif sebesar -7,19% (qtq) dengan andil negatif sebesar -1,54%. Posisi pemberi andil negatif kedua terbesar (-1,14%) ditempati oleh sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan yang mengalami penurunan sebesar 12,03% (qtq), yang terutama disebabkan oleh kinerja subsektor Perbankan yang turun hingga 28,65%. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan, yang paling terkena dampak gempa, pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,05% (qtq) sehingga terhadap total pertumbuhan ekonomi DIY sektor ini memberikan andil negatif yaitu -0,42%. Penurunan kinerja terjadi hampir di semua golongan industri kecuali golongan Industri Lainnya (termasuk industri perhiasan dan alat-alat laboratorium). Kinerja sektor Listrik, Gas & Air Bersih pada triwulan laporan turun 6,21% (qtq) dan memberikan andil negatif sebesar -0,06%.

Ditinjau dari aspek wilayah administratif, pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan laporan dialami oleh hampir seluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Bantul yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21% (qtq). Laju pertumbuhan ekonomi tercepat terjadi pada Kabupaten Kulonprogo yang mencapai 3,85% (qtq), selanjutnya diikuti oleh Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan terakhir Kabupaten Gunungkidul, masing-masing sebesar 2,97% (qtq), 2,64% (qtq), dan 2,53% (qtq).

Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy)

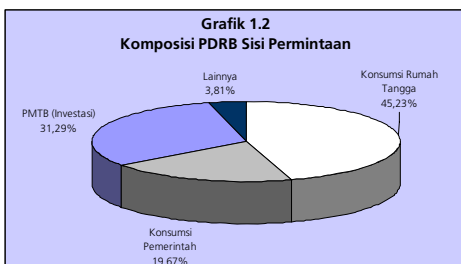
Meskipun secara triwulan mencatat pertumbuhan positif yang terutama dipengaruhi oleh faktor musiman, namun berdasarkan pengamatan atas perkembangan angka pertumbuhan tahunan (yoy) nampaknya perputaran roda perekonomian DIY sampai dengan triwulan III-2006 masih memperlihatkan perlambatan, terutama sejak akhir tahun 2005 yang dipicu kenaikan BBM dan pertengahan tahun yang diakibatkan gempa bumi yang melanda DIY dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perkembangan angka laju pertumbuhan tahunan ekonomi DIY yang cenderung menurun, dari 8,60% (yoy) pada triwulan IV-2005 menjadi 4,12% (yoy) pada triwulan I-2006, kemudian turun lagi menjadi 3,47% (yoy) pada triwulan II-2006 dan terakhir tercatat 1,69% (yoy) pada triwulan laporan (lihat Grafik 1.1).

Pada sisi permintaan, masih rendahnya angka pertumbuhan tahunan terutama disebabkan oleh komponen Lainnya (terutama yang berasal dari net ekspor dan net perdagangan antar wilayah) yang tumbuh negatif sebesar -11,39% (yoy), yaitu dari surplus sebesar Rp189 miliar pada triwulan III-2005 menjadi Rp168 miliar pada triwulan III-2006. Konsumsi Pemerintah meskipun tumbuh positif sebesar 7,13% (yoy) namun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada triwulan III-2005 yang mencapai 14,18% (yoy). Hal ini mencerminkan bahwa peran pengeluaran pemerintah daerah dalam perkembangan ekonomi DIY pada saat ini masih relatif rendah atau belum maksimal. Demikian pula dengan Investasi (PMTB), angka pertumbuhan tahunannya hanya tercatat 1,07% (yoy), jauh lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 13,35% (yoy). Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga secara tahunan tumbuh tipis 1,14% (yoy), juga lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan III-2005 sebesar 1,81% (yoy) (lihat Tabel 1.1). Masih relatif rendahnya dorongan Konsumsi Rumah Tangga terhadap pergerakan roda perekonomian DIY terutama sejak kenaikan BBM 1 Oktober 2005 dikonfirmasi oleh perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang cenderung menurun sejak akhir tahun 2005, yakni dari 96,50 pada triwulan IV-2005, 79,58 pada triwulan I-2006, 76,92 pada triwulan II-2006 dan 68,42 pada triwulan III-2006.

Pada sisi penawaran, kecilnya angka pertumbuhan tahunan ekonomi DIY pada saat ini terutama disebabkan oleh kinerja sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan yang tumbuh negatif hingga -21,34%, yaitu dari Rp456 miliar pada triwulan III-2005 menjadi Rp359 miliar pada triwulan III-2006, padahal pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sektor ini tumbuh positif hingga 7,28% (yoy). Selain itu, tiga sektor lainnya yang juga mengalami laju pertumbuhan negatif secara tahunan (yoy) adalah sektor Industri Pengolahan (-7,10%), sektor Listrik, Gas & Air Bersih (-3,63%) dan sektor Penggalian (-1,69%) (lihat Tabel 1.2).

PERKEMBANGAN PDRB SISI PERMINTAAN

Dari perspektif PDRB sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 2,24% (qta) pada triwulan ini terutama didorong oleh membaiknya kinerja Investasi yang memberikan sumbangan/andil terbesar yakni 1,91%, selanjutnya diikuti oleh andil dari Konsumsi Pemerintah sebesar 1,44% dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,60%. Sedangkan kinerja komponen Lainnya (termasuk di dalamnya net ekspor dan net perdagangan antar wilayah) pada triwulan ini memberikan andil negatif sebesar -1,71%.



Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan III-2006 nilai riil Konsumsi Rumah Tangga tercatat sebesar Rp1.993 miliar, naik tipis 1,32% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya dan 1,14% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal mengalami peningkatan, pangsa Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB DIY mengalami penurunan tipis dari 45,65% pada triwulan II-2006 menjadi 45,23% pada triwulan III-2006, yang mencerminkan bahwa peran Konsumsi Rumah Tangga dalam perekonomian DIY cenderung menurun. Kondisi ini sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) cenderung menurun sejak triwulan IV-2005. Pada triwulan ini IKK tercatat sebesar 68,42, lebih rendah dibandingkan dengan IKK triwulan sebelumnya sebesar 76,92 atau turun 11,05% (qtq).

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan

No	Jenis Penggunaan	2005*					2006**							
		I	II	III	IV	Total	I	II	III					
									yoy	qtq	Andil	Pangsa	Nilai ¹	
1	Konsumsi Rumah Tangga	1,36	1,14	1,81	1,00	1,33	-0,23	0,67	1,14	1,32	0,60	45,23	1.993	
2	Konsumsi Pemerintah	-9,92	-6,32	14,18	29,85	6,46	7,36	12,53	7,13	7,69	1,44	19,67	867	
3	Investasi (PMTB)	-8,25	1,32	13,35	18,85	6,71	25,04	11,15	1,07	6,34	1,91	31,29	1.379	
4	Lainnya	62,85	57,49	9,09	...	18,98	-14,75	-26,83	-11,39	-30,47	-1,71	3,81	168	
Total		-0,15	2,83	8,47	8,60	4,74	4,12	3,47	1,69	2,24	2,24	100,00	4.407	

Keterangan:

1) PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (miliar Rp).

*) Angka sementara.

**) Angka sangat sementara.

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

Konsumsi Pemerintah

Nilai riil Konsumsi Pemerintah yang tercatat sebesar Rp867 miliar pada triwulan III-2006 tumbuh 7,69% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya atau tumbuh 7,13% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III-2005. Dengan perkembangan ini, peran Konsumsi Pemerintah dalam perekonomian DIY semakin besar sebagaimana yang tercermin dari pangasanya yang naik dari 18,68% pada triwulan II-2006 menjadi 19,67% pada triwulan III-2006. Meskipun tercatat sebagai motor pertumbuhan dari sisi permintaan, kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan ini relatif lebih kecil dibandingkan kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan III-2005 yang tumbuh hingga 14,18% (yoy). Turunnya kinerja Konsumsi Pemerintah pada tahun ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya nilai realisasi belanja pemerintah daerah terutama pada pos belanja modal/pemeliharaan atau non rutin. Berdasarkan informasi yang diterima dari instansi terkait, rendahnya realisasi belanja non rutin terutama disebabkan oleh rencana (*plotting*) belanja non rutin yang terkonsentrasi pada akhir tahun, prosedur pengesahan APBD pada saat ini yang lebih panjang karena harus dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri,

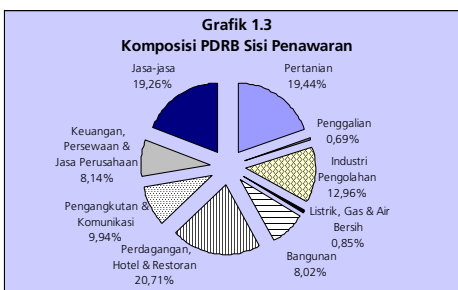
dan rendahnya minat pejabat daerah yang bersedia sebagai pimpinan proyek serta rendahnya tingkat kelulusan pejabat daerah dalam ujian untuk memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa (lihat Boks “Kinerja dan Hambatan Penyerapan APBD DIY”).

Investasi

Nilai riil investasi di DIY pada triwulan III-2006 yang diukur dari nilai tambah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) tercatat sebesar Rp1.379 miliar, tumbuh sebesar 6,34% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau 1,07% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan laporan pangsa investasi terhadap total PDRB DIY tercatat sebesar 31,29%, naik dibandingkan dengan triwulan II-2006 yang tercatat 30,08%. Meskipun mengalami pertumbuhan positif, kinerja investasi pada triwulan ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan kinerja investasi pada triwulan III-2005 yang secara tahunan tumbuh 13,35% (yoy). Rendahnya kinerja investasi secara umum pada tahun ini terutama dipengaruhi oleh dampak kenaikan BBM 1 Oktober 2006 dan masih tingginya level suku bunga kredit pada saat ini meskipun suku bunga simpanan sudah menunjukkan penurunan, mengikuti suku bunga BI (BI Rate) yang sudah diturunkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini.

Lainnya

Kinerja komponen Lainnya (termasuk net ekspor dan net perdagangan antar wilayah) mengalami penurunan signifikan pada triwulan III-2006. Nilai riil surplus komponen ini anjlok dari Rp241 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp168 miliar pada triwulan III-2006, atau turun hingga 30,47% (qtq). Sementara dibandingkan dengan triwulan III-2005, komponen Lainnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -11,39% (yoy).



PERKEMBANGAN PDRB SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, pertumbuhan positif ekonomi DIY triwulan laporan sebesar 2,24% (qtq) terutama didukung oleh kinerja sektor Jasa-jasa, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Bangunan dengan andil masing-masing sebesar 3,57%, 0,98% dan 0,62%. Sedangkan andil negatif terutama berasal dari sektor Pertanian sebesar -1,54% dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar -1,14%.

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB Sisi Penawaran

No	Sektor	2005*					2006**						
		I	II	III	IV	Total	I	II	III				
									yoy	qtq	Andil	Pangsa	Nilai ¹
1	Pertanian	-2,07	8,15	10,89	4,01	4,35	4,01	13,12	6,83	-7,19	-1,54	19,44	856
2	Penggalian	-0,59	1,30	5,00	0,64	1,57	2,88	-3,50	-1,69	6,08	0,04	0,69	30
3	Industri Pengolahan	-4,94	6,57	6,45	3,49	2,60	1,57	-5,96	-7,10	-3,05	-0,42	12,96	571
4	Listrik, Gas & Air Bersih	7,41	3,20	6,47	6,38	5,83	7,21	4,04	-3,63	-6,21	-0,06	0,85	37
5	Bangunan	-6,66	15,19	8,58	15,87	8,61	6,88	2,92	5,75	8,12	0,62	8,02	353
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,07	4,65	5,37	4,90	5,04	7,42	1,45	4,99	4,85	0,98	20,71	913
7	Pengangkutan & Komunikasi	2,57	4,71	6,82	8,91	5,76	4,41	3,81	3,47	1,88	0,19	9,94	438
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,16	12,34	7,28	4,65	8,17	4,20	1,88	-21,34	-12,03	-1,14	8,14	359
9	Jasa-jasa	-1,94	-16,28	13,30	19,09	2,49	0,94	4,38	10,99	22,13	3,57	19,26	849
	Total	-0,15	2,83	8,47	8,60	4,74	4,12	3,47	1,69	2,24	2,24	100,00	4.407

Keterangan:
 1) PDRB Harga Konstan Tahun 2000 (miliar Rp).
 *) Angka sementara.
 **) Angka sangat sementara.
 Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

Sektor Pertanian

Dibandingkan dengan triwulan II-2006 kinerja sektor Pertanian pada triwulan ini tumbuh negatif sebesar -7,19% (qtq), sedangkan apabila dibandingkan dengan triwulan III-2005 kinerja sektor Pertanian tumbuh 6,83% (yoy). Nilai riil PDRB sektor Pertanian pada triwulan ini tercatat sebesar Rp856 miliar dengan pangsa terhadap total PDRB yang mencapai 19,44%, terbesar kedua setelah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yang tercatat 20,71%.

Pertumbuhan negatif Sektor Pertanian pada triwulan laporan disebabkan oleh kinerja subsektor Tanaman Bahan Makanan yang turun sebesar 8,41% (qtq), dan kinerja subsektor Perikanan yang turun sebesar 3,53% (qtq). Sementara itu, subsektor Perkebunan dan Peternakan masing-masing turun 3,53% (qtq) dan 0,70% (qtq), sedangkan kinerja subsektor Kehutanan mencatat kenaikan sebesar 2,59% (qtq).

Penurunan kinerja subsektor Tanaman Bahan Makanan disebabkan oleh menyusutnya produksi padi sebesar 29,10% (qtq), diikuti oleh produksi jagung dan kedelai yang masing-masing turun 56,97% (qtq) dan 57,55% (qtq). Sedangkan komoditas yang mencatat peningkatan produksi adalah ubi kayu yang naik lebih 15 kali lipat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan ini umum terjadi karena komoditas ubi kayu ditanam pada musim kemarau sehingga memperlihatkan pertumbuhan yang sangat besar.

Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun 2005, kinerja sektor Pertanian yang tumbuh 6,83% (yoy) mencerminkan bahwa kinerja sektor Pertanian pada triwulan ini relatif membaik. Kondisi ini terutama ditunjang oleh peningkatan produksi yang tinggi pada komoditas ubi kayu. Kabupaten Gunungkidul yang merupakan penghasil utama komoditas ubi kayu menerapkan

Program Terobosan Ubi Kayu di 15 kecamatan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui pemupukan dan pengelolaan tanaman yang lebih efisien.

Sektor Penggalian

Pada triwulan III-2006 nilai riil PDRB sektor Penggalian tercatat sebesar Rp30 miliar, tumbuh 6,08% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sedangkan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh negatif sebesar -1,69% (yoy). Pertumbuhan triwulanan positif sektor Penggalian pada triwulan ini ditunjang oleh naiknya permintaan bahan galian seperti pasir, batu, dan tanah liat untuk proyek-proyek konstruksi pasca gempa. Kinerja sektor Penggalian juga mulai meningkat karena menurunnya status G. Merapi sejalan dengan aktivitas vulkanik yang juga menurun. Kondisi tersebut membuka kembali usaha penambangan pasir di sepanjang daerah aliran sungai di sekitar kawasan gunung tersebut.

Sektor Industri Pengolahan

Nilai tambah yang dihasilkan sektor Industri Pengolahan pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp571 miliar, turun 3,05% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya atau 7,10% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dengan nilai tersebut, pangsa sektor Industri Pengolahan terhadap total PDRB DIY tercatat sebesar 12,69%. Penurunan kinerja sektor ini disebabkan oleh melorotnya produksi yang terjadi pada semua golongan industri kecuali golongan Industri Lainnya (ISIC 39), termasuk industri perhiasan dan alat-alat laboratorium, yang tumbuh 1,67% (qtq).

Golongan industri yang masih mengalami penurunan kinerja antara lain Industri Tekstil & Pakaian Jadi yang turun 3,88% (qtq), disusul oleh Industri Kayu, Bambu & Rotan (ISIC 33) yang menyusut 3,89% (qtq) serta Industri Barang Galian Bukan Logam (ISIC 36) yang berkontraksi 3,87% (qtq). Sementara itu, Industri Percetakan & Barang Cetak (ISIC 34) dan Industri Barang Kimia (ISIC 35) mengalami penurunan masing-masing 1,25% (qtq) dan 1,03% (qtq).

Besarnya angka laju pertumbuhan tahunan sektor ini yang mencapai 7,10% (yoy) membutuhkan perhatian pemerintah daerah mengingat selama ini produk-produk industri menjadi andalan ekspor DIY. Oleh karena itu kontraksi yang terjadi diperkirakan akan mengganggu kinerja ekspor DIY pada tahun ini. Disamping ekspor luar negeri, komoditas industri DIY juga banyak melayani permintaan pasar dalam negeri seperti misalnya Bali dan Jakarta terutama untuk produk kerajinan dan tekstil/pakaian jadi.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Dibandingkan triwulan sebelumnya, kinerja sektor Listrik, Gas & Air Bersih pada triwulan III-2006 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -6,21% (qtq) dengan nilai riil sebesar Rp37 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh energi listrik terjual yang turun sebesar 6,62% (qtq) dan penjualan air minum yang juga turun sebesar 1,12% (qtq). Kerusakan jaringan instalasi akibat banyaknya rumah yang roboh dan rusak berat menjadikan distribusi aliran listrik belum pulih sepenuhnya sehingga penggunaan energi listrik menurun. Hal yang sama juga terjadi pada distribusi air bersih yang mengalami penyusutan karena menurunnya produksi PDAM menyusul berkurangnya debit sumber baku air minum yang dikelola PDAM.

Jika dibandingkan dengan triwulan III-2005, sektor Listrik, Gas & Air Minum mengalami kontraksi 3,63% (yoy). Hal ini menunjukkan permintaan sektor listrik, dan air bersih pada triwulan laporan relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu.

Sektor Bangunan

Sektor Bangunan pada triwulan ini memberikan nilai tambah sebesar Rp353 miliar, tumbuh pesat hingga 8,12% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga pangsa sektor ini naik dari 7,97% pada triwulan II-2006 menjadi 8,02% pada triwulan ini. Pesatnya laju pertumbuhan sektor Bangunan pada triwulan III-2006 terutama didorong oleh upaya rekonstruksi bangunan tempat tinggal dan usaha oleh masyarakat secara swadaya serta mulai dilakukannya perbaikan tempat tinggal penduduk terutama di Kabupaten Bantul yang juga didukung pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam kaitannya dengan program rekonstruksi pasca gempa.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Pada triwulan III-2006 sektor ini tercatat sebagai sebagai sektor ekonomi dengan pangsa terbesar dalam pembentukan PDRB DIY, yakni tercatat sebesar 20,71%. Nilai tambah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran tercatat Rp913 miliar, tumbuh 4,85% (qtq) dibandingkan triwulan II-2006. Kondisi ini ditunjang oleh pertumbuhan pesat pada subsektor Perdagangan Besar & Eceran yang tercatat 26,81% (qtq). Sedangkan subsektor Hotel dan subsektor Restoran masih mengalami pertumbuhan negatif masing-masing -5,69% (qtq) dan -4,10% (qtq).

Belum pulihnya aktivitas wisata DIY dalam triwulan III-2006 menjadikan pertumbuhan hotel dan restoran juga belum positif mengingat permintaan kedua subsektor tersebut mengandalkan tingginya kunjungan wisatawan. Disamping itu,

pemberitaan kerusakan tempat wisata seperti candi dan hotel-hotel yang gencar di media massa juga kontraproduktif dengan upaya menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berita seperti itu memunculkan persepsi masyarakat dari luar DIY bahwa sebagian besar fasilitas wisata rusak berat pasca gempa Mei lalu. Gambaran suramnya kegiatan wisata tahun 2006 berbeda dengan kondisi tahun 2005 dimana musim liburan sekolah pada bulan Juni-Juli mampu menaikkan tingkat penghunian kamar hotel dan permintaan konsumsi pada usaha restoran. Upaya promosi wisata yang telah dilakukan oleh instansi terkait serta langkah mendorong kegiatan konvensi dan pameran dalam jangka waktu ke depan diharapkan mampu memulihkan aktivitas bisnis perhotelan dan restoran di wilayah DIY.

Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Nilai tambah sektor Pengangkutan & Komunikasi pada triwulan laporan tercatat Rp.438 miliar, atau tumbuh 1,88% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya atau 3,50% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja sektor ini ditunjang oleh kinerja subsektor Pengangkutan yang naik 1,00% (qtq) dan kinerja subsektor Komunikasi yang naik 5,43% (qtq).

Peningkatan subsektor Pengangkutan didorong oleh pertumbuhan yang pesat pada angkutan rel (kereta api) dan angkutan udara yang masing-masing tercatat 8,65% (qtq) dan 8,83% (qtq). Kenaikan permintaan pada dua jenis perhubungan tersebut diduga karena naiknya permintaan sektor usaha dan perjalanan reguler (non wisata) mengingat pergerakan wisatawan pada triwulan laporan diperkirakan lebih lambat dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini ditandai dengan berkurangnya frekuensi penerbangan pada jalur wisata seperti jalur Yogyakarta-Bali dan Yogyakarta-Jakarta dengan penutupan sementara jalur tersebut oleh beberapa maskapai penerbangan.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Kinerja sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan pada triwulan III-2006 turun drastis sebesar 12,03% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sehingga nilai riil PDRB sektor ini tercatat sebesar Rp359 miliar. Penurunan ini terutama dipicu oleh rendahnya pendapatan subsektor Bank yang mengalami kontraksi hingga 28,65% (qtq), sejalan dengan lambatnya penyaluran kredit pada tahun ini. Sementara itu, subsektor Sewa Bangunan turun 4,44% (qtq). Jumlah kerusakan bangunan tempat tinggal penduduk akibat gempa yang diperkirakan mencapai 208 ribu unit ditambah kerusakan bangunan usaha seperti pusat bisnis, hotel dan bangunan usaha lainnya menyebabkan koreksi yang besar pada usaha persewaan. Kondisi ini masih akan berpengaruh pada usaha persewaan pada

masa mendatang mengingat upaya rekonstruksi bangunan membutuhkan waktu cukup yang relatif lama.

Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan negatif sebesar 21,34% (yoy), yang mengindikasikan lebih rendahnya kinerja sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan pada tahun ini.

Sektor Jasa-jasa

Kinerja sektor Jasa-jasa triwulan ini tumbuh sangat pesat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni mencapai 22,13% (qtq), dengan nilai tambah sebesar Rp849 miliar. Pertumbuhan yang pesat tersebut didorong oleh pertumbuhan subsektor Jasa Pemerintahan sebesar 36,12% (qtq), sedangkan subsektor Jasa Swasta turun sebesar 9,50% (qtq). Pemberian gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan pada awal Juli 2006 menjadikan pertumbuhan subsektor ini cukup tinggi seperti yang sama ini telah terjadi dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, pada subsektor Swasta, penurunan yang terjadi disebabkan oleh kelompok Jasa Perorangan yang turun 15,19% (qtq), meskipun kelompok Jasa Sosial dan Jasa Hiburan masing-masing tumbuh 10,51% (qtq) dan 16,27% (qtq). Karena andil kelompok Jasa Perorangan relatif besar terhadap total subsektor Jasa Swasta, maka kinerja Jasa Perorangan menjadi faktor penentu besaran pertumbuhan di kelompok itu.

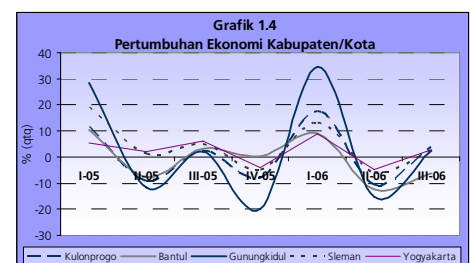
Dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, sektor Jasa-jasa tumbuh 10,99% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa peran belanja aparatur dalam APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi DIY semakin besar dibandingkan dengan kondisi pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan perspektif kewilayahan, perkembangan ekonomi DIY yang tumbuh positif sebesar 2,24% (qtq) pada triwulan laporan secara umum terjadi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Bantul yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -6,21% (qtq).

Kabupaten Gunungkidul

Pada triwulan III-2006 perkembangan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mengalami pertumbuhan 2,52% (qtq). Perkembangan ini ditunjang oleh kinerja sektor Jasa-jasa dan sektor Penggalian yang masing-masing tumbuh 24,84% (qtq) dan 4,17%. Potensi sektor Perdagangan di kabupaten ini juga tercatat tumbuh



relatif cepat yakni sebesar 6,55% (qtq). Sementara itu, pada sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan terjadi penurunan kinerja yaitu masing-masing sebesar -6,40% (qtq) dan 0,22% (qtq).

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

%(qtq)

No	Kabupaten/Kota	2005*					2006**		
		I	II	III	IV	Total	I	II	III
1	Kulonprogo	11,51	-9,13	2,53	-7,98	4,77	17,45	-10,65	3,85
2	Bantul	10,59	-7,74	3,04	0,40	4,99	8,98	-12,35	-6,21
3	Gunungkidul	28,48	-11,65	2,25	-19,76	4,33	34,50	-15,30	2,52
4	Sleman	19,02	1,55	4,91	-4,59	5,03	13,41	-5,78	2,64
5	Yogyakarta	5,25	2,21	6,18	-3,85	4,88	8,88	-4,64	2,97

Keterangan:
*) Angka sementara.
**) Angka sangat sementara.
Propinsi DIY, diolah.

Kabupaten Kulonprogo

Dibandingkan triwulan sebelumnya, perekonomian Kabupaten Kulonprogo pada triwulan III-2006 tumbuh pesat hingga 3,85% (qtq), tertinggi dibandingkan angka pertumbuhan kabupaten/kota lainnya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo tersebut dipicu oleh sektor Jasa-jasa yang tumbuh hingga 23,69% (qtq) dan sektor Perdagangan yang naik sebesar 7,21% (qtq). Sedangkan untuk sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan pada triwulan ini tercatat penurunan yaitu masing-masing sebesar 2,17% (qtq) dan 10,01% (qtq).

Kabupaten Bantul

Sementara daerah lainnya di DIY tumbuh positif, pada triwulan laporan perekonomian Kabupaten Bantul tumbuh negatif sebesar -6,21% (qtq). Pertumbuhan negatif yang terjadi di Kabupaten ini merupakan dampak dari lumpuhnya beberapa sektor ekonomi pada periode pasca gempa karena tingkat kerusakan infrastruktur yang parah. Sebagian besar sektor mengalami kontraksi kecuali sektor Bangunan dan sektor Jasa-jasa yang tumbuh pesat masing-masing sebesar 36,36% (qtq) dan 5,12% (qtq). Selain itu, sektor Penggalian juga tercatat naik sebesar 9,35% (qtq), sedangkan kinerja sektor-sektor utama lainnya seperti sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Industri Pengolahan tumbuh negatif masing-masing sebesar 8,57% (qtq) dan 13,84% (qtq).

Kabupaten Sleman

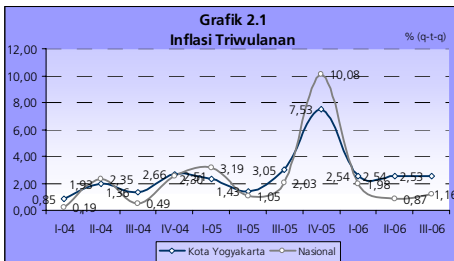
Pada triwulan III-2006, perekonomian Kabupaten Sleman tumbuh 2,64% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan struktur ekonomi yang mirip dengan Kota Yogyakarta, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman menggantungkan pada sektor Jasa-jasa dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran. Kedua sektor tersebut pada triwulan laporan tumbuh cukup pesat yaitu masing-masing sebesar 23,10% (qtq) dan 8,23% (qtq), sementara sektor Bangunan di Kabupaten ini juga tumbuh positif yaitu sebesar 4,66% (qtq).

Kota Yogyakarta

Perekonomian Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan 2,97% (qtq) pada triwulan laporan. Perkembangan ini lebih didorong oleh pesatnya pertumbuhan sektor Jasa-jasa yang mencapai 19,26% (qtq). Sementara itu, laju pertumbuhan sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran juga mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 9,24% (qtq) dan 4,50% (qtq).

Bab 2: Perkembangan Inflasi

INFLASI TRIWULANAN

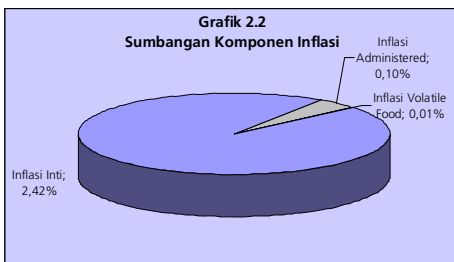


Perkembangan peningkatan harga (inflasi) di Kota Yogyakarta masih terus berlangsung pada triwulan laporan. Bahkan tekanan kenaikan inflasi pada triwulan ini masih relatif kuat yang terutama dipicu oleh kuatnya tarikan yang dipengaruhi faktor musiman yaitu adanya tahun ajaran baru. Inflasi triwulanan Kota Yogyakarta yang diukur oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 2,53% (qtq), hampir sama dengan yang diperkirakan sebelumnya sebesar 2,51% (qtq) dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional dalam periode yang sama yaitu sebesar 1,16% (qtq).

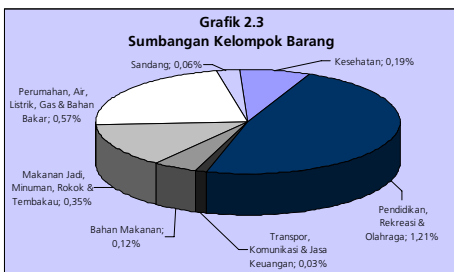
Tabel 2.1
Sumbangan Komponen Inflasi Triwulanan

No	Disagregasi Inflasi	IV-2005		I-2006		II-2006		III-2006	
		Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil
1	Inflasi Inti	2,69	1,86	2,78	1,84	2,81	1,87	3,63	2,42
2	Inflasi Administered	27,02	4,25	0,28	0,06	1,20	0,22	0,57	0,10
3	Inflasi Volatile Food	9,53	1,42	4,23	0,64	2,94	0,45	0,07	0,01
Inflasi IHK		7,53	7,53	2,54	2,54	2,54	2,54	2,53	2,53

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.



Kuatnya faktor permintaan dalam mendorong tingginya inflasi pada triwulan laporan diindikasikan oleh inflasi inti (*core inflation*) yang mendominasi dalam pembentukan inflasi, yakni mencapai 2,42% sedangkan sumbangan inflasi komoditas yang harganya diatur pemerintah pemerintah (*administered inflation*) dan inflasi komoditas makanan (*volatile food inflation*) masing-masing hanya tercatat 0,10% dan 0,01%.



Berdasarkan kelompok barang dan jasa, penyumbang utama inflasi triwulanan berasal dari kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 1,21%, selanjutnya diikuti oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,57%. Besarnya sumbangan kedua kelompok tersebut terhadap inflasi triwulan laporan nampaknya berhubungan dengan status Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan karena di kota ini jumlah mahasiswa/pelajar di kota ini relatif besar dibandingkan dengan total penduduk dan jumlah perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 100 lembaga. Oleh karena itu, adanya awal tahun ajaran

Tabel 2.2
Inflasi Menurut Kelompok

No	Kelompok	2005		2006									
		IV		I		II		III					
		qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	yoy	qtq	Andil	ytd	Andil	yoy	Andil
1	Bahan Makanan	8,20	14,10	3,78	16,96	2,65	19,77	0,66	0,12	7,23	1,30	16,02	2,86
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	3,61	12,73	7,40	17,70	2,52	17,72	1,68	0,35	11,95	2,37	15,99	3,30
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	8,35	12,74	0,49	11,37	2,51	12,97	2,34	0,57	5,42	1,35	14,22	3,52
4	Sandang	2,99	7,97	1,11	8,73	3,13	11,19	1,11	0,06	5,42	0,29	8,58	0,47
5	Kesehatan	1,52	8,88	0,65	6,54	10,54	14,20	2,87	0,19	14,46	0,90	16,20	1,07
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	0,14	10,87	0,95	11,55	0,72	12,40	12,65	1,21	14,55	1,44	14,71	1,56
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	21,20	32,41	0,47	25,63	0,27	22,85	0,21	0,03	0,95	0,15	22,35	3,14
UMUM		7,53	14,98	2,54	15,25	2,54	16,50	2,53	2,53	7,80	7,80	15,92	15,92

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

baru memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap perekonomian DIY, yang juga disertai dengan kuatnya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa yang terkait dengan industri pendidikan. Pada triwulan ini inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga tercatat sebagai angka inflasi tertinggi yaitu sebesar 12,65% (qtq), melonjak dari 0,95% (qtq) pada triwulan I-2006 dan 0,72% (qtq) pada triwulan II-2006. Sementara itu, pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar terjadi inflasi sebesar 2,34% (qtq).

Tabel 2.3
Subkelompok Penyumbang Terbesar Terhadap Inflasi Triwulanan

Peringkat	Subkelompok	Andil	Inflasi
1	Jasa Pendidikan	1,18	17,85
2	Biaya Tempat Tinggal	0,58	4,11
3	Daging dan Hasil-hasilnya	0,26	9,84
4	Makanan Jadi	0,18	1,29
5	Jasa Kesehatan	0,16	4,71
6	Buah - buahan	0,15	9,21
7	Tembakau dan Minuman Beralkohol	0,13	4,33
8	Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	0,04	2,07
9	Ikan Segar	0,04	6,42
10	Minuman yang Tidak Beralkohol	0,04	0,96
Total		2,76	

Keterangan:

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

Berdasarkan subkelompok, peringkat tertinggi penyumbang inflasi ditempati oleh subkelompok Jasa Pendidikan sebesar 1,18%, yang selanjutnya diikuti oleh subkelompok Biaya Tempat Tinggal sebesar 0,58% dan subkelompok Daging & Hasil-hasilnya sebesar 0,26% (lihat Tabel 2.3). Sementara itu dari sisi komoditas, Akademi/Perguruan Tinggi, SLTP dan SLTA tercatat sebagai tiga

Tabel 2.4
Komoditas Penyumbang Terbesar Terhadap Inflasi Triwulanan

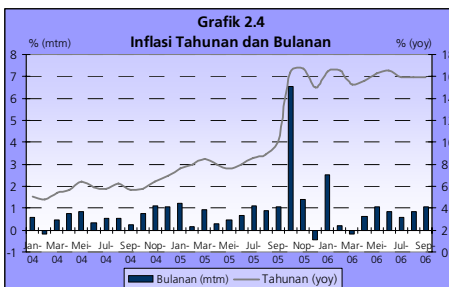
Peringkat	Komoditas	Andil	Inflasi
1	Akademi/Perguruan Tinggi	0,58	17,88
2	SLTP	0,36	54,24
3	SLTA	0,25	14,64
4	Daging Ayam Ras	0,22	17,26
5	Sewa Rumah	0,21	10,09
6	Tarif Rumah Sakit	0,14	5,38
7	Kontrak Rumah	0,11	1,65
8	Kayu Balokan	0,10	19,24
9	Nasi	0,09	2,34
10	Pasir	0,08	19,76
Total		2,15	

Keterangan:

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

komoditas penyumbang inflasi yang terbesar terhadap inflasi Kota Yogyakarta triwulan laporan, dengan sumbangan masing-masing sebesar 0,58%, 0,36% dan 0,25% (lihat Tabel 2.4).

INFLASI BULANAN



Angka rata-rata inflasi bulanan (mtm) Kota Yogyakarta selama triwulan III-2006 sama dengan angka rata-rata pada triwulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,84%. Dalam tiga bulan di triwulan III-2006, inflasi tertinggi terjadi di bulan September sebesar 1,07% (mtm), yang terutama dipicu oleh tingginya angka inflasi kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga, sementara inflasi bulan Juli dan Agustus masing-masing sebesar 0,60% (mtm) dan 0,84% (mtm).

Inflasi Juli

Inflasi Juli 2006 yang tercatat 0,60% (mtm) terutama dipengaruhi oleh tingginya angka inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar yang mencapai 1,76% (mtm). Dua kelompok lainnya yang mengalami inflasi yang tinggi adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,97% dan kelompok Sandang sebesar 0,90%. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi negatif atau deflasi pada bulan Juli 2006 adalah kelompok Bahan Makanan yaitu sebesar -0,73% (mtm).

Menurut subkelompok, angka inflasi tertinggi pada bulan Juli 2006 dialami oleh subkelompok Daging & Hasil-hasilnya yaitu sebesar 4,41% (mtm), sedangkan angka deflasi tertinggi terjadi pada subkelompok Bumbu-bumbuan yaitu sebesar -9,88% (mtm).

Tabel 2.5
Inflasi Bulanan

No	Kelompok	% (mtm)														
		III-2005			IV-2005			I-2006			II-2006			III-2006		
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
1	Bahan Makanan	2,66	-1,01	2,25	8,98	2,43	-3,07	7,28	-0,94	-2,34	0,50	0,42	1,71	-0,73	-0,14	1,54
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	0,94	0,64	1,59	2,12	1,07	0,39	4,92	1,09	1,25	1,08	0,99	0,43	0,97	0,50	0,21
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	0,34	0,55	0,32	7,83	0,62	-0,13	0,17	0,38	-0,06	0,61	0,50	1,38	1,76	0,36	0,21
4	Sandang	0,96	0,86	1,69	1,07	0,81	1,08	0,88	0,22	0,01	1,43	2,88	-1,17	0,90	0,46	-0,25
5	Kesehatan	0,23	0,53	0,35	0,35	0,74	0,42	0,42	0,11	0,13	0,80	7,37	2,14	0,41	0,20	2,25
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	2,34	6,81	0,99	0,19	0,00	-0,05	0,82	0,08	0,05	0,57	0,03	0,12	0,17	6,39	5,71
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	0,26	0,10	0,26	17,51	3,19	-0,04	0,13	0,31	0,03	-0,01	0,25	0,03	0,08	0,13	-0,01
	UMUM	1,09	0,87	1,06	6,53	1,40	-0,45	2,50	0,21	-0,17	0,64	1,05	0,83	0,60	0,84	1,07

Keterangan:
Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

Inflasi Agustus

Memasuki bulan Agustus 2006 tekanan inflasi memperlihatkan peningkatan sebagaimana tercermin dari inflasi bulanan sebesar 0,84% (mtm). Pada bulan ini tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh lonjakan kenaikan harga pada kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga yang mencapai 6,39% (mtm), yang terutama dipicu oleh kenaikan harga subkelompok Jasa Pendidikan yang tercatat hingga 9,18% (mtm). Sedangkan angka inflasi untuk kelompok lainnya berkisar di bawah 1%, bahkan pada kelompok Bahan Makanan masih terjadi deflasi yaitu sebesar -0,14% (mtm). Pada bulan ini, subkelompok Bumbu-bumbuan kembali terjadi deflasi yakni mencapai -14,29% (mtm).

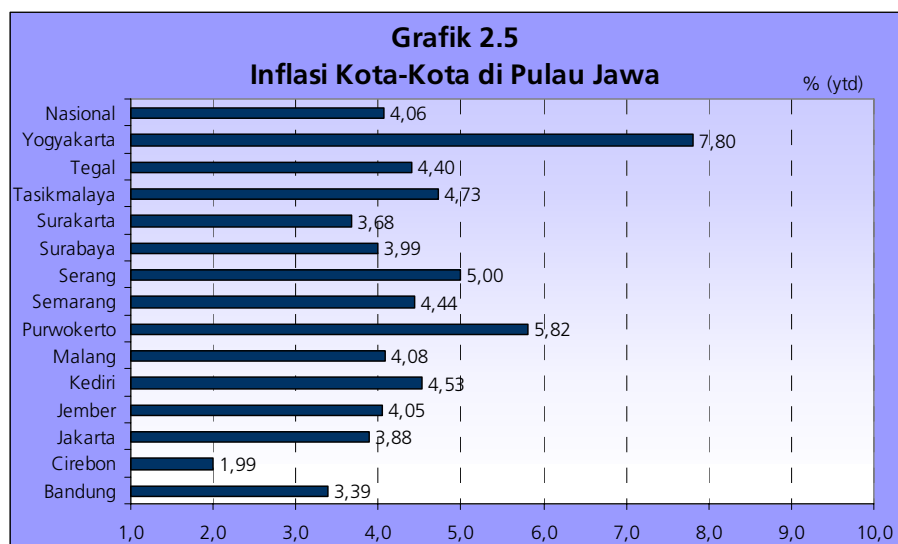
Inflasi September

Tibanya bulan suci Ramadhan di akhir bulan September 2006 nampaknya berpengaruh terdapat berlanjutnya tekanan inflasi. Pada bulan ini inflasi tercatat 1,07% (mtm), naik dibandingkan bulan sebelumnya. Selain didorong oleh masih tingginya kenaikan barang/jasa kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 5,71% (mtm), tingginya angka inflasi bulan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas kelompok Bahan Makanan yang terkoreksi kembali dengan inflasi sebesar 1,54% (mtm), setelah dua sebelumnya mengalami inflasi negatif (deflasi). Kelompok lainnya yang juga mengalami inflasi cukup tinggi adalah kelompok Kesehatan sebesar 2,25% (mtm). Meskipun secara umum terjadi inflasi, namun pada bulan ini tercatat dua kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok Sandang dan kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Perusahaan, masing-masing sebesar -0,25% (mtm) dan -0,01% (mtm).

INFLASI TAHUNAN

Dibandingkan dengan posisi September 2005, laju perkembangan IHK Kota Yogyakarta pada triwulan III-2006 tercatat sebesar 15,92%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahunan nasional sebesar 14,55% (yoy). Penyumbang utama inflasi tahunan Kota Yogyakarta tersebut masih berasal dari andil inflasi empat kelompok yaitu kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 3,30%, kelompok Bahan Makanan sebesar 2,86%, kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 3,14% dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 3,52%.

Sementara dari sisi laju perkembangan IHK, kelompok barang/jasa yang memiliki angka inflasi tertinggi adalah kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan yang mencapai 22,35% (yoy), dan terendah adalah kelompok Sandang sebesar 8,58% (yoy).



INFLASI TAHUN KALENDER KOTA-KOTA DI PULAU JAWA

Dari Januari sampai dengan posisi September 2006, inflasi tahun kalender Kota Yogyakarta tercatat sebesar 7,80% (ytd), jauh lebih besar dibandingkan inflasi nasional yang hanya 4,06% (ytd). Tingginya angka inflasi tahun kalender Kota Yogyakarta s.d. triwulan III-2006 terutama disumbang oleh besarnya andil inflasi kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 2,37%, diikuti oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga sebesar 1,44%. Sementara

itu, angka inflasi tahun kalender tertinggi terdapat pada kelompok Kesehatan dan kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga yang masing-masing tercatat sebesar 14,46% (ytd) dan 14,55% (ytd).

Dibandingkan dengan laju inflasi tahun kalender kota-kota lainnya di Pulau Jawa, Kota Yogyakarta mencatat rekor tertinggi (lihat Grafik 2.5). Pada posisi kedua dan ketiga, ditempati oleh Kota Purwokerto dan Serang dengan angka inflasi masing-masing sebesar 5,82% (ytd) dan 5,00% (ytd). Sedangkan inflasi terendah dialami oleh Kota Cirebon yang hanya 1,99%.

Bab 3: Perkembangan Perbankan

GAMBARAN UMUM

Perkembangan Kelembagaan

Hingga akhir triwulan III-2006, jumlah jaringan kantor Perbankan DIY (tidak termasuk Kantor Kas BPR) bertambah sebanyak 9 unit sehingga menjadi 803 unit atau tumbuh sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan triwulan II-2006 yang tercatat sebanyak 794 unit. Jumlah penambahan 9 unit tersebut seluruhnya merupakan jaringan kantor Bank Umum dengan rincian penambahan 10 Kantor Kas dan pengurangan 1 layanan *Payment Point*.

Tabel 3.1
Jaringan Kantor Bank

No	Uraian	2004	2005				2006			
			I	II	III	IV	I	II	III	
									Posisi	Ptumb ¹
A	Bank Umum	595	618	626	673	680	698	729	738	1,23
1	Kantor Pusat/Kantor Wilayah	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00
	a. Konvensional	2	2	2	2	2	2	2	2	0,00
	b. Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Kantor Cabang	40	39	39	40	40	40	40	40	0,00
	a. Konvensional	36	35	34	35	35	35	35	35	0,00
	b. Syariah	4	4	5	5	5	5	5	5	0,00
3	Kantor Cabang Pembantu	73	74	76	99	98	100	104	104	0,00
	a. Konvensional	72	72	72	95	94	96	100	100	0,00
	b. Syariah	1	2	4	4	4	4	4	4	0,00
4	Kantor Kas	124	127	128	127	127	137	143	153	6,99
	a. Konvensional	122	125	125	124	124	134	138	147	6,52
	b. Syariah	2	2	3	3	3	3	5	6	20,00
5	Kas Mobil	8	8	8	5	5	5	5	5	0,00
	a. Konvensional	8	8	8	5	5	5	5	5	0,00
	b. Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Payment Point	23	19	19	24	24	25	25	24	-4,00
	a. Konvensional	23	19	19	24	24	25	25	24	-4,00
	b. Syariah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Anjungan Tunai Mandiri	325	349	354	376	384	389	410	410	0,00
	a. Konvensional	324	348	353	375	383	388	409	409	0,00
	b. Syariah	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00
B	Bank Perkreditan Rakyat	65	65	65	65	65	65	65	65	0,00
1	Kantor Pusat	65	65	65	65	65	65	65	65	0,00
C	Total (A + B)	660	683	691	738	745	763	794	803	1,13

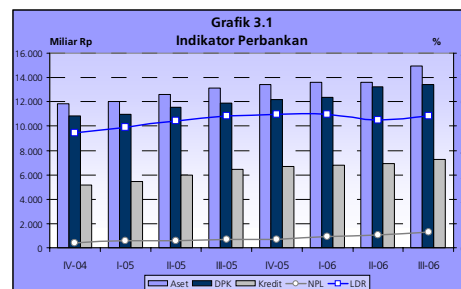
Keterangan:
1) %.

Penambahan 10 Kantor Kas tersebut terdiri dari 9 Kantor Kas Bank Umum Konvensional dan 1 Kantor Kas Bank Umum Syariah. Sedangkan jumlah BPR (diluar Kantor Kas BPR) tidak mengalami perubahan pada triwulan laporan.

Perkembangan Kinerja

Pada triwulan III-2006 kinerja Perbankan DIY masih menunjukkan pertumbuhan positif namun cenderung melambat, sebagaimana yang terlihat dari perkembangan beberapa indikator utama Perbankan DIY. Secara triwulanan

indikator Aset dan DPK Perbankan DIY meningkat masing-masing sebesar 3,36% dan 1,38%, namun angka pertumbuhan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,99% dan 6,87%. Angka pertumbuhan tersebut juga lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2005, dimana angka pertumbuhannya tercatat sebesar 4,16% dan 3,29%. Namun demikian, pertumbuhan Kredit Perbankan DIY tercatat sebesar 4,77%, lebih tinggi dari angka pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,32%, namun lebih rendah dari angka pertumbuhan triwulan III-2005 sebesar 7,59%.



Tabel 3.2
Aset Perbankan

Miliar Rp

No	Uraian	2004	2005				2006						
			I	II	III	IV	I	II	III				
				Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹							
A	Jenis Bank	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920	100,00	3,36		
1	Bank Umum	10.944	11.085	11.592	12.084	12.382	12.600	13.399	13.861	92,90	3,45		
2	BPR	907	936	986	1.018	1.015	1.019	1.036	1.059	7,10	2,18		
B	Jenis Usaha Bank	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920	100,00	3,36		
1	Konvensional	11.635	11.789	12.321	12.808	13.102	13.319	14.133	14.579	97,71	3,15		
2	Syariah	215	231	258	294	294	301	303	342	2,29	12,85		
C	Wilayah	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920	100,00	3,36		
1	Bantul	681	658	685	728	742	759	824	820	5,50	-0,44		
2	Gunungkidul	309	310	328	377	363	395	425	432	2,90	1,65		
3	Kulonprogo	408	434	436	464	453	497	532	547	3,67	2,86		
4	Sleman	2.175	2.216	2.263	2.434	2.431	2.474	2.483	2.586	17,33	4,14		
5	Yogyakarta	8.276	8.403	8.866	9.099	9.408	9.495	10.171	10.534	70,61	3,57		

Keterangan:
1) %.

Aset Perbankan DIY naik sebesar 485 miliar dari Rp14.435 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp14.920 miliar pada triwulan laporan. Berdasarkan jenis usaha bank, Aset Perbankan Syariah tercatat mengalami peningkatan yang cukup pesat yakni sebesar 12,85% menjadi 342 miliar. Berdasarkan wilayah kedudukan bank, hampir seluruh wilayah mengalami pertumbuhan Aset yang positif, kecuali Bantul dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,44%, turun dari Rp824 miliar menjadi Rp820 miliar.

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun Perbankan DIY pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp13.418 miliar, atau tumbuh tipis sebesar 1,38% dari triwulan II-2006 sebesar Rp13.235 miliar. Meskipun mengalami pertumbuhan secara triwulanan, namun apabila dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi Agustus 2006 sebesar Rp13.800, terjadi penurunan sebesar 2,77% (mtm). Hal ini diduga sebagai dampak pencairan dana program rekonstruksi tahap I yang masuk ke Perbankan DIY pada bulan Agustus 2006 yang sebagainya telah disalurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada bulan berikutnya (Lihat Boks "Implikasi Pencairan Dana Rekonstruksi Pasca Gempa terhadap Prospek Perekonomian DIY). Dugaan ini diperkuat dengan terjadinya penurunan pada Giro dari Rp2.450 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp2.426 miliar, atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Agustus 2006) tercatat pertumbuhan negatif sebesar -11,29% (mtm).

Selain itu berdasarkan wilayah, DPK Perbankan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,26% dari Rp742 miliar pada triwulan II-2006 dan 0,76% (qtq) dari Rp380 miliar. Sedangkan jika dilihat pertumbuhan bulannya, semua wilayah mengalami penurunan DPK, terutama di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul yang terjadi penurunan DPK masing-masing sebesar 10,46% dari Rp421 miliar menjadi Rp377 miliar dan sebesar 4,31% dari Rp757 miliar menjadi Rp725 miliar. Hal ini disebabkan kedua wilayah tersebut yang pembentukan Pokmasnya selesai terlebih dahulu jika dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga dana rekonstruksi lebih cepat disalurkan.

Tabel 3.3
Dana Pihak Ketiga Perbankan

Miliar Rp

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III	Ptumb ¹	
A	Jenis Bank	10.842	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418	100,00	1,38
1	Bank Umum	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	94,26	1,20
2	BPR	627	652	693	727	726	740	737	771	5,74	4,51
B	Jenis Usaha Bank	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418	100,00	1,38
1	Konvensional	10.650	10.778	11.308	11.650	11.943	12.144	12.982	13.143	97,95	1,24
2	Syariah	195	207	214	251	247	247	254	276	2,05	8,72
C	Jenis Simpanan	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418	100,00	1,38
1	Giro	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426	18,08	-1,00
2	Tabungan	5.588	5.472	5.457	5.529	5.606	5.324	5.650	5.876	43,79	4,01
3	Deposito	3.353	3.619	3.977	4.236	4.735	4.980	5.136	5.116	38,13	-0,38
D	Jenis Valuta	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418	100,00	1,38
1	Rupiah	10.269	10.351	10.870	11.164	11.515	11.715	12.530	12.690	94,57	1,27
2	Valuta Asing	577	634	652	738	674	675	705	729	5,43	3,33
E	Wilayah	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418	100,00	1,38
1	Bantul	535	552	563	609	601	662	742	725	5,40	-2,26
2	Gunungkidul	258	252	269	296	286	345	380	377	2,81	-0,76
3	Kulonprogo	345	369	373	404	388	444	484	486	3,62	0,43
4	Sleman	1.985	2.014	2.037	2.227	2.222	2.282	2.293	2.350	17,51	2,47
5	Yogyakarta	7.723	7.798	8.280	8.365	8.692	8.658	9.336	9.480	70,65	1,54

Keterangan:
1) %.

Penyaluran dana Perbankan DIY dalam bentuk Kredit pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp7.276 miliar atau naik 4,77% dari Rp6.945 miliar. Berdasarkan jenis usaha bank, laju pertumbuhan penyaluran dana terpesat terjadi pada perbankan syariah yakni mencapai 19,12% dari Rp341 miliar menjadi Rp407 miliar. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kredit Investasi sebesar 7,01% (Rp70 miliar) dari Rp996 miliar menjadi Rp1.066 miliar. Peningkatan ini diperkirakan disebabkan oleh dimulainya upaya rehabilitasi tempat usaha maupun alat-alat produksi yang sempat mengalami kerusakan akibat gempa tektonik 27 Mei 2006. Proses rehabilitasi ini juga didukung oleh adanya Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang dikelola Bank Tabungan Negara dengan jumlah sebesar Rp239 miliar (lihat Boks "Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk Korban Gempa DIY dan Jawa Tengah"). Berdasarkan wilayah, pertumbuhan kredit masing-masing wilayah berada di atas kisaran 5%, kecuali Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan pertumbuhan sebesar masing-masing sebesar 4,61% dan 2,73%.

Jumlah kredit bermasalah (Kredit Non Lancar) pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp463 miliar atau meningkat pesat hingga 24,33% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp373 miliar. Sedangkan rasio *Non Performing Loans* (NPLs) yang merupakan perbandingan antara Kredit Non Lancar dengan Total Kredit, mengalami peningkatan dari 5,37% menjadi 6,37%.

Tabel 3.4
Kredit Perbankan

Miliar Rp

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
				Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹					
I	Kredit	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
A	Jenis Bank	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
1	Bank Umum	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	88,09	5,11
2	BPR	692	750	800	838	832	836	847	867	11,91	2,34
B	Jenis Usaha Bank	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
1	Konvensional	4.943	5.253	5.767	6.186	6.380	6.461	6.603	6.870	94,41	4,03
2	Syariah	187	201	237	273	304	327	341	407	5,59	19,12
C	Jenis Penggunaan	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
1	Modal Kerja	2.184	2.287	2.437	2.574	2.667	2.720	2.746	2.900	39,86	5,64
2	Investasi	644	697	795	865	872	875	996	1.066	14,65	7,01
3	Konsumsi	2.301	2.470	2.772	3.021	3.145	3.192	3.203	3.310	45,49	3,34
D	Jenis Valuta	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
1	Rupiah	4.903	5.197	5.740	6.179	6.394	6.541	6.726	7.046	96,83	4,75
2	Valuta Asing	227	257	264	281	290	247	218	230	3,17	5,52
E	Wilayah	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276	100,00	4,77
1	Bantul	482	502	530	548	571	590	593	609	8,37	2,73
2	Gunungkidul	258	266	292	306	314	332	347	365	5,02	5,12
3	Kulonprogo	283	309	337	355	361	362	378	401	5,52	6,24
4	Sleman	1.063	1.155	1.249	1.322	1.333	1.357	1.398	1.477	20,30	5,65
5	Yogyakarta	3.044	3.221	3.597	3.928	4.105	4.147	4.229	4.424	60,80	4,61
II	Non Performing Loans										
A	Jenis Bank	105	160	180	229	227	325	373	463	100,00	24,33
1	Bank Umum	62	105	114	163	155	245	261	354	76,43	35,90
2	BPR	42	55	66	67	72	81	112	109	23,57	-2,57
B	Jenis Usaha Bank	105	160	180	229	227	325	373	463	100,00	24,33
1	Konvensional	102	155	175	225	218	315	360	451	97,44	25,40
2	Syariah	2	5	4	5	9	11	13	12	2,56	-6,19
C	Wilayah	105	160	180	229	227	325	373	463	100,00	24,33
1	Bantul	24	31	28	31	32	41	56	74	15,93	31,80
2	Gunungkidul	3	4	5	5	5	7	13	16	3,49	28,10
3	Kulonprogo	5	7	8	12	13	15	18	15	3,28	-15,40
4	Sleman	22	36	52	52	55	58	83	81	17,59	-1,40
5	Yogyakarta	50	82	86	130	123	205	203	277	59,71	36,00
III	Rasio NPLs (%)										
A	Jenis Bank	2,04	2,93	2,99	3,55	3,40	4,80	5,37	6,37		
1	Bank Umum	1,40	2,24	2,19	2,90	2,65	4,11	4,27	5,52		
2	BPR	6,11	7,31	8,19	7,96	8,70	9,66	13,23	12,60		
B	Jenis Usaha Bank	2,04	2,93	2,99	3,55	3,40	4,80	5,37	6,37		
1	Konvensional	2,07	2,95	3,04	3,64	3,42	4,87	5,45	6,57		
2	Syariah	1,15	2,54	1,83	1,66	3,08	3,26	3,70	2,92		
C	Wilayah	2,04	2,93	2,99	3,55	3,40	4,80	5,37	6,37		
1	Bantul	4,88	6,18	5,36	5,57	5,68	6,95	9,45	12,12		
2	Gunungkidul	1,22	1,52	1,56	1,55	1,51	2,14	3,63	4,43		
3	Kulonprogo	1,83	2,17	2,40	3,27	3,59	4,13	4,76	3,79		
4	Sleman	2,11	3,10	4,19	3,96	4,09	4,24	5,91	5,52		
5	Yogyakarta	1,65	2,56	2,40	3,32	2,99	4,94	4,81	6,25		

Keterangan:
1) %.

Peningkatan jumlah Kredit Non Lancar ini terutama didorong oleh perkembangan kredit bermasalah pada Bank Umum yang naik sebesar 35,90%, dari Rp261 miliar menjadi Rp354 miliar. Sedangkan kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) justru mengalami penurunan sebesar 2,57%, dari Rp112 miliar menjadi Rp109 miliar. Dengan demikian, rasio NPLs Bank Umum tercatat sebesar 5,52%, atau naik 1,25% dari 4,27% pada triwulan sebelumnya, sedangkan rasio NPLs BPR tercatat 12,60%, atau turun 0,63% dari 13,23%.

Jika ditilik dari jenis usaha bank, kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah mengalami perbaikan ditunjukkan dengan penurunan jumlah kredit bermasalah sebesar 6,19% dari Rp13 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp12 miliar pada triwulan III-2006. Sehingga rasio *Non Performing Financing* (NPF) turun 0,78% dari 3,70% menjadi 2,92%. Di lain pihak, kualitas Kredit Perbankan Konvensional semakin memburuk, sebagaimana ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit bermasalah sebesar 25,40% dari Rp360 miliar menjadi Rp451 miliar. Untuk Perbankan Konvensional, rasio NPL naik sebesar 1,12% dari 5,45% menjadi 6,57%.

Berdasarkan wilayah bank, perbaikan kualitas kredit secara signifikan terlihat di Kabupaten Kulonprogo dengan penurunan jumlah kredit non lancar sebesar 15,40% dari Rp18 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp15 miliar pada triwulan laporan, sehingga rasio NPLs turun sebesar 0,97% dari 4,76% menjadi 3,79%. Selain itu, jumlah kredit bermasalah Perbankan di Kabupaten Sleman juga mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,40% dari Rp83 miliar menjadi Rp81 miliar. Sedangkan di wilayah lainnya peningkatan kredit bermasalah berkisar di angka 30%, dimana peningkatan tertinggi dialami oleh Perbankan di Kota Yogyakarta sebesar 36,00% dari Rp203 miliar menjadi Rp277 miliar.

Namun demikian yang perlu memperoleh perhatian adalah perbaikan kualitas kredit Perbankan di Kabupaten Bantul, dimana rasio NPLs menembus angka dua digit yakni sebesar 12,12%. Sementara itu, rasio NPLs Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman masing-masing sebesar 6,25% dan 5,52%. Rasio NPLs ini berada di atas ketentuan yang berlaku yakni sebesar 5%. Jika dilihat dari data empiris, penurunan kualitas kredit Perbankan terjadi sejak triwulan III-2005 dimana pada periode tersebut terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, yang kemudian diperparah dengan terjadinya gempa tektonik 27 Mei 2006 sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya Perbankan diharapkan mampu mengambil langkah korektif dalam rangka penyelamatan kreditnya dengan melakukan restrukturisasi kredit. Langkah tersebut juga sekaligus dibarengi dengan langkah antisipatif yaitu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melakukan ekspansi kredit.

Pada triwulan III-2006 ini, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari 52,47% pada triwulan II-2006 menjadi 54,23%. Peningkatan ini menunjukkan mulai membaiknya fungsi intermediasi Perbankan setelah sejak triwulan IV-2005 mengalami penurunan setiap periodenya. Berdasarkan jenis bank, peningkatan LDR ini hanya dialami oleh Bank Umum yaitu sebesar 1,89% dari 48,79% menjadi 50,68%. Sebaliknya, LDR BPR mengalami penurunan dari 114,87% pada periode sebelumnya menjadi 112,49% pada triwulan III-2006.

Tabel 3.5
Loan to Deposit Ratio Perbankan

No	Uraian	2004	2005				2006			%
			I	II	III	IV	I	II	III	
A	Jenis Bank	47,30	49,65	52,11	54,28	54,83	54,78	52,47	54,23	
1	Bank Umum	43,45	45,53	48,05	50,31	51,04	51,08	48,79	50,68	
2	BPR	109,88	114,94	115,51	115,24	114,69	113,06	114,87	112,49	
B	Jenis Usaha Bank	47,30	49,65	52,11	54,28	54,83	54,78	52,47	54,23	
1	Konvensional	46,41	48,74	51,00	53,10	53,42	53,20	50,87	52,27	
2	Syariah	95,89	96,88	110,83	108,65	123,47	132,43	134,62	147,51	
C	Wilayah	47,30	49,65	52,11	54,28	54,83	54,78	52,47	54,23	
1	Bantul	90,15	90,89	94,19	90,11	94,97	89,20	79,95	84,03	
2	Gunungkidul	99,92	105,90	108,44	103,36	109,73	95,99	91,31	96,72	
3	Kulonprogo	82,12	83,73	90,14	87,80	92,92	81,54	78,05	82,57	
4	Sleman	53,55	57,35	61,31	59,35	59,99	59,46	60,97	62,86	
5	Yogyakarta	39,41	41,31	43,44	46,96	47,23	47,90	45,29	46,66	

PERKEMBANGAN BANK UMUM

Kelembagaan

Sampai dengan akhir triwulan III-2006, jumlah kantor layanan Bank Umum tercatat sebanyak 830 unit (termasuk BRI Unit Desa) dengan distribusi yang terkonsentrasi di wilayah Kota Yogyakarta dengan pangsa sebesar 73,13% atau sebanyak 607 unit dari total keseluruhan jaringan kantor Bank Umum yang tercatat sebanyak 830 unit. Peringkat kedua juga masih berada pada Kabupaten Sleman dengan pangsa sebesar 13,13%, diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul dengan pangsa masing-masing sebesar 5,90%, 4,58% dan 3,25%.

Tabel 3.6
Jumlah Kantor Pelayanan Bank Umum

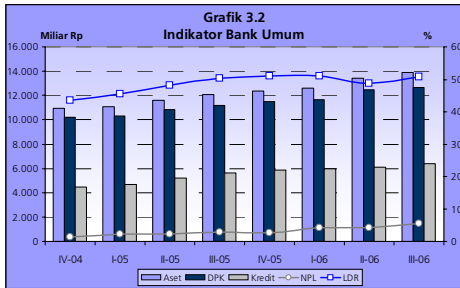
Kabupaten/Kota	KP	Kanwil	KC	KCP	KK	BUD	KM	ATM	PP	Jumlah
Yogyakarta	1	1	29	82	116	0	5	353	20	607
Sleman	0	0	5	15	15	23	0	49	2	109
Bantul	0	0	2	2	9	11	0	3	0	27
Kulonprogo	0	0	2	2	6	35	0	3	1	49
Gunungkidul	0	0	2	3	7	23	0	2	1	38
Jumlah	1	1	40	104	153	92	5	410	24	830

Keterangan :

KP = Kantor Pusat KCP = KC Pembantu ATM = Anjungan Tunai Mandiri
 Kanwil = Kantor Wilayah KK = Kantor Kas PP = Payment Point
 KC = Kantor Cabang BUD = BRI Unit Desa KM = Kas Mobil

Aset dan Aktiva Produktif

Aset Bank Umum sampai dengan akhir triwulan laporan tercatat sebesar Rp13.861 miliar, atau tumbuh sebesar 3,45% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp13.399 miliar. Aset Bank Umum Konvensional sebesar Rp13.537 miliar tumbuh sebesar 3,23% dari triwulan II-2006 sebesar Rp13.113 miliar. Sedangkan Aset Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 13,40% dari Rp286 miliar menjadi Rp324 miliar.



Tabel 3.7
Indikator Bank Umum

No	Uraian	2004	2005				2006			Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹
			I	II	III	IV	I	II	III			
A	Aset	10.944	11.085	11.592	12.084	12.382	12.600	13.399	13.861	100,00	3,45	
B	Pendanaan	10.293	10.406	10.895	11.261	11.546	11.756	12.618	12.758	100,00	1,11	
1	Dana Pihak Ketiga	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	99,13	1,20	
2	Kewajiban kepada bank lain	51	40	26	33	31	46	68	54	0,42	-20,57	
3	Pinjaman yang Diterima & Setoran Jaminan	21	25	32	48	42	53	48	52	0,41	8,05	
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	6	8	7	5	8	6	4	5	0,04	14,85	
C	Aktiva Produktif	5.102	5.462	5.916	6.269	6.500	6.795	7.210	7.516	100,00	4,23	
1	Kredit yang Diberikan	4.438	4.704	5.202	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	85,28	5,11	
2	Penempatan pada Bank Indonesia (SBI)	482	523	528	450	446	671	724	901	11,99	24,49	
3	Surat Berharga dan Tagihan Lainnya	26	33	29	27	34	29	37	23	0,31	-37,60	
4	Penempatan pada bank lain	158	201	155	170	168	145	352	182	2,42	-48,24	
5	Bank Garansi	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
D	Alat Likuid	311	353	379	392	389	402	398	405	100,00	1,69	
1	Kas	309	351	377	389	386	399	395	402	99,21	1,56	
2	Giro pada bank lain	2	2	2	3	3	3	3	3	0,79	20,05	
3	Tabungan pada bank lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
E	Laba / Rugi	163	63	120	193	159	67	104	159	100,00	1,69	
F	Aktiva Produktif/Total Aset (%) = (C)/(A)	46,63	49,27	51,03	51,87	52,50	53,93	53,81	54,22			
G	Rasio Likuiditas (%) = (D)/(B)	3,02	3,39	3,48	3,48	3,37	3,42	3,16	3,17			
H	Rasio Rentabilitas (%) = (E)/(A)	1,49	0,57	1,04	1,60	1,28	0,53	0,78	1,14			
I	LDR (%)											
1	Jenis Usaha Bank	43,45	45,53	48,05	50,31	51,04	51,08	48,79	50,68			
a.	Konvensional	42,47	44,53	46,84	49,02	49,51	49,38	47,07	48,59			
b.	Syariah	96,33	97,14	111,82	109,54	125,12	134,06	136,29	148,98			
2	Wilayah	43,45	45,53	48,05	50,31	51,04	51,08	48,79	50,68			
a.	Bantul	81,54	82,43	86,83	81,86	90,45	83,03	72,03	76,94			
b.	Gunungkidul	96,33	102,64	105,05	99,44	105,58	90,57	86,04	91,90			
c.	Kulonprogo	71,81	72,09	77,46	77,80	83,28	74,12	70,28	74,73			
d.	Sleman	41,69	44,56	48,95	46,99	47,87	47,81	49,44	52,65			
e.	Yogyakarta	39,10	40,98	43,06	46,57	46,82	47,47	44,83	46,11			

Keterangan:
1) %.

Jika dirinci berdasarkan wilayah, Aset Bank Umum di masing-masing wilayah mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan Aset terbesar di Kabupaten Sleman yakni sebesar 5,55%. Aset dengan pertumbuhan negatif hanya dialami oleh Bank Umum di Kabupaten Bantul yakni sebesar -1,18%.

Penyaluran dana Bank Umum yang lebih dikenal dengan istilah Aktiva Produktif pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp7.516 miliar, naik 4,23% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp7.210 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan Kredit yang Diberikan sebesar naik 5,11% dari Rp6.098 miliar menjadi Rp6.409 miliar. Selain itu juga didorong oleh Penempatan pada Bank Indonesia yang tercatat sebesar Rp177 miliar, atau tumbuh 24,49% dari Rp724 miliar menjadi Rp901 miliar. Komponen Aktiva Produktif lainnya berupa Penempatan pada Bank Lain serta Surat Berharga dan Tagihan Lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar -48,24% dari Rp352 miliar menjadi Rp182 miliar dan sebesar -37,60% dari Rp37 miliar menjadi Rp23 miliar.

Penempatan pada Bank Indonesia sebagian besar yaitu sebesar 61,82% atau Rp557 miliar merupakan Sertifikat Bank Indonesia. Jumlah ini meningkat pesat sebesar 43,84% dari triwulan sebelumnya yang hanya tercatat sebesar Rp387 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya pengalihan proporsi Aktiva Produktif dikarenakan Bank Umum lebih memilih penempatan yang memiliki *zero risk* daripada penempatan lainnya yang memiliki risiko lebih tinggi.

Penghimpunan Dana

Dana masyarakat DIY yang berhasil dihimpun oleh Bank Umum pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp12.648 miliar atau tumbuh tipis 1,20% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp12.498 miliar. Angka pertumbuhan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,27% (qtq). Hal ini disebabkan pada triwulan sebelumnya banyak bantuan pemerintah, lembaga donor maupun sumbangan masyarakat yang disalurkan melalui Bank Umum DIY. Selain itu jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya, DPK Bank Umum mengalami penurunan sebesar 2,98% dari posisi Agustus 2006 yang tercatat sebesar Rp13.036 miliar. Penurunan ini diduga disebabkan oleh adanya pencairan dana program rekonstruksi yang mulai dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat melalui Pokmas.

Tabel 3.8
Dana Pihak Ketiga Bank Umum

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
									Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹
A	Jenis Usaha	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	100,00	1,20
1	Konvensional	10.031	10.137	10.628	10.937	11.231	11.417	12.257	12.385	97,92	1,04
2	Syariah	185	195	201	238	233	234	241	263	2,08	9,00
B	Jenis Simpanan	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	100,00	1,20
1	Giro	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426	19,18	-1,00
2	Tabungan	5.397	5.282	5.255	5.312	5.395	5.117	5.418	5.662	44,76	4,49
3	Deposito	2.914	3.156	3.485	3.727	4.221	4.448	4.630	4.560	36,06	-1,50
C	Valuta Asing	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	100,00	1,20
1	Rupiah	9.639	9.699	10.177	10.436	10.790	10.976	11.793	11.919	94,24	1,07
2	Valuta Asing	577	634	652	738	674	675	705	729	5,76	3,33
D	Wilayah	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648	100,00	1,20
1	Bantul	397	410	415	453	440	494	576	560	4,43	-2,76
2	Gunungkidul	244	236	252	279	269	325	361	357	2,82	-1,08
3	Kulonprogo	289	312	313	329	316	368	409	409	3,23	0,07
4	Sleman	1.592	1.608	1.604	1.784	1.787	1.849	1.866	1.905	15,06	2,06
5	Yogyakarta	7.694	7.767	8.245	8.329	8.652	8.613	9.287	9.417	74,46	1,41

Keterangan:
1) %.

Jika dilihat berdasarkan jenis usahanya, DPK Bank Umum Syariah naik sebesar 9,00% dari Rp241 miliar menjadi Rp263 miliar, sedangkan DPK Bank Umum Konvensional hanya mengalami pertumbuhan 1,04% dari Rp12.257 miliar menjadi Rp12.385 miliar. Hal ini menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai Bank Syariah mulai meningkat sehingga kepercayaan untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah juga meningkat.

Pada triwulan laporan, simpanan berupa Giro dan Deposito Bank Umum tumbuh negatif masing-masing sebesar -1,00% dari Rp2.450 miliar menjadi Rp2.426 miliar dan sebesar -1,50% dari Rp4.630 miliar menjadi Rp4.560 miliar. Sedangkan berdasarkan wilayah kantor pelapor Bank Umum, DPK Bank Umum yang mengalami penurunan terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masing-masing sebesar -2,76% menjadi Rp560 miliar pada triwulan III-2006 dan -1,08% menjadi Rp357 miliar. Jika dikaitkan dengan pencairan dana program rekonstruksi, wilayah-wilayah tersebut memang merupakan wilayah yang pembentukan Pokmasnya selesai terlebih dahulu sehingga pencairan dana dilakukan lebih dulu daripada wilayah lainnya.

Penyaluran dan Kualitas Kredit

Penyaluran Kredit Bank Umum kepada masyarakat pada triwulan laporan mencapai Rp6.409 miliar, naik 5,11% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp6.098 miliar. Berdasarkan jenis usaha bank, Bank Umum Syariah terlihat lebih ekspansif dalam memberikan Pembiayaan dimana pertumbuhannya mencapai 19,16% dari Rp329 miliar menjadi Rp392 miliar. Sedangkan Kredit Bank Umum Konvensional tumbuh sebesar 4,31% dari Rp5.769 miliar menjadi Rp6.017 miliar.

Berdasarkan sektor ekonominya, hampir separuh dari Kredit Bank Umum masih disalurkan kepada sektor Lain-lain yakni sebesar Rp2.948 miliar yang hampir seluruhnya merupakan Kredit Konsumsi. Namun demikian, angka pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Jasa-jasa Sosial Masyarakat sebesar 26,90% menjadi Rp182 miliar dan sektor Konstruksi sebesar 18,57% menjadi Rp233 miliar. Pertumbuhan tinggi yang dialami sektor Jasa-jasa Sosial Masyarakat didorong oleh peningkatan pada subsektor Kesehatan yang tumbuh 55,55% atau naik Rp33 miliar dari posisi triwulan sebelumnya sebesar Rp60 miliar menjadi Rp93 miliar. Peningkatan pada subsektor kesehatan ini diduga terkait dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas kesehatan pasca gempa tektonik 27 Mei 2006. Sedangkan pertumbuhan Kredit kepada sektor Konstruksi didorong oleh peningkatan penyaluran Kredit untuk pembangunan perumahan sederhana, yaitu proyek-proyek pembangunan rumah untuk rakyat, yang tumbuh 230% dari Rp12 miliar menjadi Rp39 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada periode yang akan datang terkait dengan dikurirkannya dana KLBI melalui BTN sebesar Rp239 miliar (lihat Boks "Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk Korban Gempa DIY dan Jawa Tengah").

Berdasarkan klasifikasi skala usaha debitur, sebesar 36,90% Kredit Bank Umum tersebut atau sebesar Rp2.365 miliar dialokasikan untuk usaha dengan

skala Mikro. Namun pertumbuhan tertinggi penyaluran Kredit terjadi pada usaha dengan skala usaha besar yaitu 12,80% dari Rp722 miliar menjadi Rp815 miliar.

Tabel 3.9
Kredit Bank Umum

Miliar Rp

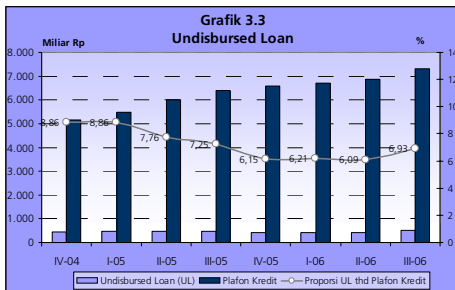
No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
				Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹					
A	Jenis Usaha Bank	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Konvensional	4.260	4.514	4.978	5.362	5.560	5.637	5.769	6.017	93,89	4,31
2	Syariah	178	190	225	260	291	314	329	392	6,11	19,16
B	Jenis Penggunaan	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Modal Kerja	1.810	1.893	2.019	2.148	2.252	2.320	2.350	2.505	39,09	6,60
2	Investasi	627	680	775	840	848	843	957	1.022	15,94	6,80
3	Konsumsi	2.001	2.131	2.409	2.634	2.752	2.789	2.791	2.882	44,97	3,27
C	Jenis Valuta	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Rupiah	4.211	4.447	4.940	5.341	5.561	5.705	5.879	6.179	96,41	5,10
2	Valuta Asing	227	257	264	281	290	247	218	230	3,59	5,52
D	Sektor Ekonomi	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Pertanian	173	156	164	167	176	194	199	202	3,16	1,49
2	Pertambangan	8	11	22	22	22	21	20	21	0,32	2,16
3	Perindustrian	494	538	557	582	573	570	543	588	9,17	8,32
4	Listrik, Gas dan Air	1	1	1	1	1	2	2	2	0,03	6,50
5	Konstruksi	151	166	170	183	183	185	197	233	3,64	18,57
6	Perdagangan, Restoran & Hotel	1.098	1.122	1.223	1.301	1.389	1.428	1.511	1.592	24,83	5,31
7	Pengangkutan, Perjudangan	87	93	91	89	86	82	84	79	1,24	-5,06
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	270	323	385	453	476	476	544	562	8,77	3,41
9	Jasa-jasa Sosial Masyarakat	117	121	131	140	139	141	144	182	2,84	26,90
10	Lain-lain	2.041	2.174	2.458	2.684	2.807	2.852	2.855	2.948	46,00	3,26
E	Skala Usaha	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Mikro	1.790	1.813	1.943	2.056	2.129	2.192	2.259	2.365	36,90	4,69
2	Kecil	1.106	1.238	1.442	1.623	1.729	1.743	1.798	1.852	28,89	2,96
3	Menengah	904	954	1.066	1.140	1.201	1.245	1.318	1.378	21,50	4,55
4	Besar	638	699	752	803	793	772	722	815	12,71	12,80
F	Wilayah	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409	100,00	5,11
1	Bantul	324	338	360	371	398	411	415	431	6,72	3,87
2	Gunungkidul	235	242	265	278	285	295	310	328	5,11	5,66
3	Kulonprogo	207	225	243	256	263	273	287	306	4,77	6,42
4	Sleman	664	716	785	838	856	884	923	1.003	15,65	8,68
5	Yogyakarta	3.009	3.183	3.551	3.879	4.051	4.089	4.163	4.342	67,75	4,31
G	Non Performing Loans										
1	Jenis Usaha Bank	62	105	114	163	155	245	261	354	100,00	35,90
a.	Konvensional	61	101	111	160	147	237	251	345	97,36	37,45
b.	Syariah	1	4	3	3	8	8	10	9	2,64	-3,99
2	Wilayah	62	105	114	163	155	245	261	354	100,00	35,90
a.	Bantul	5	7	6	7	6	9	18	34	9,67	93,89
b.	Gunungkidul	2	3	4	4	4	5	10	13	3,72	36,29
c.	Kulonprogo	2	3	3	8	8	8	8	8	2,21	-5,97
d.	Sleman	8	16	18	17	17	22	30	32	8,98	6,79
e.	Yogyakarta	45	77	84	128	120	201	195	267	75,43	36,87
H	Non Performing Loans (%)										
1	Jenis Usaha Bank	1,40	2,24	2,19	2,90	2,65	4,11	4,27	5,52		
a.	Konvensional	1,43	2,25	2,23	2,98	2,64	4,20	4,35	5,73		
b.	Syariah	0,82	2,01	1,39	1,18	2,85	2,61	2,96	2,38		
2	Wilayah	1,40	2,24	2,19	2,90	2,65	4,11	4,27	5,52		
a.	Bantul	1,47	1,97	1,59	1,76	1,50	2,26	4,26	7,95		
b.	Gunungkidul	1,06	1,37	1,42	1,39	1,33	1,61	3,11	4,01		
c.	Kulonprogo	1,19	1,21	1,21	3,02	3,08	2,94	2,90	2,57		
d.	Sleman	1,15	2,19	2,29	2,04	2,47	3,22	3,17			
e.	Yogyakarta	1,49	2,42	2,36	3,29	2,95	4,91	4,69	6,15		

Keterangan:
1) %.

Kualitas Kredit Bank Umum di DIY pada triwulan laporan semakin memburuk, ditandai dengan peningkatan jumlah Kredit Non Lancar sebesar 35,90% dari Rp261 miliar menjadi Rp354 miliar. Berdasarkan jenis usahanya, penurunan jumlah Kredit bermasalah Bank Umum didorong oleh peningkatan jumlah Kredit Bank Umum Konvensional sebesar 37,45% dari Rp251 miliar menjadi Rp345 miliar pada triwulan III-2006. Di lain pihak jumlah Pembiayaan Non Lancar Bank Umum Syariah justru mengalami penurunan sebesar -3,99% dari Rp10 miliar menjadi Rp9 miliar. Dengan demikian, rasio NPLs Bank Umum Konvensional mengalami peningkatan dari 4,35% menjadi 5,73%, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah turun dari 2,96% menjadi 2,38%.

Jika ditinjau berdasarkan aspek kewilayahan, rasio NPLs Bank Umum di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan tertinggi yaitu sebesar 3,69% dari 4,26% menjadi 7,95%. Rasio NPLs juga dialami oleh Bank Umum di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul masing-masing naik sebesar 1,46% dan 0,90% sehingga masing-masing menjadi 6,15% dan 4,01%.

Undisbursed Loans



Pada triwulan III-2006, fasilitas pinjaman kepada nasabah yang belum ditarik (*Undisbursed Loans/UL*) tercatat sebesar Rp506 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,08% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp418 miliar. Di sisi lain, penawaran Kredit yang ditunjukkan dari total plafon Kredit mengalami peningkatan sebesar 6,36% dari Rp6.860 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp7.297 miliar pada triwulan laporan. Pertumbuhan plafon Kredit triwulan laporan lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,17%.

Pertumbuhan UL yang lebih besar daripada pertumbuhan plafon kredit menyebabkan rasio perbandingan antara UL dengan total plafon Kredit Bank Umum mengalami peningkatan pada triwulan laporan sebesar 0,84% dari 6,09% pada triwulan sebelumnya menjadi 6,93% pada triwulan III-2006. Hal ini menunjukkan permintaan nasabah dan penawaran kredit oleh bank umum di DIY semakin jauh dari titik keseimbangan.

Fungsi Intermediasi, Likuiditas dan Profitabilitas

Pertumbuhan penyaluran Kredit Bank Umum yang lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan penghimpunan DPKnya menyebabkan peningkatan angka *Loan to Deposit Ratio* Bank Umum sebesar 1,89% dari 48,79% menjadi 50,68%.

Jika ditinjau dari jenis usaha bank, peningkatan fungsi intermediasi secara signifikan dialami oleh Bank Umum Syariah, dimana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik dari 134,46% menjadi 148,98%, sementara angka LDR Bank Umum Konvensional mengalami peningkatan dari 47,07% menjadi 48,59%. Berdasarkan wilayah, Bank Umum di semua wilayah di DIY mengalami peningkatan angka LDR, dimana LDR tertinggi terdapat pada Bank Umum di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 91,90%, sedangkan terendah terdapat pada Bank Umum di wilayah Kota Yogyakarta sebesar 46,11%.

Sumber pendanaan Bank Umum pada triwulan III-2006 tumbuh tipis 1,11% dari Rp12.618 miliar menjadi Rp12.758 miliar. Seluruh komponen pendanaan mengalami pertumbuhan positif, kecuali pos Kewajiban kepada Bank Lain turun sebesar 20,57% dari Rp68 miliar menjadi Rp54 miliar.

Beberapa rasio keuangan Bank Umum pada triwulan laporan mengalami peningkatan yang mencerminkan membaiknya kondisi keuangan Bank Umum pada triwulan III-2006. Rasio antara aktiva produktif terhadap total aset pada triwulan laporan naik 0,41% dari 53,81% pada triwulan sebelumnya menjadi 54,22%. Perbandingan antara alat likuid dengan pendanaan yang menunjukkan posisi likuiditas bank dalam memenuhi kebutuhan alat tunainya juga mengalami peningkatan dari 3,16% menjadi 3,17%. Sedangkan *Return on Asset* (ROA) yaitu perbandingan antara laba dan aset bank juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 0,78% menjadi 1,14%.

Tabel 3.10
Kredit UMKM Bank Umum

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
									Posisi	Pangsa ¹⁾	Ptumb ¹⁾
A	Skala Usaha	3.800	4.005	4.451	4.819	5.059	5.180	5.375	5.595	100,00	4,08
1	Mikro	1.790	1.813	1.943	2.056	2.129	2.192	2.259	2.365	42,27	4,69
2	Kecil	1.106	1.238	1.442	1.623	1.729	1.743	1.798	1.852	33,10	2,96
3	Menengah	904	954	1.066	1.140	1.201	1.245	1.318	1.378	24,64	4,55
B	Jenis Penggunaan	3.800	4.005	4.451	4.819	5.059	5.180	5.375	5.595	100,00	4,08
1	Modal Kerja	1.344	1.415	1.537	1.645	1.790	1.869	1.948	2.055	36,73	5,50
2	Investasi	467	474	519	545	536	527	643	664	11,87	3,23
3	Konsumsi	1.989	2.116	2.395	2.629	2.732	2.783	2.784	2.876	51,40	3,28
C	Sektor Ekonomi	3.800	4.005	4.451	4.819	5.059	5.180	5.375	5.595	100,00	4,08
1	Pertanian	168	151	160	163	172	165	175	174	3,11	-0,40
2	Pertambangan	8	11	22	22	22	21	20	21	0,37	2,16
3	Perindustrian	264	267	261	269	280	294	308	310	5,55	0,72
4	Listrik, Gas dan Air	1	1	1	1	1	2	2	2	0,03	6,50
5	Konstruksi	54	62	66	68	66	69	65	102	1,82	56,17
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	908	966	1.068	1.141	1.245	1.309	1.404	1.475	26,36	5,03
7	Pengangkutan, Perhubungan	81	79	77	77	73	71	72	68	1,22	-5,84
8	Jasa-jasa Dunia Usaha	207	229	262	298	314	303	377	387	6,91	2,58
9	Jasa-jasa Sosial Masyarakat	80	80	90	100	98	101	103	115	2,05	10,72
10	Lain-lain	2.029	2.159	2.444	2.680	2.787	2.846	2.848	2.942	52,58	3,27
D	Total Kredit	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409		5,11
E	Persentase thd Total Kredit	85,62	85,14	85,55	85,72	86,45	87,03	88,15	87,29		

Keterangan:
1) %.
Mi = Kredit Usaha Mikro (0-50 juta)
K = Kredit Usaha Kecil (50-500 juta)
M = Kredit Usaha Menengah (500 juta - 5 miliar)

Kredit UMKM

Penyaluran Kredit Bank Umum kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sampai dengan akhir triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp5.595 miliar dengan pertumbuhan sebesar 4,08% (qtq). Namun demikian pangsa Kredit kepada sektor UMKM justru mengalami penurunan sebesar 0,86% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 88,15% menjadi 87,29%.

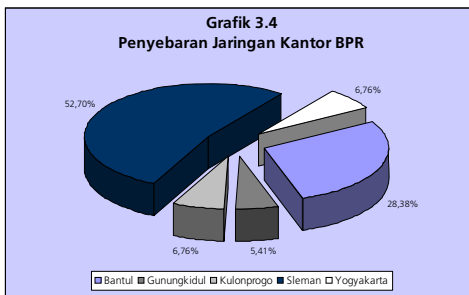
Kredit UMKM sebanyak 51,40% atau Rp2.876 miliar digunakan untuk tujuan Konsumsi, selebihnya sebesar 36,73% atau Rp2.055 miliar untuk Kredit Modal Kerja dan sebesar 11,87% atau Rp664 miliar untuk Kredit Investasi.

Ditinjau dari sektor ekonomi, sektor UMKM yang paling banyak dibiayai adalah sektor Lain-lain sebesar Rp2.942 miliar atau 52,58% dari total Kredit kepada sektor UMKM. Seluruh sektor UMKM mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor Pengangkutan Pergudangan dan Komunikasi serta sektor Pertanian dengan angka pertumbuhan masing-masing sebesar -5,84% dari Rp72 miliar menjadi Rp68 miliar dan sebesar -0,40% dari Rp175 miliar menjadi Rp174 miliar. Sedangkan pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Konstruksi yaitu sebesar 56,17% dari Rp65 miliar menjadi Rp102 miliar.

PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Kelembagaan

Jumlah jaringan kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sampai dengan akhir triwulan III-2006 tercatat sebanyak 148 unit. Penyebaran jaringan kantor BPR masih sama dengan triwulan II-2006, dimana kantor BPR hingga saat ini masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dengan jumlah kantor sebanyak 78 unit atau 52,70% dari total jaringan kantor BPR, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul sebesar 28,38%. Sementara itu, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 6,76%, untuk Kabupaten Gunungkidul tercatat 5,41%.

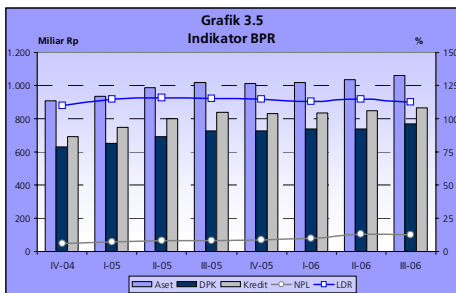


Tabel 3.11
Aset Bank Perkreditan Rakyat

Miliar Rp

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
				Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹					
A	Jenis Usaha Bank	907	936	986	1.018	1.015	1.019	1.036	1.059	100,00	2,18
1	Konvensional	893	921	971	1.001	998	1.002	1.020	1.042	98,37	2,16
2	Syariah	14	15	16	17	17	17	17	17	1,63	3,42
B	Wilayah	907	936	986	1.018	1.015	1.019	1.036	1.059	100,00	2,18
1	Bantul	212	215	215	220	223	231	226	230	21,70	1,53
2	Gunungkidul	26	28	30	32	33	42	43	44	4,19	2,58
3	Kulonprogo	94	101	106	113	110	106	105	108	10,23	2,91
4	Sleman	533	549	584	598	585	573	582	579	54,70	-0,46
5	Yogyakarta	41	43	51	56	64	68	80	97	9,18	22,08

Keterangan:
1) %.



Aset

Pada triwulan III-2006, Aset BPR DIY tercatat sebesar Rp1.059 miliar, mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,18% dari periode sebelumnya sebesar Rp1.036 miliar. Berdasarkan jenis usaha bank, BPR Konvensional tercatat memiliki Aset sebesar Rp1.042 miliar, naik 2,16% dari triwulan sebelumnya sebesar Rp1.020 miliar. Sedangkan Aset BPR Syariah naik 3,42% menjadi Rp17 miliar.

Berdasarkan wilayah, pertumbuhan Aset tertinggi dialami oleh BPR yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 22,08% dari Rp80 miliar menjadi Rp97 miliar. Peningkatan ini disebabkan telah beroperasinya BPR baru di Kota Yogyakarta, yaitu PT BPR Walet Jaya Abadi. Sedangkan Aset BPR di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0,46% dari Rp582 miliar menjadi Rp579 miliar.

Penghimpunan Dana

Sampai dengan akhir triwulan III-2006 BPR di DIY mampu menghimpun dana masyarakat sebesar Rp771 miliar, naik sebesar 4,51% jika dibandingkan dengan triwulan II-2006 yang tercatat sebesar Rp737 miliar. Berdasarkan jenis simpanan, peningkatan DPK BPR disebabkan karena peningkatan simpanan berbentuk Deposito yang naik sebesar 9,87% dari Rp506 miliar menjadi Rp556 miliar. Sebaliknya, Tabungan justru mengalami penurunan sebesar -7,22% dari Rp231 miliar menjadi Rp215 miliar.

Tabel 3.12
Dana Pihak Ketiga Bank Perkreditan Rakyat

No	Uraian	2004	2005				2006				
			I	II	III	IV	I	II	III		
									Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹
A	Jenis Usaha	630	652	693	727	726	740	737	771	100,00	4,51
1	Konvensional	619	640	680	713	712	727	725	758	98,37	4,53
2	Syariah	11	12	13	14	14	13	12	13	1,63	3,08
B	Jenis Simpanan	630	652	693	727	726	740	737	771	100,00	4,51
1	Tabungan	191	190	201	217	211	208	231	215	27,86	-7,22
2	Deposito	439	462	492	510	514	532	506	556	72,14	9,87
C	Wilayah	630	652	693	727	726	740	737	771	100,00	4,51
1	Bantul	138	143	148	155	162	167	166	165	21,40	-0,54
2	Gunungkidul	15	16	17	17	17	20	20	21	2,69	5,15
3	Kulonprogo	56	57	60	75	72	75	75	77	10,00	2,33
4	Sleman	393	406	433	443	435	433	427	445	57,76	4,28
5	Yogyakarta	28	30	35	37	40	44	50	63	8,16	26,26

Keterangan:
1) %.

Sementara itu jika ditinjau berdasarkan wilayah, penghimpunan dana masyarakat di BPR Kabupaten Bantul mengalami penurunan sebesar 0,54%, dari Rp166 miliar menjadi Rp165 miliar. Sedangkan pertumbuhan DPK tertinggi dialami oleh BPR di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 26,26%, dari Rp50 miliar menjadi Rp63 miliar.

Penyaluran dan Kualitas Kredit

Penyaluran Kredit BPR pada triwulan laporan yang tercatat sebesar Rp867 miliar, atau tumbuh sebesar 2,34% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp847 miliar. Berdasarkan jenis usaha bank, Kredit BPR Konvensional tumbuh sebesar 2,10% dari Rp835 miliar menjadi Rp852 miliar, sedangkan pembiayaan BPR Syariah mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 18,32% dari Rp12 miliar menjadi Rp15 miliar. Konsentrasi penyaluran Kredit BPR pada triwulan

III-2006 masih kepada Kredit untuk kegiatan Konsumsi sebesar Rp427 miliar dengan angka pertumbuhan 3,78%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kredit Investasi yaitu sebesar 11,95% dari Rp40 miliar menjadi Rp44 miliar. Kredit Modal Kerja pada triwulan laporan sedikit mengalami penurunan sebesar -0,11% menjadi Rp395 miliar.

Tabel 3.13
Kredit Bank Perkreditan Rakyat

Miliar Rp

No	Uraian	2004	2005				2005				
			I	II	III	IV	I	II	III		
									Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹
A	Jenis Usaha Bank	692	750	800	838	832	836	847	867	100,00	2,34
1	Konvensional	682	739	789	825	819	823	835	852	98,30	2,10
2	Syariah	9	11	12	13	13	13	12	15	1,70	18,32
B	Jenis Penggunaan	692	750	800	838	832	836	847	867	100,00	2,34
1	Modal Kerja	375	394	417	426	415	401	395	395	45,57	-0,11
2	Investasi	17	17	20	25	25	32	40	44	5,12	11,95
3	Konsumsi	300	339	363	387	392	403	412	427	49,31	3,78
C	Sektor	692	750	800	838	832	836	847	867	100,00	2,34
1	Pertanian	15	15	16	17	17	17	18	18	2,11	-0,42
2	Industri	12	13	13	14	13	14	14	13	1,48	-10,93
3	Perdagangan	282	293	303	314	305	295	293	290	33,46	-1,00
4	Jasa-jasa	73	83	89	96	95	95	98	104	11,96	5,83
5	Lain-lain	310	346	379	397	402	415	423	442	50,99	4,42
D	Wilayah	692	750	800	838	832	836	847	867	100,00	2,34
1	Bantul	158	165	170	177	173	180	178	178	20,56	0,07
2	Gunungkidul	23	25	27	28	29	37	37	37	4,29	0,61
3	Kulonprogo	76	84	94	99	98	89	91	96	11,04	5,68
4	Sleman	399	438	464	483	477	473	475	474	54,71	-0,24
5	Yogyakarta	35	38	46	50	54	58	66	81	9,39	23,52
F	Non Performing Loans										
1	Jenis Usaha Bank	42	55	66	67	72	81	112	109	100,00	-2,57
a.	Konvensional	42	53	64	65	71	78	109	107	97,70	-2,27
b.	Syariah	1	1	1	1	1	2	3	3	2,30	-13,57
2	Wilayah	42	55	66	67	72	81	112	109	100,00	-2,57
a.	Bantul	19	24	23	24	26	32	38	40	36,25	3,22
b.	Gunung Kidul	1	1	1	1	1	2	3	3	2,75	1,42
c.	Kulon Progo	3	4	5	4	5	7	10	7	6,75	-23,55
d.	Sleman	15	20	34	35	37	36	53	50	45,50	-6,01
e.	Yogyakarta	5	6	3	3	3	4	8	10	8,76	15,62
G	Non Performing Loans (%)										
1	Jenis Usaha Bank	6,11	7,31	8,19	7,96	8,70	9,66	13,23	12,60		
a.	Konvensional	6,09	7,24	8,16	7,90	8,71	9,51	13,08	12,52		
b.	Syariah	7,36	11,70	10,05	11,39	8,24	19,08	23,39	17,09		
2	Wilayah	6,11	7,31	8,19	7,96	8,70	9,66	13,23	12,60		
a.	Bantul	11,86	14,80	13,35	13,55	15,27	17,67	21,53	22,21		
b.	Gunungkidul	2,81	3,01	2,94	3,12	3,25	6,31	8,01	8,07		
c.	Kulonprogo	3,58	4,74	5,48	3,91	4,96	7,79	10,64	7,70		
d.	Sleman	3,71	4,59	7,40	7,28	7,76	7,55	11,12	10,48		
e.	Yogyakarta	15,20	14,66	5,72	5,42	5,74	6,98	12,55	11,75		

Keterangan:
1) %.

Berdasarkan sektor ekonomi, pertumbuhan positif hanya dialami oleh sektor Jasa-jasa dan sektor Lain-lain, masing-masing sebesar 5,83% dari Rp98 miliar menjadi Rp104 miliar dan sebesar 4,42% dari Rp423 miliar menjadi Rp442 miliar, sedangkan sektor lainnya mengalami pertumbuhan negatif, dimana sektor Industri mengalami pertumbuhan negatif terbesar yakni -10,93% dari Rp14 miliar menjadi Rp13 miliar.

Berdasarkan wilayah, pertumbuhan Kredit negatif hanya dialami oleh BPR di Kabupaten Sleman sebesar -0,24% dari Rp475 miliar menjadi Rp474 miliar. Sedangkan wilayah lainnya mengalami pertumbuhan positif, terutama BPR di Kota Yogyakarta dengan pertumbuhan 23,52% dari Rp66 miliar menjadi Rp81 miliar.

Tidak sama halnya dengan Bank Umum, kualitas Kredit BPR pada triwulan laporan justru mengalami perbaikan. Jumlah Kredit Non Lancar BPR turun 2,57%, dari Rp112 miliar menjadi Rp109 miliar. Meskipun rasio NPLs mengalami penurunan namun angkanya masih berada di atas dua digit yakni dari 13,23% menjadi 12,60%. Penurunan jumlah Kredit bermasalah pada BPR Konvensional tercatat sebesar 2,27% menjadi Rp107 miliar, dan pada BPR Syariah tercatat sebesar 13,57% menjadi Rp3 miliar. Sehingga rasio NPLs BPR Konvensional turun dari 13,08% menjadi 12,52%, dan rasio NPF BPR Syariah turun drastis dari 23,39% menjadi 17,09%.

Berdasarkan wilayah, perbaikan kualitas Kredit yang ditunjukkan oleh penurunan rasio NPLs terdapat pada BPR di wilayah Kabupaten Kulonprogo yaitu dari 10,64% menjadi 7,70%, Kota Yogyakarta dari 12,55% menjadi 11,75% dan Kabupaten Sleman dari 11,12% menjadi 10,48%. Sedangkan rasio NPLs tertinggi terjadi di BPR di Kabupaten Bantul dengan angka yang mencapai 22,21%.

Fungsi Intermediasi

Fungsi intermediasi BPR yang ditunjukkan oleh angka *Loan to Deposit Ratio* mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 2,38% dari 114,87% menjadi 112,49%. Penurunan LDR ini dipicu oleh penurunan LDR BPR Konvensional sebesar 2,67% dari 115,09% menjadi 112,42%, sedangkan FDR BPR Syariah justru mengalami peningkatan drastis sebesar 15,04% dari 101,71 menjadi 116,75%.

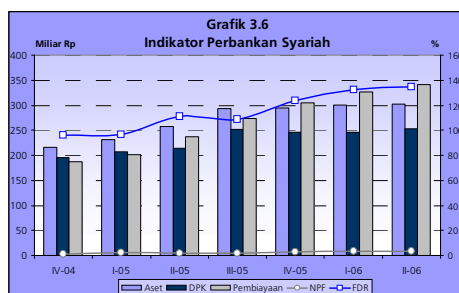
Tabel 3.14
Loan to Deposit Ratio Bank Perkreditan Rakyat

No	Uraian	2004	2005				2006		
			I	II	III	IV	I	II	III
A	Jenis Usaha Bank	109,88	114,94	115,51	115,24	114,69	113,06	114,87	112,49
1	Konvensional	110,16	115,35	115,89	115,67	115,07	113,25	115,09	112,42
2	Syariah	88,32	92,61	94,98	93,25	95,25	102,04	101,71	116,75
B	Wilayah	109,88	114,94	115,51	115,24	114,69	113,06	114,87	112,49
1	Bantul	86,97	86,85	87,03	87,58	93,24	93,04	93,07	92,50
2	Gunungkidul	62,53	64,99	62,62	59,44	56,46	54,32	53,23	55,63
3	Kulonprogo	74,04	67,97	64,14	76,11	74,09	84,87	83,16	80,52
4	Sleman	98,44	92,58	93,46	91,62	91,11	91,53	89,78	93,85
5	Yogyakarta	81,77	79,93	75,34	73,70	73,66	76,25	75,54	77,21

Berdasarkan wilayah, peningkatan LDR tertinggi dialami oleh BPR di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 4,07% menjadi 93,85%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta masing-masing sebesar 2,40% menjadi sebesar 55,63% dan sebesar 1,67% menjadi sebesar 77,21%. Sedangkan LDR BPR di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,64% menjadi sebesar 80,52% dan sebesar 0,57% menjadi sebesar 92,50%.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Aset



Volume Usaha Perbankan Syariah pada triwulan III-2006 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yaitu naik 12,85% dari Rp303 miliar menjadi Rp342 miliar. Pertumbuhan Aset ini lebih didorong oleh pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah sebesar 13,40%, dari Rp286 miliar menjadi Rp324 miliar, sedangkan Aset BPR Syariah naik sebesar 3,42% menjadi Rp17 miliar.

Tabel 3.15
Indikator Perbankan Syariah

No	Uraian	2004	2005				2006			Miliar Rp		
			I	II	III	IV	I	II	III	Posisi	Pangsa ¹	Ptumb ¹
I	Aset	215	231	258	294	294	301	303	342	100,00	12,85	
1	Bank Umum Syariah	202	216	242	277	277	284	286	324	94,96	13,40	
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	14	15	16	17	17	17	17	17	5,04	3,42	
II	Penghimpunan Dana (Deposit)	195	207	214	251	247	247	254	276	100,00	8,72	
A	Jenis Bank	195	207	214	251	247	247	254	276	100,00	8,72	
1	Bank Umum Syariah	185	195	201	238	233	234	241	263	95,43	9,00	
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	11	12	13	14	14	13	12	13	4,57	3,08	
B	Jenis Simpanan	195	207	214	251	247	247	254	276	100,00	8,72	
1	Giro	5	3	6	15	16	22	22	31	11,33	42,85	
2	Tabungan	89	96	95	106	115	121	133	143	51,94	7,27	
3	Deposito	101	108	113	130	116	103	98	101	36,73	3,09	
C	Jenis Valuta	195	207	214	251	247	247	254	276	100,00	8,72	
1	Rupiah	195	207	212	249	243	241	250	272	98,66	8,69	
2	Valuta Asing	1	1	2	2	4	6	3	4	1,34	10,60	
III	Penyaluran Dana (Financing)	187	201	237	273	304	327	341	407	100,00	19,12	
A	Jenis Bank	187	201	237	273	304	327	341	407	100,00	19,12	
1	Bank Umum Syariah	178	190	225	260	291	314	329	392	96,38	19,16	
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	9	11	12	13	13	13	12	15	3,62	18,32	
B	Jenis Penggunaan	187	201	237	273	304	327	341	407	100,00	19,12	
1	Modal Kerja	44	51	62	70	81	87	91	108	26,63	18,51	
2	Investasi	31	33	37	44	42	42	43	77	18,95	80,13	
3	Konsumsi	113	117	138	159	181	197	207	221	54,42	6,80	
IV	Non Performing Financing (NPF)											
A	Nominal	2	5	4	5	9	11	13	12	100,00	-6,19	
1	Bank Umum Syariah	1	4	3	3	8	8	10	9	78,80	-3,99	
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	1	1	1	1	1	2	3	3	21,20	-13,57	
B	Rasio	1,15	2,54	1,83	1,66	3,08	3,26	3,70	2,92			
1	Bank Umum Syariah	0,82	2,01	1,39	1,18	2,85	2,61	2,96	2,38			
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	7,36	11,70	10,05	11,39	8,24	19,08	23,39	17,09			
V	Financing to Deposit Ratio (FDR)¹	95,89	96,88	110,83	108,65	123,47	132,43	134,62	147,51			
1	Bank Umum Syariah	96,33	97,14	111,82	109,54	125,12	134,06	136,29	148,98			
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	88,32	92,61	94,98	93,25	95,25	102,04	101,71	116,75			
VI	Jumlah Bank Syariah	6	6	7	7	7	7	7	7			
1	Bank Umum Syariah	4	4	5	5	5	5	5	5			
2	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	2	2	2	2	2	2	2	2			

Keterangan:

1) %.

Penghimpunan Dana

Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh Perbankan Syariah pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 8,72% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu dari Rp254 miliar menjadi Rp276 miliar. Berdasarkan jenis bank, DPK tersebut sebesar 95,43% atau Rp263 miliar disimpan di Bank Umum Syariah, sedangkan sebesar 4,57% atau Rp13 miliar disimpan di BPR Syariah.

Berdasarkan jenis simpanan, pertumbuhan tertinggi dialami oleh jenis simpanan berbentuk Giro yaitu sebesar 42,85% dari Rp22 miliar menjadi Rp31 miliar. Sedangkan proporsi terbesar masih berada pada simpanan dalam bentuk Tabungan (51,94%) atau sebesar Rp143 miliar dengan pertumbuhan 7,27%.

Penyaluran dan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh Perbankan Syariah kepada sektor riil sampai dengan triwulan III-2006 mengalami peningkatan sebesar 19,12% dari Rp341 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp407 miliar. Jika dirinci berdasarkan jenis bank, Pembiayaan Perbankan Syariah berasal dari Bank Umum Syariah sebesar Rp392 miliar, dan BPR Syariah sebesar Rp15 miliar.

Seperti halnya yang terjadi pada Kredit BPR Konvensional, Pembiayaan dengan tujuan Konsumsi masih mendominasi penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah, dengan pangsa sebesar 54,42% atau sebesar Rp221 miliar, kemudian diikuti dengan Pembiayaan untuk kegiatan Modal Kerja dengan pangsa 26,63% atau sebesar Rp108 miliar, dan terakhir adalah pembiayaan untuk kegiatan Investasi dengan pangsa 18,95% atau sebesar Rp77 miliar. Namun demikian, Pembiayaan Investasi memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 80,13%.

Tidak sama halnya dengan Perbankan Konvensional, kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah justru menunjukkan perbaikan, dimana jumlah nominal Pembiayaan tidak lancarnya mengalami penurunan sebesar 6,19% dari Rp13 miliar menjadi Rp12 miliar. Dengan demikian rasio *Non Performing Financing* Perbankan Syariah turun dari 3,70% menjadi 2,92%. Perbaikan kualitas pembiayaan terutama terjadi pada BPR Syariah dengan penurunan rasio NPF sebesar 6,30% yaitu dari 23,39% menjadi 17,09%.

Fungsi Intermediasi

Sebagaimana yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, fungsi intermediasi Perbankan Syariah mengalami peningkatan, ditunjukkan dari peningkatan *Financing to Deposit Ratio* sebesar 12,89% dari 134,62% pada triwulan II-2006 menjadi 147,51% pada triwulan III-2006. Berdasarkan jenis bank, FDR Bank Umum Syariah meningkat sebesar 12,69% dari 136,29% menjadi 148,98%. Sedangkan FDR BPR Syariah meningkat lebih tinggi dari FDP Bank Umum Syariah yaitu sebesar 15,04% dari 101,71% menjadi 116,75%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat pada Perbankan Syariah dalam mendorong berputarnya roda perekonomian sektor riil DIY.

Boks:

Kredit Likuiditas Bank Indonesia untuk Korban Gempa DIY dan Jawa Tengah

Sebagai perwujudan rasa kepedulian dan turut membantu pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi di daerah yang terkena bencana gempa, Bank Indonesia dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kredit Pembangunan/Perbaikan Rumah Sederhana Secara Swadaya untuk Daerah Gempa di Propinsi DIY dan Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 2006.

Dana Kredit Pembangunan tersebut berasal dari dana KLBI *Relending*, yaitu dana angsuran KLBI yang belum jatuh tempo dan *Eks Relending*, yaitu dana angsuran KLBI yang suku bunga kreditnya mencapai suku bunga komersial tahun 2006 dengan jumlah dana yang siap disalurkan adalah sebesar Rp239 miliar.

Dana ini selanjutnya disalurkan melalui koordinator pengelola KLBI di bidang perumahan yaitu Bank Tabungan Negara (BTN), namun alokasi dana KLBI diatur oleh Bank Indonesia demikian juga dengan pengawasannya melalui laporan yang disampaikan oleh BTN secara berkala.

Sedangkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat bertugas memberikan dukungan kebijakan sesuai dengan kebijakan terkait dalam rangka Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah. Selain itu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat juga akan memberikan bantuan teknis melalui pendampingan kepada masyarakat yang akan membangun/memperbaiki rumah, sekaligus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

Kredit diberikan dengan tujuan penggunaan pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah tinggal termasuk rumah tinggal yang digunakan untuk tempat usaha. Plafon yang diberikan kepada debitur sebesar maksimal Rp50 juta dengan suku bunga sebesar 5,5%. Suku bunga ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan suku bunga Kredit Perumahan yang berkisar di antara 15%. Sedangkan jangka waktu maksimum adalah 10 (sepuluh) tahun dengan batas akhir jatuh tempo Kredit adalah tanggal 31 Desember 2017 dan batasan kredit lunas pada saat usia debitur 65 tahun. Atas pemberian Kredit tidak dipungut provisi (*commitment fee*) dari debitur. Kredit Pembangunan ini memiliki batasan periode yaitu diberikan sejak tanggal 23 Agustus 2006 sampai dengan 31 Desember 2007.

Adapun pemohon diberikan persyaratan sebagai berikut:

- a. WNI yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
- b. Bangunan rumah tempat tinggal atau bangunan tempat usaha dimiliki pemohon dan rusak akibat gempa;
- c. Memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap yang menurut analisis bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban sampai kredit lunas;
- d. Menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan rumah tempat tinggal/usaha yang dibiayai dengan kredit. Barang bergerak juga dimungkinkan sebagai agunan tambahan.

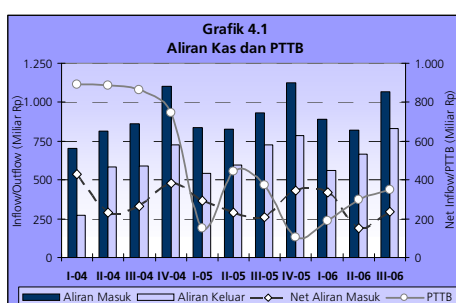
Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 4: Perkembangan Sistem Pembayaran

SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Aliran Uang Masuk (*Cash Inflow*) dan Keluar (*Cash Outflow*)

Pada triwulan III-2006 kebutuhan masyarakat DIY terhadap uang kartal menunjukkan peningkatan yang signifikan, tercermin dari beberapa indikator, yaitu jumlah rata-rata aliran uang yang masuk ke KBI Yogyakarta (*cash inflow*), jumlah rata-rata aliran uang yang keluar dari KBI Yogyakarta (*cash outflow*) serta jumlah rata-rata aliran uang masuk netto (*net cash inflow*).



Tabel 4.1
Indikator Sistem Pembayaran Tunai

No	Uraian	2004	2005				2006			Ptumb ¹	
			I	II	III	IV	Total	I	II		III
1	Posisi Kas	1.255	1.691	1.052	556	1.274	1.274	1.711	1.281	937	-26,83
2	Rata-rata Cash Inflow/Bulan	1.999	839	828	932	1.126	931	890	818	1.067	30,45
3	Rata-rata Cash Outflow/Bulan	1.308	478	597	723	783	645	558	665	834	25,34
4	Rata-rata Net Cash Inflow/Bulan	691	361	231	208	343	286	333	153	234	52,64

Keterangan:

1) Triwulan III-2006 dibandingkan Triwulan II-2006 (dalam %).

Jumlah rata-rata *cash inflow* pada triwulan laporan sebesar Rp1.067 miliar, mengalami kenaikan sebesar 30,45% atau Rp249 miliar jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp818 miliar. Sementara itu, jumlah rata-rata *cash outflow* mengalami peningkatan sebesar 25,34% atau sebesar Rp169 miliar dari Rp665 miliar menjadi Rp834 miliar.

Karena kenaikan jumlah rata-rata *cash inflow* lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah rata-rata *cash outflow*, maka *net cash inflow* pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 52,64% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp153 miliar, menjadi Rp234 miliar.

Meskipun jumlah rata-rata *net cash inflow* mengalami peningkatan, namun posisi kas di KBI Yogyakarta justru mengalami penurunan sebesar -26,83% atau turun sebesar Rp344 miliar dari Rp1.281 miliar menjadi Rp937 miliar. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) dalam rangka pelaksanaan *Clean Money Policy*.

Terkait dengan dana program rekonstruksi, peningkatan rata-rata *cash inflow* ini disebabkan oleh pencairan dana tersebut yang dilakukan sejak awal bulan September 2006 melalui Perbankan yang setelah beredar di masyarakat kembali lagi ke Perbankan.

Penukaran Uang

Kegiatan penukaran uang pecahan kecil yang dilakukan di loket KBI Yogyakarta pada triwulan III-2006 tercatat sebesar Rp34 miliar, turun sebesar Rp2 miliar (-4,97%) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp36 miliar.

Tabel 4.2
Penukaran Uang Pecahan Kecil

Juta Rp

Pecahan	2004	2005					2006			Ptumb ¹
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	
Uang Kertas	87.094	16.625	18.418	23.096	50.632	108.771	31.694	35.164	32.794	-6,74
10.000	30.709	6.323	7.660	8.373	18.593	40.949	14.200	17.772	15.511	-12,72
5.000	35.128	6.239	7.890	10.481	23.291	47.901	13.485	12.000	11.245	-6,29
1.000	21.257	4.063	2.868	4.242	8.748	19.921	4.009	5.392	6.038	11,98
Uang Logam	3.288	421	905	1.233	1.506	4.064	511	518	1.115	115,26
1.000	357	5	492	542	187	1.225	276	108	34	-68,84
500	2.120	308	313	413	887	1.921	131	241	223	-7,67
200	128	48	55	153	315	571	32	82	473	473,54
100	684	59	44	125	117	346	73	87	386	344,96
Total	90.382	17.046	19.322	24.329	52.138	112.835	32.205	35.682	33.909	-4,97

Keterangan:
1) Triwulan III-2006 dibandingkan Triwulan II-2006 (dalam %).

Berdasarkan jenis uang, pertumbuhan negatif penukaran uang pecahan kecil didorong oleh pertumbuhan penukaran uang kertas sebesar -6,74% atau turun Rp2 miliar dari Rp35 miliar menjadi Rp33 miliar. Sedangkan penukaran uang logam justru mengalami peningkatan pesat sebesar 115,26% dari Rp0,51 miliar menjadi Rp1 miliar.

Sementara itu, jika dirinci berdasarkan denominasinya, sebagaimana terjadi pada triwulan sebelumnya, pertumbuhan positif penukaran uang kecil tertinggi masih terjadi pada pecahan uang logam Rp200 sebesar 473,54% dari Rp0,08 miliar menjadi Rp0,47 miliar, diikuti oleh uang logam Rp100 sebesar 344,96% dari Rp0,09 miliar menjadi Rp0,39 miliar.

Sedangkan pertumbuhan negatif tertinggi dialami oleh uang logam Rp1.000 sebesar -68,84% dari Rp0,11 miliar menjadi Rp0,03 miliar dan diikuti oleh uang kertas Rp10.000 sebesar -12,72% dari Rp18 miliar menjadi Rp16 miliar.

Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)

Dalam rangka melaksanakan *clean money policy*, KBI Yogyakarta secara rutin melakukan kegiatan penyortiran dan peracikan uang yang tidak layak edar dengan menggunakan Mesin Sortir Uang Kertas (MSUK) dan Mesin Racik Uang

Kertas (MRUK). Uang yang dikategorikan sebagai uang tidak layak edar selanjutnya dicatat sebagai Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) untuk kemudian dilakukan pemusnahan.

Tabel 4.3
Pemberian Tanda Tidak Berharga

Pecahan	2004	2005					2006			Ptumb ¹
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	
100.000	546.665	87.799	159.068	118.258	92.091	457.216	87.909	219.727	222.036	1,05
50.000	2.173.320	178.694	986.558	866.994	120.113	2.152.358	261.009	527.718	683.755	29,57
20.000	352.780	99.574	83.256	72.832	39.455	295.117	103.900	68.533	77.014	12,37
10.000	156.553	53.857	40.850	33.821	17.598	146.127	57.167	29.988	33.808	12,74
5.000	113.950	19.595	39.045	22.756	30.646	112.041	34.536	23.334	21.759	-6,75
1.000	42.165	7.761	21.024	5.415	10.676	44.876	14.920	8.084	4.990	-38,28
500	563	92	115	58	45	310	59	40	37	-7,97
100	96	16	18	25	5	65	8	4	7	70,56
Total	3.386.091	447.388	1.329.934	1.120.159	310.630	3.208.110	559.509	877.427	1.043.406	18,92

Keterangan:
1) Triwulan III-2006 dibandingkan Triwulan II-2006 (dalam %).

Jumlah PTTB pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 18,92% atau sebesar Rp166 miliar dari Rp877 miliar menjadi Rp1.043 miliar. Berdasarkan denominasi, pertumbuhan PTTB tertinggi dialami oleh uang logam Rp100 sebesar 70,56% dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta diikuti oleh uang pecahan Rp50.000 sebesar 29,57% dari Rp528 miliar menjadi Rp684 miliar. Sedangkan denominasi yang mengalami penurunan PTTB yang paling besar adalah uang pecahan Rp1.000, yakni turun 38,28% dari Rp8 miliar menjadi Rp5 miliar.

Jika dibandingkan dengan jumlah PTTB triwulan III-2005, jumlah PTTB pada triwulan laporan turun sebesar 6,85% atau Rp77 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat DIY dalam melaksanakan himbuan Bank Indonesia untuk menjaga kualitas uang Rupiah.

Tabel 4.4
Temuan Uang Palsu yang Dilaporkan

Pecahan	Tahun Emisi	2004 ¹	2005				2006			Ptumb ²	
			I	II	III	IV	Total	I	II		III
100.000	2004	-	-	-	-	35	35	53	1	4	
100.000	1999	37	4	5	-	20	29	1	4	3	
50.000	2005	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
50.000	1999	51	5	3	-	12	20	2	2	1	
50.000	1995	150	-	-	-	-	-	-	3	-	
50.000	1993	1	4	-	-	-	4	-	-	-	
20.000	2004	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
20.000	1998	5	-	3	-	3	6	19	1	-	
20.000	1992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.000	1998	1	-	3	-	4	7	164	1	-	
10.000	1992	-	-	-	4	-	4	-	-	-	
5.000	1992	-	-	1	2	-	3	-	-	-	
Total (Rp)		13.910.000	850.000	745.000	50.000	6.200.000	7.845.000	7.610.000	780.000	750.000	-3,85

Keterangan:
1) Termasuk uang palsu yang dilaporkan kepada Poltabes Kota Yogyakarta yang terdiri dari 3 lembar Rp100.000,- dan 150 lembar Rp50.000.
2) Triwulan III-2006 dibandingkan Triwulan II-2006 (dalam %).

Temuan Uang Palsu

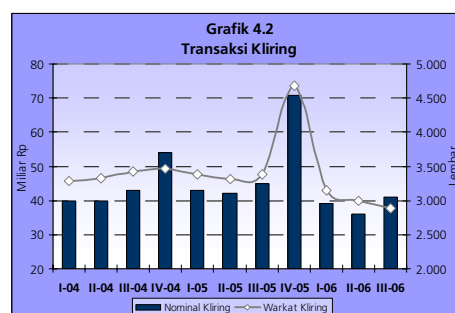
Hingga akhir triwulan III-2006, jumlah uang palsu yang dilaporkan ke KBI Yogyakarta mengalami penurunan baik dari jumlah nominal maupun jumlah lembar. Berdasarkan jumlah nominal uang palsu, terjadi penurunan sebesar 3,85%

dari Rp0,78 juta menjadi Rp0,75 juta. Jika dilihat dari jumlah lembarnya, penurunan uang palsu tercatat sebesar 33,33% dari 12 lembar menjadi 8 lembar. Jumlah uang palsu tersebut terdiri dari 4 lembar pecahan Rp100.000 emisi 2004, 3 lembar pecahan Rp100.000 emisi 1999, 1 lembar pecahan Rp50.000 emisi 1999.

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Transaksi Kliring

Berdasarkan rata-rata warkat per hari, transaksi kliring pada triwulan III-2006 mengalami penurunan sebesar 3,45% dari 2.989 lembar menjadi 2.886 lembar. Namun jika dilihat dari rata-rata nominal kliring per hari, terjadi peningkatan sebesar 4,05% dari Rp36 miliar pada triwulan II-2006 menjadi Rp41 miliar pada triwulan III-2006.



No	Uraian	2004	2005					2006			Ptumb ¹
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	
Kliring											
1	Rata-rata Warkat Kliring/Hari (lembar)	3.375	3.384	3.320	3.380	4.686	3.693	3.141	2.989	2.886	-3,45
2	Rata-rata Warkat Ditolak/Hari (lembar)	24	28	28	29	33	30	29	33	2	-93,94
3	Rasio (2)/(1) dalam %	0,71	0,83	0,86	0,86	0,71	0,80	0,92	1,12	0,07	
4	Rata-rata Nominal Kliring/Hari	44	43	42	45	71	50	39	36	41	4,05
5	Rata-rata Nominal Ditolak/Hari	2.289	0,427	0,485	0,484	0,610	0,502	0,616	0,448	0,431	-29,99
6	Rasio (5)/(4) dalam %	5,18	0,99	1,15	1,08	0,86	1,00	1,57	1,23	1,06	
BI-RTGS											
1	Rata-rata Warkat Outgoing Transfer/Bulan (lembar)	2.418	2.337	2.300	2.634	2.518	2.447	2.386	2.475	2.558	7,18
2	Rata-rata Warkat Incoming Transfer/Bulan (lembar)	1.631	1.691	1.906	2.208	2.348	2.038	2.143	2.445	2.809	31,07
4	Rata-rata Nominal Outgoing Transfer/Bulan	2.248	2.250	2.247	2.823	2.787	2.527	2.298	2.996	3.342	45,40
3	Rata-rata Nominal Incoming Transfer/Bulan	3.053	2.294	2.685	2.890	2.878	2.687	2.970	3.656	4.734	59,40
5	Rata-rata Net Incoming Transfer/Bulan	805	44	438	66	91	160	672	660	1.393	107,29

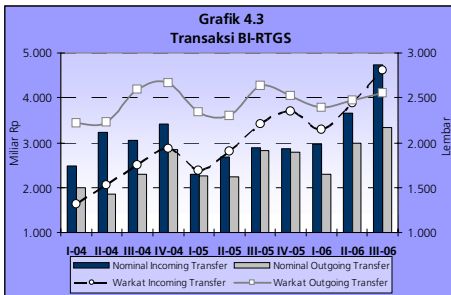
Keterangan:

1) Triwulan III-2006 dibandingkan Triwulan II-2006 (dalam %).

Sementara itu rasio rata-rata nominal penolakan Cek dan Bilyet Giro Kosong per hari pada triwulan laporan turun dari 1,23% menjadi 1,06%. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif rata-rata warkat ditolak per hari dan rata-rata nominal kliring ditolak per hari. Rata-rata warkat ditolak per hari mengalami penurunan drastis sebesar 93,94% dari Rp33 miliar menjadi Rp2 miliar, sedangkan rata-rata nominal kliring ditolak per hari turun sebesar -29,99% dari Rp0,45 miliar menjadi Rp0,43 miliar.

Transaksi Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi rata-rata Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) melalui Kantor Bank Indonesia Yogyakarta pada sisi *outgoing* maupun *incoming transfer* pada triwulan II-2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Rata-rata nominal *outgoing transfer* per bulan naik 45,40% dari Rp2.996 miliar menjadi Rp3.342 miliar dengan jumlah rata-rata warkat per bulan naik 7,18% dari Rp2.475 lembar menjadi Rp2.558 lembar. Sedangkan peningkatan rata-rata nominal *incoming transfer* per bulan tercatat naik 59,40% dari Rp3.656 miliar menjadi Rp4.734 miliar dengan jumlah rata-rata warkat per bulan naik 31,07% dari Rp2.445 lembar menjadi Rp2.809 lembar.

Peningkatan rata-rata nominal *incoming transfer* per bulan yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan rata-rata nominal *outgoing transfer* per bulan selanjutnya menyebabkan rata-rata *net incoming transfer* pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 107,29% dari Rp660 miliar menjadi Rp1.393 miliar.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 5: Keuangan Daerah

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan data gabungan rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Kota dan Propinsi DIY sampai dengan triwulan II-2006, kinerja keuangan Pemerintah Daerah di wilayah DIY masih belum dapat dikatakan optimal. Di sisi penerimaan, Pemerintah Daerah memang mampu merealisasikan pendapatan sebesar 53,37% atau Rp1.831 miliar dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.431 miliar. Namun di sisi pengeluaran/belanja daerah, realisasi sampai dengan pertengahan tahun 2006 baru mencapai 29,95% atau Rp1.111 miliar jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2006 yang tercatat sebesar Rp3.711 miliar. Dengan demikian, pada triwulan II-2006 terjadi surplus anggaran sebesar Rp719 miliar, dimana pada tahun 2006 diperkirakan defisit sebesar Rp281 miliar.

Tabel 5.1
Realisasi APBD

Juta Rp

No	Uraian	2006		
		APBD	Realisasi s.d.Trw-II	% Realisasi thd APBD
I	Pendapatan	3.430.598	1.830.908	53,37
1	Pendapatan Asli Daerah	685.600	578.679	84,40
2	Dana Perimbangan	2.692.878	1.243.829	46,19
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.120	8.400	16,12
II	Belanja	3.711.305	1.111.457	29,95
1	Belanja Pegawai	1.898.857	751.806	39,59
2	Belanja Barang dan Jasa	482.233	101.736	21,10
3	Belanja Perjalanan Dinas	80.830	14.417	17,84
4	Belanja Pemeliharaan	134.659	57.558	42,74
5	Belanja Lain-lain	-	-	-
6	Belanja Modal	584.222	44.826	7,67
7	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	489.023	122.074	24,96
8	Belanja Tidak Tersangka	41.481	19.040	45,90
III	Surplus (Defisit)	(280.707)	719.451	(256,30)
IV	Pembiayaan	228.315	181.980	79,71
1	Penerimaan	296.941	192.076	64,68
2	Pengeluaran	68.626	10.096	14,71

Sumber: BAPEDA Propinsi, Kabupaten/Kota

Berdasarkan wilayah, pada triwulan II-2006 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota juga masih belum terlihat optimal, dimana realisasi penerimaan masing-masing wilayah berkisar pada angka 50,00% dari

anggaran yang telah ditetapkan. Persentase realisasi pendapatan tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 69,09% atau Rp335 miliar dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp485 miliar. Sedangkan persentase terendah terdapat pada Kota Yogyakarta sebesar 48,49% atau Rp249 miliar dari anggaran sebesar Rp514 miliar.

Sementara itu persentase realisasi pengeluaran anggaran terbesar dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yakni sebesar 37,14% atau Rp212 miliar dari anggaran sebesar Rp571 miliar. Sedangkan persentase terendah dialami oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 26,22% atau Rp136 miliar dari rencana belanja sebesar Rp519 miliar.

Dengan demikian, di semua wilayah terjadi surplus anggaran, dimana berdasarkan APBD yang telah ditetapkan pada semua wilayah justru diperkirakan mengalami defisit anggaran. Surplus tertinggi terdapat pada Propinsi DIY sebesar Rp187 miliar, kemudian berturut-turut diikuti oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp145 miliar, Kabupaten Sleman sebesar Rp123 miliar, Kabupaten Bantul sebesar Rp111 miliar, Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp92 miliar dan Kota Yogyakarta sebesar Rp62 miliar.

PENDAPATAN DAERAH

Realisasi penerimaan/pendapatan DIY pada triwulan II-2006 sebesar 67,94% berasal dari Dana Perimbangan (Rp1.244 miliar), diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-lain dengan pangsa masing-masing sebesar 31,61% (Rp579 miliar) dan 0,46% (Rp8 miliar). Berdasarkan angka persentase realisasi APBD, persentase tertinggi terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah sebesar 84,40% diikuti oleh Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masing-masing sebesar 46,19% dan 16,12%.

Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp275 miliar masih merupakan kontributor terbesar PAD dengan pangsa 47,46%. Sedangkan komponen PAD lainnya terdiri dari Lain-lain PAD sebesar Rp216 miliar (37,29%), Retribusi Daerah sebesar Rp60 miliar (10,38%) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28 miliar. Pada triwulan II-2006, persentase realisasi tertinggi terdapat pada pos Lain-lain PAD yang mencapai 486,91% dari anggaran sebesar Rp44 miliar. Sedangkan persentase terendah terdapat pada pos Retribusi Daerah sebesar 47,45% dari anggaran sebesar Rp32 miliar. Rendahnya persentase realisasi ini diduga disebabkan oleh kebijakan penghapusan beberapa pungutan retribusi sehubungan dengan terjadinya gempa 27 Mei 2006 yang melanda DIY dan

sekitarnya. Berdasarkan wilayah, persentase realisasi PAD tertinggi terdapat pada Pemerintah Propinsi yaitu sebesar 99,50% atau Rp432 miliar dari anggaran sebesar Rp434 miliar.

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Daerah

Juta Rp

No	Uraian	2006		
		APBD	Realisasi s.d.Trw-II	% Realisasi thd APBD
1	Pendapatan Asli Daerah	685.600	578.679	84,40
	a. Pajak Daerah	482.813	274.626	56,88
	b. Retribusi Daerah	126.629	60.082	47,45
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.845	28.207	88,58
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	44.313	215.764	486,91
2	Dana Perimbangan	2.692.878	1.243.829	46,19
	a. Bagi Hasil Pajak	156.883	37.988	24,21
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	1.032	357	34,59
	c. Dana Alokasi Umum	2.285.200	1.195.821	52,33
	d. Dana Alokasi Khusus	111.235	8.724	7,84
	e. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	138.528	939	0,68
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.120	8.400	16,12
	a. Bantuan Dana Kontinjensi	6.502	-	-
	b. Hibah	3.600	-	-
	c. Lain-lain	42.018	8.400	19,99
Total Pendapatan		3.430.598	1.830.908	53,37

Sumber: BAPEDA Propinsi, Kabupaten/Kota

Tiga komponen utama penyumbang realisasi Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.196 miliar, Bagi Hasil Pajak sebesar Rp38 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp9 miliar, dengan pangsa masing-masing sebesar 96,14%, 3,05% dan 0,70%. Selain sebagai komponen penyumbang utama Pendapatan Dana Perimbangan, DAU juga memiliki persentase realisasi APBD tertinggi sebesar 52,33%, kemudian diikuti oleh Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bagi Hasil Pajak masing-masing sebesar 34,59% dan 24,21%. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Sleman memiliki persentase realisasi Pendapatan Dana Perimbangan yaitu sebesar 74,05%, sedangkan persentase terendah terdapat pada Propinsi yaitu sebesar 2,29%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada triwulan II-2006 sebesar Rp8 miliar merupakan Pendapatan Lain-lain dengan persentase realisasi sebesar 19,99% dari anggaran sebesar Rp42 miliar. Sedangkan pos lainnya masih belum terealisasi atau nihil. Jika dirinci berdasarkan wilayah, persentase realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tertinggi terdapat pada Propinsi DIY sebesar 64,76% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 64,38%. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul hingga triwulan II-2006 belum merealisasikan pos Pendapatan ini.

BELANJA DAERAH

Realisasi anggaran pengeluaran/belanja Kabupaten/Kota dan Propinsi DIY sampai dengan triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp1.111 miliar atau 29,95% dari APBD 2006 sebesar Rp3.711 miliar. Belum optimalnya penyerapan APBD ini mempengaruhi perlambatan kinerja perekonomian DIY pada triwulan laporan. Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan APBD akan diuraikan secara khusus dalam Boks “Kinerja dan Hambatan Realisasi Penyerapan APBD DIY”.

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Daerah

No	Uraian	2006		
		APBD	Realisasi s.d.Trw-II	% Realisasi thd APBD
1	Belanja Pegawai	1.898.857	751.806	39,59
2	Belanja Barang dan Jasa	482.233	101.736	21,10
3	Belanja Perjalanan Dinas	80.830	14.417	17,84
4	Belanja Pemeliharaan	134.659	57.558	42,74
5	Belanja Lain-lain	-	-	-
6	Belanja Modal	584.222	44.826	7,67
7	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	489.023	122.074	24,96
8	Belanja Tidak Tersangka	41.481	19.040	45,90
Total Belanja		3.711.305	1.111.457	29,95

Sumber: BAPEDA Propinsi, Kabupaten/Kota

Pos Belanja Pegawai tercatat merupakan komponen penyumbang terbesar Belanja Daerah yaitu sebesar Rp752 miliar atau memiliki pangsa 67,64%. Hingga pertengahan tahun, realisasi Belanja Pegawai hanya sebesar 39,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.899 miliar. Kota Yogyakarta tercatat memiliki persentase terendah yaitu sebesar 34,73% atau Rp110 miliar.

Penyumbang kedua terbesar adalah Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang pada triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp122 miliar (10,98%) dengan persentase realisasi sebesar 24,96%. Persentase terendah terdapat pada Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 18,16% atau Rp9 miliar.

Komponen berikutnya yang merupakan Belanja Rutin adalah Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas masing-masing sebesar Rp102 miliar (9,15%), Rp58 miliar (5,18%), dan Rp14 miliar (1,30%). Sedangkan persentase realisasi terhadap anggaran masing-masing tercatat sebesar 21,10%, 42,74% dan 17,84%. Berdasarkan wilayah, persentase realisasi Belanja terendah untuk pos Belanja Barang dan Jasa terdapat pada Propinsi DIY sebesar 12,53%, pos Belanja Pemeliharaan terdapat pada Kabupaten Kulonprogo sebesar 6,30% dan Belanja Perjalanan Dinas terdapat pada Propinsi DIY sebesar 11,34%.

Realisasi Belanja Modal yang merupakan cerminan terlaksananya proyek-proyek pemerintah hingga triwulan laporan tercatat hanya sebesar Rp45 miliar atau 7,67% dari APBD 2006 sebesar Rp584 miliar. Berdasarkan wilayah, persentase realisasi Belanja Modal terendah terdapat pada Propinsi DIY sebesar 0,17% atau Rp0,2 miliar, sedangkan persentase tertinggi terdapat pada Kabupaten Sleman sebesar 23,31% atau Rp19 miliar.

Belanja Tidak Tersangka pada triwulan II-2006 tercatat sebesar Rp19 miliar atau terealisasi 45,90% dari APBD yang telah ditetapkan sebesar Rp41 miliar. Persentase terendah terdapat pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,81%. Sedangkan pos Belanja Lain-lain hingga akhir pertengahan tahun 2006 masih belum terealisasi.

Boks:

Kinerja dan Hambatan Realisasi Penyerapan APBD DIY

Asosiasi Profesi Keuangan Negara (APIK) pada tanggal 8 Agustus 2006 menggelar Dialog dengan mengangkat tema tentang APBN 2006 dan Upaya Mengatasi Kendala Penyerapannya dengan menghadirkan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), Anwar Nasution (Ketua BPK), dan Lukita Dinarsyah (Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS) sebagai pembicara.

Dalam Dialog tersebut mengemuka beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan APBN, antara lain (1) masalah penyempurnaan kebijakan termasuk aturan pelaksanaan dan sosialisasinya (2) kualitas SDM dan kualitas institusi.

Berangkat dari hasil Dialog tersebut serta dengan memperhatikan data gabungan APBD Propinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II-2006, Bank Indonesia Yogyakarta mengundang Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Agustus 2006 untuk menggali informasi mengenai kesulitan penyerapan APBD di DIY. Pertemuan ini juga bertujuan untuk melakukan konfirmasi atas berita-berita di surat kabar. Adapun hasil pembahasan sebagai berikut :

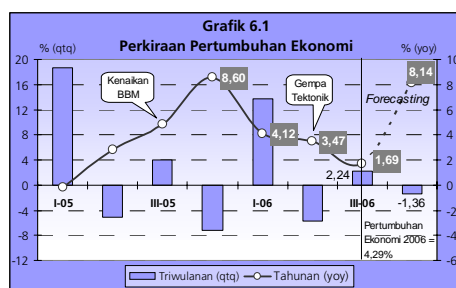
1. Dana APBD yang belum digunakan (*idle*) oleh Pemerintah Daerah ditempatkan dalam bentuk Giro, Deposito atau Tabungan pada 4 (empat) Bank milik Pemerintah. Besarnya penempatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan *cash flow* keuangan Pemerintah Daerah yang dievaluasi secara berkala.
2. Program Kerja Pemerintah Daerah setelah disusun dalam tingkatan eksekutif kemudian dibahas dalam legislatif meskipun tidak dilakukan secara terperinci.
3. Kendala yang dihadapi dalam penyerapan APBD adalah sebagai berikut :
 - a. Hingga triwulan II, rata-rata realisasi belanja Pemerintah Daerah hanya mampu mencapai angka sebesar 30%, disebabkan *plotting* anggaran belanja (terutama belanja modal dan pemeliharaan) yang terkonsentrasi di triwulan III dan IV.
 - b. Berdasarkan ketentuan, sebelum APBD ditetapkan, instansi-instansi pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengadakan kontrak pengadaan. Oleh karena itu, realisasi belanja daerah s.d semester I-2006 pada umumnya didominasi oleh pengeluaran rutin (terutama pembayaran gaji) yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan pengeluaran untuk proyek/program.
 - c. Adanya perpanjangan birokrasi penetapan APBD dimana saat ini prosedur penetapannya setelah dievaluasi oleh DPRD masih harus melalui evaluasi Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Apabila terdapat revisi, dan pemerintah daerah berkeberatan, akan dilakukan negosiasi dengan Depdagri bersama-sama dengan DPRD. Hal ini mengakibatkan realisasi pengeluaran dan proyek/program baru dapat dilaksanakan pada semester II-2006.

- d. Banyak pejabat daerah yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003.
4. Anggaran yang tidak terserap akan ditampung dalam Kas Daerah selanjutnya akan diperhitungkan ke anggaran tahun berikutnya.
5. Penanganan pasca gempa telah terstruktur dengan baik yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu (1) tanggap darurat sebelum ditetapkan anggaran (menggunakan dana tak tersangka), (2) tanggap rehabilitasi dengan menggunakan tambahan anggaran dan (3) tanggap rekonstruksi yang akan dianggarkan pada tahun 2007.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Bab 6: Prospek Ekonomi

PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sesuai dengan siklusnya, pada triwulan keempat perekonomian DIY cenderung kontraktif dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2006 ekonomi DIY diperkirakan akan tumbuh negatif dengan estimasi titik sebesar -1,36% (qtq). Estimasi angka pertumbuhan ini diperoleh dengan asumsi beberapa sektor ekonomi tumbuh dengan cepat yang lebih dipengaruhi oleh faktor musiman. Dibandingkan triwulan III-2006, sektor Bangunan diduga tumbuh hingga 44,99% (qtq) terutama karena meningkatnya intensitas proyek pembangunan yang didanai oleh anggaran Pemerintah Daerah menjelang akhir tahun anggaran 2006, disamping karena masih berlanjutnya proses rekonstruksi bangunan pasca gempa. Terkait dengan hal ini, sektor Listrik, Gas & Air Bersih diperkirakan tumbuh positif 6,08% (qtq). Memasuki periode liburan akhir tahun dan perayaan natal dan tahun baru, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Pengangkutan & Komunikasi diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,56% (qtq) dan 5,98% (qtq). Sedangkan sektor ekonomi yang akan tumbuh negatif pada triwulan IV-2006 adalah sektor Pertanian dengan estimasi titik sebesar -48,43% (qtq).

Tabel 6.1
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi

No	Sektor	2006**						Total ^f
		I	II	III		IV ^f		
				qtq	yoy	qtq	yoy	
1	Pertanian	4,01	13,12	-7,19	6,83	-48,43	4,44	7,11
2	Penggalian	2,88	-3,50	6,08	-1,69	1,90	-5,17	-1,98
3	Industri Pengolahan	1,57	-5,96	-3,05	-7,10	4,41	-1,53	-3,27
4	Listrik, Gas & Air Bersih	7,21	4,04	-6,21	-3,63	6,08	1,08	2,09
5	Bangunan	6,88	2,92	8,12	5,75	44,99	11,97	7,37
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,42	1,45	4,85	4,99	8,56	12,55	6,63
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,41	3,81	1,88	3,47	5,98	7,30	4,77
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,20	1,88	-12,03	-21,34	-0,04	-6,02	-5,95
9	Jasa-jasa	0,94	4,38	22,13	10,99	7,52	18,94	9,29
Total		4,12	3,47	2,24	1,69	-1,36	8,14	4,29

Keterangan:

*) Angka sementara.

***) Angka sangat sementara.

f) Angka perkiraan.

Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

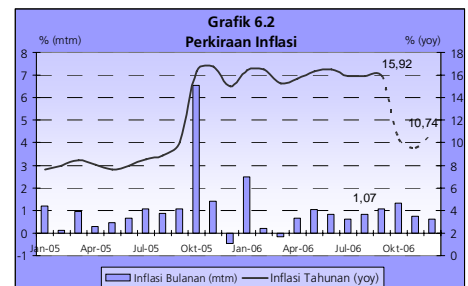
Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan tahunan, memasuki triwulan terakhir tahun 2006, perkembangan ekonomi DIY akan mengalami akselerasi yakni tumbuh hingga 8,14% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tahunan tercepat terjadi pada sektor

Jasa-jasa sebesar 18,94% (yoy), disusul oleh sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Bangunan masing-masing tumbuh 12,55% (yoy) dan 11,97% (yoy). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif secara tahunan adalah sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar -6,02% (yoy), sektor Penggalian sebesar -5,17% (yoy) dan sektor Industri Pengolahan -1,53% (yoy).

Berdasarkan angka proyeksi s.d. triwulan IV-2006, maka pada tahun 2006 perekonomian DIY diperkirakan tumbuh positif dengan estimasi titik sebesar 4,29%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2005 sebesar 4,74% dan tahun 2004 sebesar 5,12%. Pertumbuhan positif tahun 2006 ini terutama ditunjang oleh sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian dan sektor Bangunan yang masing-masing naik 9,29%, 7,11% dan 7,37%. Di samping itu, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan sektor Pengangkutan & Komunikasi turut memberikan andil positif dimana kedua sektor tersebut masing-masing mengalami pertumbuhan 6,63% dan 4,77%. Sedangkan tiga sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2006 adalah sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan sebesar -5,95%, sektor Industri Pengolahan sebesar -3,27% dan sektor Penggalian sebesar -1,98% (lihat Tabel 6.1).

PERKIRAAN INFLASI TRIWULANAN

Pada triwulan IV-2006 tekanan inflasi IHK yang akan terjadi di Kota Yogyakarta diperkirakan akan semakin menguat dengan estimasi titik sebesar 2,73% (qtq) atau dengan kisaran antara 0,67% (qtq) s.d. 4,78% (qtq). Tekanan inflasi triwulan IV-2006 diduga berasal dari cepatnya kenaikan harga barang/jasa pada kelompok Bahan Makanan dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau dengan estimasi masing-masing sebesar 5,80% (qtq) dan 3,50% (qtq). Tingginya perkiraan angka inflasi pada dua kelompok tersebut didasarkan atas dugaan adanya peningkatan permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pangan sehubungan dengan perayaan Idul Fitri 1407 H yang jatuh pada bulan Oktober 2006 dan perayaan Natal, tahun baru dan liburan pada bulan Desember 2006. Sedangkan pada kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga diperkirakan terjadi penurunan harga dengan deflasi sebesar 2,79% (qtq), yang merupakan koreksi setelah pada periode sebelumnya meningkat pesat bersamaan dengan tibanya tahun ajaran baru pada bulan Juli-September 2006.



Tabel 6.2
Perkiraan Inflasi Triwulanan

No	Kelompok	IV-2006 ^f									
		IHK			Inflasi (% qoq)			Inflasi (% yoy)			
		Bawah	Titik	Atas	Bawah	Titik	Atas	Bawah	Titik	Atas	
1	Bahan Makanan	136,63	141,67	144,56	147,45	3,69	5,80	7,92	11,18	13,45	15,72
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	148,20	150,31	153,38	156,45	1,43	3,50	5,57	13,55	15,86	18,18
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	151,47	152,02	155,12	158,22	0,36	2,41	4,46	5,80	7,96	10,12
4	Sandang	130,40	130,89	133,56	136,23	0,37	2,42	4,47	5,82	7,98	10,14
5	Kesehatan	161,79	161,46	164,75	168,05	-0,21	1,83	3,87	14,22	16,55	18,89
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	162,93	155,21	158,38	161,55	-4,74	-2,79	-0,85	9,12	11,35	13,57
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	144,77	144,11	147,05	149,99	-0,46	1,57	3,61	0,49	2,54	4,59
	UMUM	147,41	148,40	151,43	154,46	0,67	2,73	4,78	8,52	10,74	12,95

Keterangan:
f Angka perkiraan
Sumber: Angka estimasi/perkiraan.

Dengan estimasi angka inflasi triwulan IV-2006 tersebut di atas, maka s.d. akhir tahun, inflasi tahunan Kota Yogyakarta tahun 2006 diduga akan menembus batas psikologis double digit dengan estimasi titik yang mencapai 10,74% (yoy), jauh diatas perkiraan inflasi nasional 2006 sekitar 7-8%. Tingginya inflasi tahunan tersebut dipicu oleh kuatnya tekanan peningkatan harga barang/jasa pada kelompok Kesehatan dan kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga masing-masing sebesar 16,55% (yoy) dan 11,35% (yoy). Inflasi pada kelompok Bahan Makanan dan kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau juga relatif tinggi yaitu masing-masing sebesar 13,45% (yoy) dan 15,86% (yoy). Sementara itu, inflasi terendah dialami oleh kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan yang diperkirakan hanya 2,54% (yoy).

Tabel 6.3
Perkiraan Inflasi Bulanan

No	Kelompok	Inflasi ^f (mtm)						
		IHK		IHK ^f				
		Sep-06	Okt-06	Nov-06	Des-06	Okt-06	Nov-06	Des-06
1	Bahan Makanan	136,63	140,10	144,67	149,10	2,54%	3,26%	3,06%
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	148,20	148,56	149,47	152,75	0,24%	0,61%	2,19%
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	151,47	153,51	153,82	156,44	1,35%	0,20%	1,70%
4	Sandang	130,40	131,00	131,08	134,41	0,46%	0,06%	2,54%
5	Kesehatan	161,79	164,02	164,51	164,89	1,38%	0,30%	0,23%
6	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	162,93	144,38	143,30	144,93	-11,39%	-0,75%	1,14%
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	144,77	145,78	146,14	148,45	0,70%	0,25%	1,58%
	UMUM	147,41	149,36	150,50	151,43	1,32%	0,76%	0,62%

Keterangan:
f) Angka perkiraan.
Sumber: BPS Propinsi DIY, diolah.

PERKIRAAN INFLASI BULANAN

Dengan skenario moderat, angka inflasi bulanan tertinggi pada triwulan IV-2006 diperkirakan terjadi pada bulan Oktober 2006, bertepatan dengan adanya perayaan Idul Fitri. Pada bulan ini inflasi diperkirakan mencapai 1,32% (mtm). Sumber tekanan inflasi Oktober 2006 terutama didorong oleh cepatnya perkembangan harga barang/jasa pada kelompok Bahan Makanan sebesar 2,54% (mtm), disusul oleh kelompok Kesehatan dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar dengan inflasi masing-masing 1,38% (mtm) dan 1,35% (mtm).

Sedangkan deflasi diperkirakan terjadi pada kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga yaitu sebesar -11,39% (mtm).

Pada bulan November 2006, perkembangan kenaikan harga diperkirakan tidak secepat pada bulan sebelumnya, dengan angka estimasi titik sebesar 0,76% (mtm). Penurunan inflasi yang terjadi pada bulan November 2006 merupakan faktor koreksi dimana permintaan masyarakat kembali normal setelah melewati masa perayaan lebaran. Meskipun demikian khusus untuk kelompok Bahan Makanan, diduga masih terjadi inflasi yang cukup tinggi yaitu 3,26% (mtm) yang lebih disebabkan oleh pasokan bahan makanan yang masih terbatas karena belum tibanya masa panen raya. Inflasi bulanan kelompok lainnya relatif lainnya kecil kecuali kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang mengalami penurunan harga (deflasi) sebesar 0,75% (mtm).

Sementara itu, estimasi angka inflasi bulanan untuk periode Desember 2006 diperkirakan masih mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,62% (mtm). Namun apabila dilihat menurut kelompok barang/jasa, terdapa beberapa kelompok yang mengalami tekanan kenaikan harga. Seperti misalnya, kelompok Sandang diperkirakan akan terjadi inflasi sebesar 2,54% (mtm) yang dipicu oleh permintaan kebutuhan sandang yang cenderung meningkat pada setiap akhir tahun bertepatan dengan tibanya masa liburan serta perayaan Natal dan tahun baru.

Boks:

Implikasi Pencairan Dana Rekonstruksi Pasca Gempa terhadap Prospek Perekonomian DIY

Gempa tektonik dengan kekuatan 5,9 skala Richter yang melanda DIY dan sebagian wilayah Jawa Tengah telah menelan korban jiwa serta mengakibatkan kerusakan bangunan tempat tinggal dengan kerusakan yang cukup parah.

Sebagai langkah pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi korban gempa, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sejumlah dana pada APBN Perubahan 2006 yang akan digunakan sebagai dana program rekonstruksi. Sedangkan di tingkat daerah, Pemerintah Daerah akan mengalokasikan sejumlah dana untuk tanggap rekonstruksi pada tahun anggaran 2007. Dana ini merupakan tahapan akhir dari tahapan penanganan pasca gempa (Lihat Boks “Kinerja dan Hambatan Realisasi Penyerapan APBD”).

Pencairan dana rekonstruksi dari Pemerintah Pusat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Awal Juni 2006 dilakukan pendataan jumlah korban jiwa dan kerusakan rumah dengan klasifikasi roboh/hancur, rusak berat dan rusak ringan. Juni s.d Juli 2006 dilakukan validasi data bersamaan dengan pembagian jatah hidup.
2. Finalisasi data korban dan kerusakan rumah dilakukan pada September 2006 dengan menyerahkan data validasi (khusus rumah roboh dan rusak berat) ke masing-masing kecamatan untuk dicek ulang hingga tingkat RT. Data validasi akan digunakan sebagai dasar pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas). Setelah terbentuk, setiap kelompok kerja wajib

membuka rekening bank yang nantinya digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menyalurkan dana pembangunan rumah.

3. Pada bulan Oktober 2006 diperkirakan masuk tahap pencairan dana rekonstruksi rumah dan pembangunan rumah dasar tahan gempa dengan 2 alternatif yaitu dibagi rata atau dengan skala prioritas.

Hingga laporan ini diturunkan, Pemerintah Pusat telah menyalurkan Dana Rekonstruksi untuk wilayah DIY dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar Rp712 miliar dan tahap II sebesar Rp945 miliar. Dana rekonstruksi tahap I dan II diharapkan bisa sampai kepada masyarakat paling lambat Desember 2006. Jika melewati batas itu, pemerintah pusat akan menarik kembali dana tersebut ke kas negara.

Terhadap perekonomian, realisasi pencairan dana rekonstruksi dapat memberikan implikasi positif maupun negatif. Pada kutub positif, pencairan dana rekonstruksi dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi DIY karena tersedianya *fresh money*, bagaikan darah segar yang akan mengalir urat nadi perekonomian DIY, yang sempat tersumbat akibat gempa. Momentum perputaran roda perekonomian akan dimulai dari kegiatan konsumsi masyarakat yang naik pesat terutama pada bahan bangunan dan terbukanya lapangan pekerjaan di sektor bangunan.

Sementara itu pada kutub negatif, melimpahnya uang di masyarakat dalam kurun waktu yang relatif singkat dan bersamaan akan

langsung menciptakan kelebihan permintaan (*excess demand*), yang pada gilirannya berujung pada menguatnya tekanan kenaikan inflasi (*demand pull inflation*), yang tercermin dari angka inflasi Kota Yogyakarta tahun 2006 yang diproyeksikan mencapai *double digit*. Tingginya tingkat inflasi tersebut tentunya merupakan hal yang kurang menggembirakan bagi masyarakat DIY, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tetap karena daya belinya akan merosot.

Selain itu bermuaranya dana rekonstruksi pada sistem perbankan DIY dalam jumlah yang sangat besar, meskipun memerlukan tenggat waktu

tertentu, pada akhirnya akan semakin menghambat berjalannya fungsi intermediasi perbankan DIY, yang sesungguhnya telah terjadi gejala kemunduran sejak kenaikan BBM 1 Oktober 2005 sebagaimana ditandai oleh perkembangan LDR yang cenderung menurun (lihat lampiran). Dengan masuknya uang sebesar Rp1,7 triliun ke wilayah DIY jumlah DPK diperkirakan akan tumbuh sangat pesat sedangkan perkembangan jumlah Kredit yang disalurkan oleh perbankan DIY relatif stabil sehingga persentase LDR akan semakin merosot s.d akhir tahun 2006, yang semula diharapkan dapat mencapai 60% oleh pihak legislatif.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan.

**PDRB DIY Menurut Sektor
Atas Dasar Harga Berlaku**

Miliar Rp

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	I-2006	II-2006	III-2006
1	Pertanian	781	948	1.042	1.188	1.318	1.997	2.588	2.771	2.920	3.108	3.168	3.635	3.991	1.907	1.423	1.333
2	Penggalian	59	90	102	109	116	158	171	117	206	240	266	183	198	51	49	55
3	Industri Pengolahan	511	707	793	921	1.010	1.504	1.875	2.167	2.400	2.618	2.830	3.342	3.588	993	949	937
4	Listrik, Gas & Air Bersih	20	27	35	43	50	74	85	100	132	181	232	268	322	92	94	88
5	Bangunan	422	468	565	642	698	750	827	942	1.039	1.219	1.452	1.744	2.320	553	602	684
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	624	758	880	1.007	1.148	1.815	2.189	2.632	2.807	3.108	3.515	4.163	4.867	1.374	1.359	1.458
7	Pengangkutan & Komunikasi	467	547	629	706	793	1.009	1.113	1.153	1.501	1.814	1.964	2.142	2.590	755	771	786
8	Kepulauan, Persewaan & Jasa Perusahaan	416	476	566	643	703	950	1.033	1.174	1.217	1.511	1.777	2.188	2.522	692	714	641
9	Jasa-jasa	835	949	1.098	1.244	1.397	1.607	1.884	2.424	2.759	3.076	3.490	4.360	5.020	1.531	1.637	2.039
	PDRB	4.136	4.970	5.710	6.504	7.234	9.864	11.763	13.481	14.982	16.874	18.693	22.024	25.419	7.947	7.598	8.021

Keterangan:

Sumber: BPS Propinsi DIY.

**PDRB DIY Menurut Sektor
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000**

No	Sektor	Miliar Rp															
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	I-2006	II-2006	III-2006
1	Pertanian	2.407	2.463	2.569	2.727	2.821	2.654	2.512	2.771	2.885	2.936	2.947	3.053	3.186	1.191	923	856
2	Penggalian	115	124	132	136	139	117	117	117	118	118	119	120	122	30	29	30
3	Industri Pengolahan	1.650	1.939	2.051	2.242	2.267	2.119	2.195	2.167	2.200	2.262	2.325	2.401	2.463	626	589	571
4	Listrik, Gas & Air Bersih	54	64	69	77	84	83	94	100	111	129	135	145	153	39	40	37
5	Bangunan	994	1.061	1.164	1.255	1.303	870	899	942	972	1.053	1.178	1.284	1.395	305	327	353
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.104	2.278	2.477	2.693	2.798	2.494	2.560	2.632	2.765	2.915	3.100	3.279	3.445	900	870	913
7	Pengangkutan & Komunikasi	885	950	1.021	1.090	1.125	1.021	1.044	1.153	1.241	1.329	1.437	1.582	1.673	422	430	438
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	940	1.005	1.132	1.232	1.285	1.188	1.197	1.174	1.227	1.315	1.409	1.501	1.623	401	408	359
9	Jasa-jasa	1.967	2.121	2.349	2.517	2.636	2.295	2.351	2.424	2.537	2.632	2.710	2.781	2.850	659	695	849
	PDRB	11.117	12.006	12.964	13.967	14.458	12.842	12.969	13.481	14.056	14.689	15.361	16.146	16.911	4.573	4.310	4.407

Keterangan:

Angka 1993-1999 merupakan hasil backcasting

Sumber: BPS Propinsi DIY.

**Realisasi APBD Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
Triwulan II-2006**

No	Uraian	Propinsi		Kota Yogyakarta		Kab. Sleman		Kab. Bantul		Kab. Kulonprogo		Kab. Gunungkidul							
		APBD	Realisasi	APBD	Realisasi	APBD	Realisasi	APBD	Realisasi	APBD	Realisasi	APBD	Realisasi						
I	PENDAPATAN	885.074	443.365	50,09	513.883	48,49	484.585	334.820	69,09	597.788	303.355	50,75	431.648	219.468	50,84	517.620	280.703	54,23	
1	Pendapatan Asli Daerah	433.757	431.578	99,50	91.626	56,94	66.511	41.680	62,67	39.330	23.016	58,52	28.891	14.764	51,10	25.485	15.471	60,71	
2	Dana Perimbangan	448.979	10.273	2,29	403.657	192,527	47,70	395.844	74,05	551.956	280.339	50,79	401.907	203.348	50,60	490.535	264.202	53,86	
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.338	1.514	64,76	18.600	4,500	24,19	22.230	-	6.502	-	-	850	1.356	159,53	1.600	1.030	64,38	
II	BELANJA	968.386	256.431	26,48	571.236	186,728	32,69	571.010	212,087	606.237	192.392	31,74	475.512	127.769	26,87	518.924	136.050	26,22	
1	Belanja Pegawai	320.333	136.534	42,62	316.652	109,974	34,73	344.799	149,804	43,45	385.293	146,424	38,00	247.190	98,919	40,02	284.590	110,151	38,71
2	Belanja Barang dan Jasa	132.613	16.616	12,53	66.114	19,334	29,24	82.943	23,762	28,65	60.432	15,467	25,59	72.404	16,003	22,10	67.727	10,554	15,58
3	Belanja Perjalanan Dinas	38.932	4.415	11,34	13.125	4,518	34,42	4.737	1,341	28,31	9,243	1,543	16,69	6.817	1,256	18,42	7.976	1,344	16,85
4	Belanja Pemeliharaan	60.164	43.130	71,69	18.362	5,645	30,74	7.622	1,708	22,41	11.578	3,636	31,40	27.972	1,763	6,30	8.961	1,676	18,70
5	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal	146.482	243	0,17	94.371	21,894	23,20	82.679	19,274	23,31	91.545	469	0,51	66.966	211	0,32	102.179	2,735	2,68
7	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	254.862	46.724	18,33	52.612	18,945	36,01	45.626	14,619	32,04	43.529	23,265	53,45	49.653	9,017	18,16	42.741	9,504	22,24
8	Belanja Tidak Tersangka	15.000	8.769	58,46	10.000	6,418	64,18	2.604	1,579	60,64	4,617	1,588	34,39	4.510	600	13,30	4.750	86	1,81
III	SURPLUS (DEFISIT)	(83.312)	186.934	(224,38)	(57.353)	62,469	(108,92)	(86,425)	(142,01)	(8,449)	110,963	(1,313,33)	(43,864)	91,699	(209,05)	(1,304)	144,653	(11,093,02)	
IV	PEMBIAYAAN	83.311	(50)	(0,06)	57.353	73,186	127,61	34,036	47,710	140,18	8,448	419,85	43,864	1,054	2,40	1.303	24,611	1.888,80	
1	Penerimaan	116.711	-	-	66.238	75.604	114,14	42.373	48,978	115,59	11.189	36,765	50,430	1,054	2,09	10.000	29,675	296,75	
2	Pengeluaran	33.400	50	0,15	8.885	2,418	27,21	8.337	1,268	15,21	2,741	1,296	6.566	-	-	8.697	5,064	58,23	

Sumber: BAPEDA Propinsi, Kabupaten/Kota

Indikator Perbankan - Propinsi DIY

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I.	ASET	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920
	Jenis Bank	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920
	1. Bank Umum	10.944	11.085	11.592	12.084	12.382	12.600	13.399	13.861
	2. Bank Perkreditan Rakyat	907	936	986	1.018	1.015	1.019	1.036	1.059
	Jenis Usaha Bank	11.850	12.020	12.579	13.102	13.397	13.620	14.435	14.920
	1. Konvensional	11.635	11.789	12.321	12.808	13.102	13.319	14.133	14.579
2. Syariah	215	231	258	294	294	301	303	342	
II.	DANA PIHAK KETIGA	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418
	Jenis Bank	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418
	1. Giro	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426
	a. Bank Umum	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426
	2. Tabungan	5.588	5.472	5.457	5.529	5.606	5.324	5.650	5.876
	a. Bank Umum	5.397	5.282	5.255	5.312	5.395	5.117	5.418	5.662
	b. Bank Perkreditan Rakyat	191	190	201	217	211	208	231	215
	3. Deposito	3.353	3.619	3.977	4.236	4.735	4.980	5.136	5.116
	a. Bank Umum	2.914	3.156	3.485	3.727	4.221	4.448	4.630	4.560
	b. Bank Perkreditan Rakyat	439	462	492	510	514	532	506	556
	Jenis Usaha Bank	10.845	10.985	11.522	11.902	12.190	12.390	13.235	13.418
	1. Giro	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426
	a. Konvensional	1.899	1.891	2.083	2.121	1.833	2.064	2.428	2.394
	b. Syariah	5	3	6	15	16	22	22	31
	2. Tabungan	5.588	5.472	5.457	5.529	5.606	5.324	5.650	4.815
	a. Konvensional	5.499	5.376	5.362	5.423	5.492	5.203	5.516	4.672
	b. Syariah	89	96	95	106	115	121	133	143
	3. Deposito	3.353	3.619	3.977	4.236	4.735	4.980	5.136	6.178
	a. Konvensional	3.252	3.511	3.863	4.106	4.619	4.877	5.038	6.077
	b. Syariah	101	108	113	130	116	103	98	101
III.	KREDIT	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	1. Jenis Penggunaan	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	Jenis Bank	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	a. Modal Kerja	2.184	2.287	2.437	2.574	2.667	2.720	2.746	2.900
	1) Bank Umum	1.810	1.893	2.019	2.148	2.252	2.320	2.350	2.505
	2) Bank Perkreditan Rakyat	375	394	417	426	415	401	395	395
	b. Investasi	644	697	795	865	872	875	996	1.066
	1) Bank Umum	627	680	775	840	848	843	957	1.022
	2) Bank Perkreditan Rakyat	17	17	20	25	25	32	40	44
	c. Konsumsi	2.301	2.470	2.772	3.021	3.145	3.192	3.203	3.310
	1) Bank Umum	2.001	2.131	2.409	2.634	2.752	2.789	2.791	2.882
	2) Bank Perkreditan Rakyat	300	339	363	387	392	403	412	427
	Jenis Usaha Bank	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	a. Modal Kerja	2.184	2.287	2.437	2.574	2.667	2.720	2.746	2.900
1) Konvensional	2.141	2.236	2.375	2.503	2.586	2.633	2.654	2.792	
2) Syariah	44	51	62	70	81	87	91	108	
b. Investasi	644	697	795	865	872	875	996	1.066	
1) Konvensional	614	664	758	822	830	833	954	989	
2) Syariah	31	33	37	44	42	42	43	77	
c. Konsumsi	2.301	2.470	2.772	3.021	3.145	3.192	3.203	3.310	
1) Konvensional	2.188	2.352	2.634	2.862	2.963	2.995	2.996	3.088	
2) Syariah	113	117	138	159	181	197	207	221	

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
	2. Kolektibilitas								
	<u>Jenis Bank</u>	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	a. Lancar	4.879	5.121	5.642	5.809	6.146	5.848	5.727	6.374
	1) Bank Umum	4.230	4.426	4.907	5.038	5.386	5.093	4.992	5.616
	2) Bank Perkreditan Rakyat	649	695	735	771	760	755	735	758
	b. Dalam Perhatian Khusus	146	172	183	421	310	614	845	439
	1) Bank Umum	146	172	183	421	310	614	845	439
	c. Kurang Lancar	49	97	55	113	98	119	128	163
	1) Bank Umum	32	70	33	91	75	83	74	122
	2) Bank Perkreditan Rakyat	18	27	22	22	23	36	54	41
	d. Diragukan	27	37	44	53	41	66	109	115
	1) Bank Umum	8	15	18	26	16	37	68	66
	2) Bank Perkreditan Rakyat	19	22	27	27	25	29	41	49
	e. Macet	28	26	80	64	89	141	136	185
	1) Bank Umum	23	20	63	46	64	125	119	166
	2) Bank Perkreditan Rakyat	6	6	17	18	25	16	17	19
	<u>Jenis Usaha Bank</u>	5.130	5.454	6.004	6.460	6.684	6.787	6.945	7.276
	a. Lancar	4.879	5.121	5.642	5.809	6.146	5.848	5.727	6.374
	1) Konvensional	4.697	4.929	5.415	5.546	5.875	5.558	5.418	6.009
	2) Syariah	182	192	226	262	271	290	309	365
	b. Dalam Perhatian Khusus	146	172	183	421	310	614	845	439
	1) Konvensional	143	169	176	415	287	588	826	409
	2) Syariah	3	4	7	6	24	26	20	30
	c. Kurang Lancar	49	97	55	113	98	119	128	163
	1) Konvensional	47	94	54	110	91	112	121	159
	2) Syariah	2	3	2	3	7	7	7	5
	d. Diragukan	27	37	44	53	41	66	109	115
	1) Konvensional	27	35	43	52	39	63	106	112
	2) Syariah	0	2	1	1	2	3	4	3
	e. Macet	28	26	80	64	89	141	136	185
	1) Konvensional	28	26	78	63	88	139	134	181
	2) Syariah	0	0	2	1	1	1	2	4
	IV. RASIO								
	1. Loan to Deposit Ratio (%)								
	<u>Jenis Bank</u>	47,30	49,65	52,11	54,28	54,83	54,78	52,47	54,23
	a. Bank Umum	43,45	45,53	48,05	50,31	51,04	51,08	48,79	50,68
	b. Bank Perkreditan Rakyat	109,88	114,94	115,51	115,24	114,69	113,06	114,87	112,49
	<u>Jenis Usaha Bank</u>	47,30	49,65	52,11	54,28	54,83	54,78	52,47	54,23
	a. Konvensional	46,41	48,74	51,00	53,10	53,42	53,20	50,87	52,27
	b. Syariah	95,89	96,88	110,83	108,65	123,47	132,43	134,62	147,51
	2. Non Performing Loans								
	a. Nominal (Miliar Rp)								
	<u>Jenis Bank</u>	105	160	180	229	227	325	373	463
	1) Bank Umum	62	105	114	163	155	245	261	354
	2) Bank Perkreditan Rakyat	42	55	66	67	72	81	112	109
	<u>Jenis Usaha Bank</u>	105	160	180	229	227	325	373	463
	1) Konvensional	102	155	175	225	218	315	360	451
	2) Syariah	2	5	4	5	9	11	13	12
	b. Rasio (%)								
	<u>Jenis Bank</u>	2,04	2,93	2,99	3,55	3,40	4,80	5,37	6,37
	1) Bank Umum	1,40	2,24	2,19	2,90	2,65	4,11	4,27	5,52
	2) Bank Perkreditan Rakyat	6,11	7,31	8,19	7,96	8,70	9,66	13,23	12,60
	<u>Jenis Usaha Bank</u>	2,04	2,93	2,99	3,55	3,40	4,80	5,37	6,37
	1) Konvensional	2,07	2,95	3,04	3,64	3,42	4,87	5,45	6,57
	2) Syariah	1,15	2,54	1,83	1,66	3,08	3,26	3,70	2,92

Indikator Bank Umum - Propinsi DIY

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	KANTOR PELAYANAN	595	618	626	673	680	700	729	738
	1. Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1	1	1
	2. Kantor Cabang	41	40	40	41	41	41	41	41
	3. Kantor Cabang Pembantu	73	74	76	99	98	100	104	104
	4. Kantor Kas	124	127	128	127	127	139	143	153
	5. Kas Mobil	8	8	8	5	5	5	5	5
	6. Payment Point	23	19	19	24	24	25	25	24
	7. Anjungan Tunai Mandiri	325	349	354	376	384	389	410	410
	8. Jumlah Karyawan	3.882	3.881	3.956	4.077	4.082	4.171	4.222	4.208
II	ASET	10.944	11.085	11.592	12.084	12.382	12.600	13.399	13.861
III	DANA PIHAK KETIGA	10.215	10.333	10.829	11.175	11.464	11.651	12.498	12.648
	1. Giro	1.904	1.894	2.089	2.136	1.848	2.086	2.450	2.426
	a. Rupiah	1.585	1.576	1.744	1.718	1.492	1.737	2.091	2.042
	b. Valas	319	318	345	418	357	349	359	384
	2. Tabungan	5.397	5.282	5.255	5.312	5.395	5.117	5.418	5.662
	a. Rupiah	5.395	5.280	5.253	5.308	5.390	5.112	5.413	5.656
	b. Valas	2	2	3	4	5	5	5	5
	3. Deposito	2.914	3.156	3.485	3.727	4.221	4.448	4.630	4.560
	a. Rupiah	2.659	2.843	3.180	3.411	3.908	4.126	4.289	4.221
	b. Valas	256	313	305	316	313	322	341	339
IV	KREDIT	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409
	1. Jenis Penggunaan	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409
	a. Modal Kerja	1.810	1.893	2.019	2.148	2.252	2.320	2.350	2.505
	i. Rupiah	1.599	1.650	1.767	1.894	1.996	2.104	2.163	2.303
	ii. Valas	211	243	253	254	256	216	187	202
	b. Investasi	627	680	775	840	848	843	957	1.022
	i. Rupiah	611	667	765	813	813	813	927	995
	ii. Valas	16	14	11	27	34	29	30	27
	c. Konsumsi	2.001	2.131	2.409	2.634	2.752	2.789	2.791	2.882
	i. Rupiah	2.001	2.131	2.409	2.634	2.752	2.788	2.789	2.881
	ii. Valas	0	0	0	0	0	1	1	1
	2. Sektor Ekonomi	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409
	a. Pertanian	173	156	164	167	176	194	199	202
	b. Pertambangan	8	11	22	22	22	21	20	21
	c. Industri	494	538	557	582	573	570	543	588
	d. Listrik, Gas & Air	1	1	1	1	1	2	2	2
	e. Konstruksi	151	166	170	183	183	185	197	233
	f. Perdagangan	1.098	1.122	1.223	1.301	1.389	1.428	1.511	1.592
	g. Angkutan	87	93	91	89	86	82	84	79
	h. Jasa Dunia	270	323	385	453	476	476	544	562
	i. Jasa Sosial	117	121	131	140	139	141	144	182
	j. Lainnya	2.041	2.174	2.458	2.684	2.807	2.852	2.855	2.948
	3. Kolektibilitas	4.438	4.704	5.203	5.622	5.852	5.951	6.098	6.409
	a. Lancar	4.230	4.426	4.907	5.038	5.386	5.093	4.992	5.616
	b. Dalam Perhatian Khusus	146	172	183	421	310	614	845	439
	c. Kurang Lancar	32	70	33	91	75	83	74	122
	d. Diragukan	8	15	18	26	16	37	68	66
	e. Macet	23	20	63	46	64	125	119	166
V	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	62	105	114	163	155	245	261	354
	b. Rasio (%)	1,40	2,24	2,19	2,90	2,65	4,11	4,27	5,52
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	43,45	45,53	48,05	50,31	51,04	51,08	48,79	50,68

Indikator Bank Umum - Kabupaten Bantul

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	469	443	470	508	519	528	598	590
II	DANA PIHAK KETIGA	397	410	415	453	440	494	576	560
	1. Giro	32	39	44	66	30	58	107	83
	a. Rupiah	32	39	44	66	29	57	107	83
	b. Valas	0	0	0	0	1	1	0	0
	2. Tabungan	325	315	324	336	352	334	373	398
	a. Rupiah	325	315	324	336	351	333	372	398
	b. Valas	0	0	0	0	1	0	1	1
	3. Deposito	40	56	47	51	58	102	96	78
	a. Rupiah	40	56	47	51	58	102	96	78
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KREDIT	324	338	360	371	398	411	415	431
	1. Jenis Penggunaan	324	338	360	371	398	411	415	431
	a. Modal Kerja	129	129	136	146	162	183	182	183
	i. Rupiah	129	129	136	146	162	183	182	183
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Investasi	49	50	53	56	57	48	49	51
	i. Rupiah	49	50	53	56	57	48	49	51
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Konsumsi	146	159	171	169	178	179	184	197
	i. Rupiah	146	159	171	169	178	179	184	197
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Sektor Ekonomi	324	338	360	371	398	411	415	431
	a. Pertanian	35	34	35	34	42	65	60	57
	b. Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Industri	13	14	17	17	17	14	14	13
	d. Listrik, Gas & Air	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Konstruksi	1	2	2	2	1	1	2	1
	f. Perdagangan	83	85	89	98	105	104	107	107
	g. Angkutan	1	1	1	1	1	1	1	0
	h. Jasa Dunia	41	42	44	48	50	35	36	43
	i. Jasa Sosial	1	1	1	1	1	1	1	1
	j. Lainnya	148	161	173	171	181	190	194	207
	3. Kolektibilitas	324	338	360	371	398	411	415	431
	a. Lancar	306	315	338	348	371	380	305	353
	b. Dalam Perhatian Khusus	13	16	17	17	21	21	92	43
	c. Kurang Lancar	2	3	1	2	2	3	6	11
	d. Diragukan	1	1	1	2	2	3	4	13
	e. Macet	2	2	3	3	2	3	7	10
IV	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	5	7	6	7	6	9	18	34
	b. Rasio (%)	1,47	1,97	1,59	1,76	1,50	2,26	4,26	7,95
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	81,54	82,43	86,83	81,86	90,45	83,03	72,03	76,94

Indikator Bank Umum - Kabupaten Gunungkidul

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	283	282	298	345	330	353	382	388
II	DANA PIHAK KETIGA	244	236	252	279	269	325	361	357
	1. Giro	74	72	90	97	82	150	178	162
	a. Rupiah	74	72	90	97	82	150	178	162
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Tabungan	153	147	146	167	167	155	164	176
	a. Rupiah	153	147	146	167	167	155	164	176
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Deposito	16	17	16	16	21	21	19	19
	a. Rupiah	16	17	16	16	21	21	19	19
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KREDIT	235	242	265	278	285	295	310	328
	1. Jenis Penggunaan	235	242	265	278	285	295	310	328
	a. Modal Kerja	80	78	83	89	91	95	100	106
	i. Rupiah	80	78	83	89	91	95	100	106
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Investasi	23	25	30	32	32	33	33	38
	i. Rupiah	23	25	30	32	32	33	33	38
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Konsumsi	132	138	152	157	161	167	177	184
	i. Rupiah	132	138	152	157	161	167	177	184
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Sektor Ekonomi	235	242	265	278	285	295	310	328
	a. Pertanian	8	8	10	10	10	10	11	11
	b. Pertambangan	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Industri	2	2	2	2	3	3	3	3
	d. Listrik, Gas & Air	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Konstruksi	1	1	1	1	1	1	1	1
	f. Perdagangan	82	82	89	96	98	102	106	116
	g. Angkutan	1	1	1	1	1	1	1	1
	h. Jasa Dunia	7	7	7	7	7	8	8	8
	i. Jasa Sosial	1	1	2	2	2	2	2	2
	j. Lainnya	133	139	153	158	163	168	178	185
	3. Kolektibilitas	235	242	265	278	285	295	310	328
	a. Lancar	226	232	254	267	272	279	281	304
	b. Dalam Perhatian Khusus	6	7	7	7	9	11	20	11
	c. Kurang Lancar	1	1	1	1	1	1	3	3
	d. Diragukan	1	1	1	1	1	2	3	4
	e. Macet	1	1	2	2	2	2	3	6
IV	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	2	3	4	4	4	5	10	13
	b. Rasio (%)	1,06	1,37	1,42	1,39	1,33	1,61	3,11	4,01
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	96,33	102,64	105,05	99,44	105,58	90,57	86,04	91,90

Indikator Bank Umum - Kabupaten Kulonprogo

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	314	332	330	351	343	391	426	439
II	DANA PIHAK KETIGA	289	312	313	329	316	368	409	409
	1. Giro	17	35	33	45	27	55	48	54
	a. Rupiah	17	35	33	45	27	55	48	54
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Tabungan	243	227	232	237	256	243	255	262
	a. Rupiah	243	227	232	237	256	243	255	262
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Deposito	28	50	48	47	32	70	105	93
	a. Rupiah	28	50	48	47	32	70	105	93
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
III	KREDIT	207	225	243	256	263	273	287	306
	1. Jenis Penggunaan	207	225	243	256	263	273	287	306
	a. Modal Kerja	70	70	76	82	83	83	87	97
	i. Rupiah	70	70	76	82	83	83	87	97
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Investasi	17	30	30	30	29	29	28	29
	i. Rupiah	17	30	30	30	29	29	28	29
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Konsumsi	121	125	136	144	151	161	172	180
	i. Rupiah	121	125	136	144	151	161	172	180
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Sektor Ekonomi	207	225	243	256	263	273	287	306
	a. Pertanian	16	16	17	20	19	19	20	21
	b. Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Industri	2	2	2	2	2	2	2	2
	d. Listrik, Gas & Air	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Konstruksi	2	1	1	2	1	2	2	4
	f. Perdagangan	45	45	49	52	54	56	58	63
	g. Angkutan	0	14	15	14	14	12	13	12
	h. Jasa Dunia	1	1	1	1	1	1	2	2
	i. Jasa Sosial	1	1	1	1	1	1	1	1
	j. Lainnya	139	144	156	163	171	179	190	200
	3. Kolektibilitas	207	225	243	256	263	273	287	306
	a. Lancar	201	215	231	244	251	259	272	290
	b. Dalam Perhatian Khusus	4	7	8	4	4	6	7	8
	c. Kurang Lancar	1	1	1	4	1	1	1	1
	d. Diragukan	0	1	1	2	1	1	1	1
	e. Macet	1	1	2	2	6	6	6	6
IV	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	2	3	3	8	8	8	8	8
	b. Rasio (%)	1,19	1,21	1,21	3,02	3,08	2,94	2,90	2,57
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	71,81	72,09	77,46	77,80	83,28	74,12	70,28	74,73

Indikator Bank Umum - Kabupaten Sleman

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	1.642	1.667	1.679	1.837	1.846	1.901	1.902	2.007
II	DANA PIHAK KETIGA	1.592	1.608	1.604	1.784	1.787	1.849	1.866	1.905
	1. Giro	194	229	196	283	256	287	284	273
	a. Rupiah	166	200	168	251	221	250	246	232
	b. Valas	29	28	27	33	35	37	38	41
	2. Tabungan	1.049	1.028	1.027	1.028	1.065	1.032	1.053	1.102
	a. Rupiah	1.049	1.028	1.027	1.028	1.065	1.032	1.053	1.102
	b. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Deposito	349	351	381	473	466	530	529	530
	a. Rupiah	326	332	362	452	421	503	502	503
	b. Valas	23	19	19	21	44	26	27	27
III	KREDIT	664	716	785	838	856	884	923	1.003
	1. Jenis Penggunaan	664	716	785	838	856	884	923	1.003
	a. Modal Kerja	332	361	378	379	384	394	406	464
	i. Rupiah	299	317	333	350	356	369	380	437
	ii. Valas	33	44	45	29	28	26	26	27
	b. Investasi	77	85	108	136	130	127	129	132
	i. Rupiah	77	85	108	118	114	113	116	119
	ii. Valas	0	0	0	18	16	14	13	12
	c. Konsumsi	254	271	298	324	342	363	388	407
	i. Rupiah	254	271	298	324	342	363	388	407
	ii. Valas	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Sektor Ekonomi	664	716	785	838	856	884	923	1.003
	a. Pertanian	49	40	41	39	36	32	33	33
	b. Pertambangan	6	9	20	20	19	19	18	18
	c. Industri	52	65	64	67	64	63	63	79
	d. Listrik, Gas & Air	0	0	0	0	0	0	0	0
	e. Konstruksi	105	116	117	119	118	117	118	119
	f. Perdagangan	125	139	169	188	196	210	221	248
	g. Angkutan	1	1	2	2	1	1	1	1
	h. Jasa Dunia	46	50	48	49	46	43	44	58
	i. Jasa Sosial	15	12	12	15	16	18	18	20
	j. Lainnya	263	282	313	339	359	380	406	426
	3. Kolektibilitas	664	716	785	838	856	884	923	1.003
	a. Lancar	636	681	751	592	809	641	659	930
	b. Dalam Perhatian Khusus	20	20	16	230	29	222	234	41
	c. Kurang Lancar	5	11	3	2	12	2	5	4
	d. Diragukan	1	1	4	2	3	5	6	4
	e. Macet	2	3	11	13	3	14	19	24
IV	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	8	16	18	17	17	22	30	32
	b. Rasio (%)	1,15	2,19	2,29	2,04	2,04	2,47	3,22	3,17
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	41,69	44,56	48,95	46,99	47,87	47,81	49,44	52,65

Indikator Bank Umum - Kota Yogyakarta

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	8.236	8.360	8.815	9.043	9.344	9.427	10.092	10.437
II	DANA PIHAK KETIGA	7.694	7.767	8.245	8.329	8.652	8.613	9.287	9.417
	1. Giro	1.586	1.520	1.726	1.645	1.453	1.536	1.832	1.854
	a. Rupiah	1.296	1.230	1.409	1.260	1.132	1.225	1.511	1.511
	b. Valas	291	290	317	386	321	311	321	343
	2. Tabungan	3.627	3.565	3.526	3.544	3.555	3.353	3.573	3.723
	a. Rupiah	3.625	3.562	3.523	3.540	3.551	3.349	3.569	3.718
	b. Valas	2	2	3	4	4	4	5	5
	3. Deposito	2.481	2.683	2.993	3.139	3.644	3.725	3.881	3.841
	a. Rupiah	2.248	2.388	2.707	2.845	3.375	3.429	3.567	3.528
	b. Valas	233	294	286	295	269	295	314	313
III	KREDIT	3.009	3.183	3.551	3.879	4.051	4.089	4.163	4.342
	1. Jenis Penggunaan	3.009	3.183	3.551	3.879	4.051	4.089	4.163	4.342
	a. Modal Kerja	1.198	1.256	1.345	1.452	1.532	1.563	1.575	1.656
	i. Rupiah	1.021	1.056	1.138	1.227	1.304	1.373	1.414	1.480
	ii. Valas	177	200	208	225	228	190	161	175
	b. Investasi	462	489	554	587	599	606	717	772
	i. Rupiah	446	476	543	577	581	590	700	757
	ii. Valas	16	14	11	9	19	15	16	15
	c. Konsumsi	1.349	1.438	1.652	1.840	1.919	1.920	1.871	1.915
	i. Rupiah	1.349	1.438	1.652	1.840	1.919	1.918	1.870	1.914
	ii. Valas	0	0	0	0	0	1	1	1
	2. Sektor Ekonomi	3.009	3.183	3.551	3.879	4.051	4.089	4.163	4.342
	a. Pertanian	64	57	62	65	68	68	76	79
	b. Pertambangan	0	0	0	1	1	1	1	2
	c. Industri	425	456	473	494	488	489	461	491
	d. Listrik, Gas & Air	1	1	1	1	1	2	2	2
	e. Konstruksi	42	46	48	58	63	64	73	107
	f. Perdagangan	762	771	828	866	937	957	1.019	1.059
	g. Angkutan	84	76	73	72	69	67	68	65
	h. Jasa Dunia	175	222	285	348	372	389	455	451
	i. Jasa Sosial	98	105	115	120	119	119	121	158
	j. Lainnya	1.357	1.448	1.664	1.853	1.934	1.935	1.886	1.930
	3. Kolektibilitas	3.009	3.183	3.551	3.879	4.051	4.089	4.163	4.342
	a. Lancar	2.861	2.983	3.332	3.588	3.683	3.535	3.475	3.739
	b. Dalam Perhatian Khusus	103	123	135	163	248	353	493	336
	c. Kurang Lancar	23	53	27	82	60	76	59	104
	d. Diragukan	4	11	11	19	10	27	53	44
	e. Macet	17	12	46	26	50	98	84	119
IV	RASIO								
	1. Non Performing Loans								
	a. Nominal	45	77	84	128	120	201	195	267
	b. Rasio (%)	1,49	2,42	2,36	3,29	2,95	4,91	4,69	6,15
	2. Loan to Deposit Ratio (%)	39,10	40,98	43,06	46,57	46,82	47,47	44,83	46,11

Indikator BPR - Propinsi DIY

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	907	936	986	1.018	1.015	1.019	1.036	1.059
II	DANA PIHAK KETIGA	627	652	693	727	726	740	737	771
	1. Tabungan	191	190	201	217	211	208	231	215
	2. Deposito	439	462	492	510	514	532	506	556
III	KREDIT	692	750	800	838	832	836	847	867
	1. Jenis Penggunaan	692	750	800	838	832	836	847	867
	a. Modal Kerja	375	394	417	426	415	401	395	395
	b. Investasi	17	17	20	25	25	32	40	44
	c. Konsumsi	300	339	363	387	392	403	412	427
	2. Sektor Ekonomi	692	750	800	838	832	836	847	867
	a. Pertanian	15	15	16	17	17	17	18	18
	b. Industri	12	13	13	14	13	14	14	13
	c. Perdagangan	282	293	303	314	305	295	293	290
	d. Jasa-jasa	73	83	89	96	95	95	98	104
	e. Lain-lain	310	346	379	397	402	415	423	442
	3. Kolektibilitas	692	750	800	838	832	836	847	867
	a. Lancar	649	695	735	771	760	755	735	758
	b. Kurang Lancar	18	27	22	22	23	36	54	41
	c. Diragukan	19	22	27	27	25	29	41	49
	d. Macet	6	6	17	18	25	16	17	19
IV	RASIO								
	1. Loan to Deposit Ratio (%)	109,88	114,94	115,51	115,24	114,69	113,06	114,87	112,49
	2. Non Performing Loans								
	a. Nominal	42	55	66	67	72	81	112	109
	b. Rasio (%)	6,11	7,31	8,19	7,96	8,70	9,66	13,23	12,60

Indikator BPR - Kabupaten Bantul

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	212	215	215	220	223	231	226	230
II	DANA PIHAK KETIGA	138	143	148	155	162	167	166	165
	1. Tabungan	42	43	41	41	45	47	49	48
	2. Deposito	96	100	106	114	117	120	117	117
III	KREDIT	158	165	170	177	173	180	178	178
	1. Jenis Penggunaan	158	165	170	177	173	180	178	178
	a. Modal Kerja	89	92	91	95	92	94	92	89
	b. Investasi	6	5	7	9	9	12	15	14
	c. Konsumsi	63	68	72	74	73	74	71	76
	2. Sektor Ekonomi	158	165	170	177	173	180	178	178
	a. Pertanian	3	3	3	4	4	3	4	4
	b. Industri	4	4	5	5	6	7	7	5
	c. Perdagangan	72	72	70	73	70	72	72	69
	d. Jasa-jasa	16	17	19	21	21	22	21	23
	e. Lain-lain	64	68	72	74	73	75	73	77
	3. Kolektibilitas	158	165	170	177	173	180	178	178
	a. Lancar	140	140	147	153	147	148	140	139
	b. Kurang Lancar	7	12	5	6	6	10	15	11
	c. Diragukan	9	9	14	13	10	11	12	16
	d. Macet	3	3	3	5	10	11	11	13
IV	RASIO								
	1. Loan to Deposit Ratio (%)	86,97	86,85	87,03	87,58	93,24	93,04	93,07	92,50
	2. Non Performing Loan								
	a. Nominal	19	24	23	24	26	32	38	40
	b. Rasio (%)	11,86	14,80	13,35	13,55	15,27	17,67	21,53	22,21

Indikator BPR - Kabupaten Gunungkidul

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	26	28	30	32	33	42	43	44
II	DANA PIHAK KETIGA	15	16	17	17	17	20	20	21
	1. Tabungan	6	6	6	6	7	8	8	9
	2. Deposito	9	10	10	10	10	12	11	12
III	KREDIT	23	25	27	28	29	37	37	37
	1. Jenis Penggunaan	23	25	27	28	29	37	37	37
	a. Modal Kerja	20	20	22	23	24	27	26	24
	b. Investasi	1	1	1	1	2	2	0	2
	c. Konsumsi	2	3	3	4	4	7	11	11
	2. Sektor Ekonomi	23	25	27	28	29	37	37	37
	a. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Industri	0	0	0	0	0	1	1	0
	c. Perdagangan	20	20	22	23	24	28	26	23
	d. Jasa-jasa	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Lain-lain	2	3	3	4	4	8	10	12
	3. Kolektibilitas	23	25	27	28	29	37	37	37
	a. Lancar	23	24	26	28	28	34	34	34
	b. Kurang Lancar	0	0	0	0	0	1	1	1
	c. Diragukan	0	0	0	1	0	1	1	1
	d. Macet	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	RASIO								
	1. Loan To Deposit Ratio (%)	62,53	64,99	62,62	59,44	56,46	54,32	53,23	55,63
	2. Non Performing Loan								
	a. Nominal	1	1	1	1	1	2	3	3
	b. Rasio (%)	2,81	3,01	2,94	3,12	3,25	6,31	8,01	8,07

Indikator BPR - Kabupaten Kulonprogo

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	94	101	106	113	110	106	105	108
II	DANA PIHAK KETIGA	56	57	60	75	72	75	75	77
	1. Tabungan	12	12	14	19	15	14	36	14
	2. Deposito	44	45	46	56	57	62	40	63
III	KREDIT	76	84	94	99	98	89	91	96
	1. Jenis Penggunaan	76	84	94	99	98	89	91	96
	a. Modal Kerja	32	32	48	48	46	41	43	50
	b. Investasi	2	2	3	3	3	3	4	4
	c. Konsumsi	42	50	43	49	48	44	43	42
	2. Sektor Ekonomi	76	84	94	99	98	89	91	96
	a. Pertanian	5	4	5	5	5	4	4	4
	b. Industri	2	2	3	3	2	1	1	2
	c. Perdagangan	21	21	25	26	26	21	21	24
	d. Jasa-jasa	6	7	10	13	15	12	14	20
	e. Lain-lain	42	51	52	52	50	50	49	46
	3. Kolektibilitas	76	84	94	99	98	89	91	96
	a. Lancar	73	80	89	95	93	82	81	88
	b. Kurang Lancar	1	2	2	2	3	4	5	2
	c. Diragukan	1	2	2	2	2	3	5	5
	d. Macet	0	0	2	0	0	0	0	0
IV	RASIO								
	1. Loan To Deposit Ratio (%)	74,04	67,97	64,14	76,11	74,09	84,87	83,16	80,52
	2. Non Performing Loan								
	a. Nominal	3	4	5	4	5	7	10	7
	b. Rasio (%)	3,58	4,74	5,48	3,91	4,96	7,79	10,64	7,70

Indikator BPR - Kabupaten Sleman

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	533	549	584	598	585	573	582	579
II	DANA PIHAK KETIGA	393	406	433	443	435	433	427	445
	1. Tabungan	124	120	131	142	136	130	129	132
	2. Deposito	269	286	302	301	299	303	298	313
III	KREDIT	399	438	464	483	477	473	475	474
	1. Jenis Penggunaan	399	438	464	483	477	473	475	474
	a. Modal Kerja	220	235	241	244	237	221	214	208
	b. Investasi	7	8	8	11	10	14	19	21
	c. Konsumsi	172	195	215	228	230	238	242	246
	2. Sektor Ekonomi	399	438	464	483	477	473	475	474
	a. Pertanian	7	8	8	9	9	10	10	10
	b. Industri	5	6	5	5	4	5	5	5
	c. Perdagangan	157	166	172	176	170	157	155	147
	d. Jasa-jasa	49	57	58	59	57	59	60	59
	e. Lain-lain	181	201	221	234	238	243	246	254
	3. Kolektibilitas	398	438	464	483	477	473	475	474
	a. Lancar	384	418	429	448	440	437	423	425
	b. Kurang Lancar	7	9	14	13	12	18	28	22
	c. Diragukan	6	8	9	10	12	13	20	23
	d. Macet	2	3	12	12	13	4	4	5
IV	RASIO								
	1. Loan To Deposit Ratio (%)	98,44	92,58	93,46	91,62	91,11	91,53	89,78	93,85
	2. Non Performing Loan								
	a. Nominal	15	20	34	35	37	36	53	50
	b. Rasio (%)	3,72	4,59	7,40	7,28	7,76	7,55	11,12	10,48

Indikator BPR - Kota Yogyakarta

Miliar Rp

No	Uraian	IV-2004	I-2005	II-2005	III-2005	IV-2005	I-2006	II-2006	III-2006
I	ASET	41	43	51	56	64	68	80	97
II	DANA PIHAK KETIGA	28	30	35	37	40	44	50	63
	1. Tabungan	8	9	8	8	9	9	10	11
	2. Deposito	21	22	27	28	31	35	40	52
III	KREDIT	35	38	46	50	54	58	66	81
	1. Jenis Penggunaan	35	38	46	50	54	58	66	81
	a. Modal Kerja	14	15	15	16	16	17	20	25
	b. Investasi	1	1	1	1	1	1	1	4
	c. Konsumsi	20	23	30	32	37	40	45	52
	2. Sektor Ekonomi	35	38	46	50	54	58	66	81
	a. Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Industri	1	1	1	1	0	0	0	0
	c. Perdagangan	13	14	14	15	16	17	19	27
	d. Jasa-jasa	1	1	1	1	1	1	1	1
	e. Lain-lain	21	23	31	33	38	40	45	53
	3. Kolektibilitas	35	38	46	50	54	58	66	81
	a. Lancar	29	32	44	47	51	54	58	72
	b. Kurang Lancar	3	2	1	1	2	2	5	5
	c. Diragukan	2	3	1	1	1	1	3	4
	d. Macet	0	0	0	1	0	0	0	0
IV	RASIO								
	1. Loan To Deposit Ratio (%)	81,77	79,93	75,34	73,70	73,66	76,25	75,54	77,21
	2. Non Performing Loan								
	a. Nominal	5	6	3	3	3	4	8	10
	b. Rasio (%)	15,20	14,66	5,72	5,42	5,74	6,98	12,55	11,75

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Laporan Survei Konsumen Triwulan III-2006

PROFIL RESPONDEN

Responden Survei Ekspektasi Konsumen (SEK) pada triwulan III-2006, berjumlah 200 orang. Sesuai dengan kriteria survei ini, masyarakat DIY yang dijadikan responden adalah mereka yang tinggal di Kota Yogyakarta dengan posisi sebagai pengambil kebijakan belanja rumah tangga (*spending decision makers*), serta berasal dari kelompok masyarakat menengah keatas, dengan indikator besarnya pengeluaran di atas satu juta rupiah per bulan.

NO	Data Responden	Keterangan	Jumlah	Pangsa (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	119	59,50
		Perempuan	81	40,50
2	Tingkat Pengeluaran	Rp1 juta - Rp3 Juta	134	67,00
		Rp3 juta - Rp5 juta	55	27,50
		Di atas Rp5 Juta	11	5,50
3	Kelompok Umur	20 - 40 tahun	86	43,00
		Diatas 40 - 60 tahun	96	48,00
		Di atas 60 tahun	18	9,00
4	Tingkat Pendidikan	SLTA	80	40,00
		D3	40	20,00
		Sarjana	68	34,00
		Pasca sarjana	12	6,00

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki relatif dominan yaitu 59,50% responden laki-laki dan 40,50% responden perempuan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran per bulan, mayoritas responden atau sebanyak 67,00% berada pada tingkat pengeluaran antara Rp 1 juta hingga 3 juta per bulan, kemudian diikuti responden yang berpenghasilan antara Rp 3 juta hingga 5 juta per bulan yaitu sebanyak 27,50%. Kondisi ini dapat mencerminkan kondisi masyarakat Yogyakarta yang mayoritas berpenghasilan menengah.

Berdasar kelompok umur, tampak terjadi sebaran responden yang tidak sama, dimana jumlah terbanyak adalah responden berusia antara 40-60 tahun yaitu sebanyak 48,00%, sedangkan kelompok umur antara 20-40 tahun sebanyak 43,00% dan yang di atas 60 tahun sebanyak 9,00%. Klasifikasi umur ini cukup penting dalam survei konsumen karena akan mempengaruhi sikap responden terhadap perkiraan harga dan umumnya akan terdapat perbedaan sikap diantara responden yang berbeda kelompok umum.

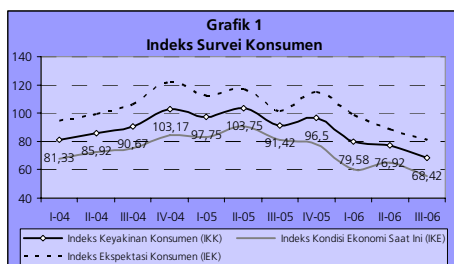
Ketepatan prediksi konsumen terhadap harga dan fenomena ekonomi lainnya, selain dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan (faktor usia) juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka mereka semakin memiliki kemampuan analisis maupun mengelola informasi. Dalam survei ini, mayoritas responden berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 40,00%, sedangkan yang berpendidikan sarjana sebanyak 34,00% dan pasca sarjana sebanyak 6,00%. Dengan demikian, dalam survei periode ini mayoritas responden adalah orang yang berpendidikan menengah.

Tabel 2
Indeks Keyakinan Konsumen

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	97,75	103,75	91,42	96,50	79,58	76,92	68,42	-11,05
2	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	83,17	90,67	81,33	77,67	60,17	65,17	55,67	-14,58
3	Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	112,33	116,83	101,50	115,33	99,00	88,67	81,17	-8,46

KEYAKINAN KONSUMEN

Berdasarkan hasil survei konsumen pada periode triwulan III-2006, tampak bahwa keyakinan konsumen yang tercermin dalam angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan dibandingkan dengan periode survei sebelumnya. Dengan demikian, dalam tiga periode survei pada tahun ini ada kecenderungan negatif atas keyakinan konsumen. Pada periode survei ini, tingkat keyakinan konsumen mengalami penurunan kearah pesimistik yang tercermin dari angka IKK sebesar 68,42. Angka IKK ini lebih kecil dari 100 sehingga termasuk dalam range pesimistik. Angka IKK pada periode laporan ini mengalami penurunan sebesar minus 11,05% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 76,92. Angka IKK pada periode survei apabila dibandingkan dengan IKK pada periode yang sama tahun sebelumnya (yoy), tampak lebih rendah, yaitu turun sebesar 25,16%. Artinya, tingkat keyakinan konsumen pada periode survei sekarang ini jauh lebih rendah dibandingkan derajat keyakinan pada periode survei tahun yang lalu dan cenderung menjauh dari sikap optimistik.



Penurunan tingkat ekspektasi konsumen DIY dipengaruhi oleh penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar minus 8,46% dan penurunan nilai Indeks Kondisi Saat ini (IKE) sebesar 14,58%. Pada periode ini, nilai IEK menurun dari 88,67 menjadi 81,17. Sementara itu, nilai IKE juga mengalami penurunan dari 65,17 menjadi 55,67. Secara umum, perubahan tingkat keyakinan konsumen di DIY selama dua periode survei dapat dicermati pada Grafik 1.

Terjadinya penurunan IEK dan IKE telah mendorong menurunnya derajat keyakinan konsumen dalam periode ini ke arah yang semakin pesimistik. Dinamika angka IKE dipengaruhi oleh perubahan beberapa indeks persepsi konsumen, yaitu Indeks Penghasilan Konsumen, Indeks Ketepatan Waktu Belanja Barang Tahan lama, serta Indeks Kondisi Jumlah Pengangguran.

Indeks Penghasilan Konsumen pada periode survei ini mengalami penurunan sebesar 2,93%, dan Indeks Ketepatan Waktu Belanja Barang Tahan Lama juga mengalami penurunan sebesar 1,12%. Pola yang sama juga terjadi pada Indeks Jumlah Pengangguran pada saat ini yang juga mengalami penurunan tajam sebesar 51,55%. Terjadinya penurunan pada ketiga variabel pembentuk IKE menyebabkan nilai IKE pada periode survei ini mengalami penurunan dan berada pada klasifikasi pesimistik.

Berbeda dengan empat periode survei sebelumnya, pada periode survei ini, konsumen merasakan terjadi penurunan penghasilan dan termasuk pada range pesimistik. Hal ini terlihat dari perubahan Indeks Penghasilan Konsumen dari 102,50 menjadi 99,50. Angka ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode survei setahun yang lalu yang nilainya sebesar 122,00. Angka indeks penghasilan kali ini masih dalam range pesimistik dari biasanya yang cenderung optimistik, sehingga secara langsung mendorong pelemahan pada nilai IKE. Sementara itu, konsumen juga menilai bahwa pada triwulan ini bukan merupakan momentum yang tepat untuk melakukan belanja barang-barang tahan lama. Hal ini terlihat dari penurunan angka Indeks Ketepatan Waktu Belanja Barang Tahan Lama dari 44,50 menjadi 44,00 atau menurun sebesar 1,12%.

Kondisi yang sama juga terjadi pada angka Indeks Kondisi Jumlah Pengangguran, yang juga mengalami penurunan dari 48,50 menjadi 23,50 atau menurun sebesar 51,55% dibandingkan periode sebelumnya. Angka Indeks Pengangguran ini jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy) jauh lebih rendah, sehingga mengindikasikan sikap yang semakin pesimis dalam hal ketenagakerjaan. Perubahan beberapa faktor yang mempengaruhi keyakinan konsumen dapat tercermin pada Tabel 3.

Tabel 3
Kondisi Ekonomi Saat Ini Dibandingkan Tahun Lalu

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Penghasilan Konsumen	126,50	123,50	122,00	101,00	107,50	102,50	99,50	-2,93
2	Ketepatan Waktu untuk Berbelanja Barang Tahan Lama	69,00	68,00	46,50	53,50	49,00	44,50	44,00	-1,12
3	Kondisi Jumlah Pengangguran	54,00	80,50	75,50	78,50	24,00	48,50	23,50	-51,55

Sementara itu, pada periode survei ini dalam hal keyakinan konsumen terhadap prospek perekonomian satu tahun mendatang dengan sikap yang pesimistik dibandingkan dengan periode survei yang sama pada tahun 2005 yang selalu optimis. Hal ini tercermin dari angka IEK pada periode survei ini yang mengalami penurunan sebesar 8,46%, yaitu dari 88,67 menjadi 81,17. Nilai IEK sebesar 81,17 ini mengindikasikan sikap pesimisme konsumen terhadap perekonomian Indonesia dimasa mendatang. Angka indeks ini dalam empat periode survei terus mengalami penurunan dan terus memasuki range pesimistik.

Terjadinya penurunan sikap optimisme konsumen terhadap prospek perekonomian dimasa mendatang dipengaruhi oleh perubahan beberapa variabel, yaitu Ekspektasi Penghasilan Konsumen, Ekspektasi Kondisi Ekonomi, dan Ekspektasi Kondisi Jumlah Penganggur.

Pada triwulan laporan ini, konsumen meyakini akan terjadi penurunan pada sisi ekonomi makro, maupun kondisi pengangguran yang semakin memburuk, sedangkan pada ekspektasi penghasilan justru meningkat. Indeks Ekspektasi Penghasilan mengalami peningkatan sebesar 16,44% dan masih dalam range optimistik. Peningkatan optimisme pada aspek penghasilan tercermin dari meningkatnya angka Indeks Ekspektasi Penghasilan Konsumen dari 112,50 menjadi 131,00.

Pada sisi lain, konsumen berekspektasi bahwa kondisi ekonomi makro maupun ketenagakerjaan di masa mendatang diyakini secara pesimistik, dan lebih rendah dari periode survei sebelumnya. Hal ini tercermin dari perubahan angka Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi dari 86,50 menjadi 74,50 atau menurun sebesar minus 13,87%. Demikian halnya dengan aspek ketenagakerjaan, konsumen cenderung semakin pesimistik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks kondisi pengangguran dari 47,00 menjadi 38,00 atau menurun sebesar 19,15%.

Keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian pada satu tahun mendatang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian Indonesia pada tahun ini dimana pertumbuhan sektor riil masih sangat lamban sehingga tidak memiliki daya serap yang efektif terhadap tenaga kerja maupun daya dorong terhadap kondisi makro secara keseluruhan. Pada wilayah Yogyakarta, lambannya proses

pemulihan akibat bencana gempa bumi pada 27 Mei yang lalu masih mengakibatkan pelemahan ekonomi. Dinamika aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat keyakinan konsumen terhadap perekonomian dimasa mendatang dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Ekspektasi Konsumen 1 Tahun Yang Akan Datang

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Ekspektasi Penghasilan Konsumen	162,50	147,00	139,50	133,50	134,50	112,50	131,00	16,44
2	Ekspektasi Kondisi Ekonomi	124,00	132,50	98,00	114,00	98,00	86,50	74,50	-13,87
3	Ekspektasi Jumlah Pengangguran	50,50	71,00	98,00	98,50	64,50	47,00	38,00	-19,15

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indeks ini mengindikasikan optimisme dari responden terhadap berbagai hal yang terkait dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan, yaitu tingkat penghasilan, tingkat pengangguran, ketepatan waktu belanja barang tahan lama, serta kondisi umum perekonomian Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka semakin tinggi tingkat keyakinan (optimisme) konsumen atas berbagai variabel ekonomi.

Tabel 5
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
A. Total 200 Responden		97,75	103,75	91,42	96,50	79,58	76,92	68,42	-11,05
B. Berdasarkan Jenis Kelamin									
1	Laki-laki	103,40	105,87	99,35	96,26	85,57	82,39	73,11	-11,26
2	Perempuan	91,75	101,40	83,16	96,77	71,97	70,74	61,52	-13,03
C. Berdasarkan Tingkat Pengeluaran									
1	Diatas Rp 1 juta - Rp 3 juta	92,03	105,56	81,65	90,11	71,75	73,54	64,30	-12,56
2	Diatas Rp 3 juta - Rp 5 juta	102,30	98,58	98,27	103,44	83,33	83,08	77,58	-6,62
3	Diatas Rp 5 juta	103,97	115,15	129,76	113,16	117,59	78,57	72,73	-7,43
D. Berdasarkan Kelompok Umur									
1	Kelompok umur 20-40 thn	93,65	102,58	81,88	95,44	73,78	70,13	70,93	1,14
2	Kelompok umur 40-60 thn	103,44	105,72	96,52	95,79	83,33	80,27	67,19	-16,30
3	Kelompok umur diatas 60 thn	86,84	98,04	96,03	101,72	82,10	84,67	62,96	-25,64
E. Berdasarkan Tingkat Pendidikan									
1	SLTA	89,62	98,81	87,37	92,77	68,89	75,71	53,75	-29,01
2	Akademi (D3)	87,39	107,87	79,28	92,59	84,90	89,25	80,83	-9,43
3	Sarjana	105,14	106,14	100,31	103,01	92,09	75,44	77,94	3,31
4	Pasca Sarjana	111,11	125,00	128,33	113,89	133,33	52,38	70,83	35,22

Dari olah data yang dilakukan atas jawaban responden periode survei ini, diperoleh nilai IKK sebesar 68,42. Angka ini mengindikasikan terjadinya penurunan tingkat keyakinan konsumen terhadap perekonomian makro, dan masih dalam range pesimistik. Nilai IKK pada periode ini merupakan nilai terendah dalam lima periode survei, dengan kecenderungan menurun.

Berdasarkan jenis kelamin responden, antara responden laki-laki dengan perempuan terdapat perbedaan persepsi terhadap variabel makro ekonomi, dimana responden perempuan relatif lebih pesimistik dibandingkan responden laki-laki. Responden laki-laki memiliki tingkat keyakinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan responden perempuan, meskipun masih dalam range pesimistik. Hal ini terlihat dari angka IKK laki-laki yang nilainya 73,11, sedangkan angka IKK perempuan sebesar 61,52.

Sementara itu, apabila dilihat dari tingkat pengeluaran keluarga, tampak bahwa kelompok responden yang berpenghasilan sedang memiliki angka IKK yang lebih tinggi dari kelompok lainnya. Angka IKK masyarakat berpenghasilan sedang sebesar 77,58 atau menurun sebesar minus 6,62% dari periode sebelumnya. Demikian halnya dengan responden yang berpenghasilan tinggi juga mengalami penurunan sikap dan masih dalam range pesimistik. Hal ini tidak berbeda dengan sikap responden yang berpenghasilan rendah yang juga mengalami penurunan keyakinan yaitu dari 73,54 menjadi sebesar 64,30.

Apabila mencermati angka IKK dari sisi kelompok umur, tampak bahwa ada variasi tingkat indeks antar kelompok umur. Pada periode survei ini, pada kesemua kelompok umur masih bersikap dalam range pesimistik, meskipun untuk kelompok umur muda mengalami peningkatan ekspektasinya. Angka IKK kelompok umur 20-40 tahun sebesar 70,93 atau meningkat tipis sebesar 1,14% dari periode sebelumnya. Kelompok responden umur 40-60 tahun memiliki nilai IKK sebesar 67,19 atau turun sebesar 16,30%, sedangkan nilai IKK dari kelompok berusia diatas 60 tahun sebesar 62,96 atau turun sebesar 25,64%. Angka ini mencerminkan derajat keyakinan konsumen dari semua kelompok umur relatif tidak berbeda, yaitu kesemuanya bersikap pesimistik.

Sementara itu, responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki derajat keyakinan yang lebih rendah dari konsumen yang berpendidikan rendah. Angka IKK konsumen berpendidikan SLTA sebesar 53,75 atau menurun sebesar minus 29,01%. Pada sisi lain, responden sarjana dan pasca sarjana justru mengalami peningkatan dari sebesar 75,44 menjadi 77,94 atau meningkat sebesar 3,31%, sedangkan pasca sarjana sebesar 70,83 atau meningkat sebesar 35,22%. Kondisi ini mengindikasikan perbedaan sikap, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen, maka semakin rendah tingkat keyakinannya.

Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks ini mengindikasikan optimisme dari responden terhadap kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Variabel dari indeks ini adalah kondisi penghasilan konsumen, kondisi jumlah pengangguran, dan ketepatan waktu untuk belanja barang tahan lama. Semakin tinggi indeks ini, maka semakin tinggi tingkat keyakinan (optimisme) konsumen atas kondisi perekonomian saat ini dibandingkan periode sebelumnya.

Dari olah data yang dilakukan atas jawaban responden periode survei ini, diperoleh angka IKE sebesar 55,67 atau menurun sebesar 14,58% dari periode sebelumnya yang besarnya 65,17. Nilai indeks ini masih dibawah 100,00, mengindikasikan bahwa keyakinan responden DIY terhadap kondisi ekonomi saat ini dibandingkan periode sebelumnya masih berada dalam range pesimistik. Menurunnya tingkat optimisme konsumen DIY terhadap ekonomi makro pada saat ini lebih disebabkan menurunnya optimisme dalam berbagai variabel pembentuk indeks ini, dimana kesemua aspek masih dalam range pesimistik.

Tabel 6
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
A. Total 200 Responden		83,17	90,67	81,33	77,67	60,17	65,17	55,67	-14,58
B. Berdasarkan Jenis Kelamin									
1	Laki-laki	87,38	90,16	88,56	77,57	70,83	72,33	61,06	-15,58
2	Perempuan	78,69	91,23	73,81	77,78	46,59	57,09	47,74	-16,38
C. Berdasarkan Tingkat Pengeluaran									
1	Diatas Rp 1 juta - Rp 3 juta	75,36	95,49	70,64	70,62	50,85	60,85	51,00	-16,19
2	Diatas Rp 3 juta - Rp 5 juta	88,89	82,52	87,88	85,71	65,10	71,64	63,64	-11,17
3	Diatas Rp 5 juta	93,65	100,00	128,57	94,74	103,70	80,95	72,73	-10,15
D. Berdasarkan Kelompok Umur									
1	Kelompok umur 20-40 thn	79,37	87,30	69,08	78,57	52,89	51,95	54,65	5,20
2	Kelompok umur 40-60 thn	89,35	93,60	87,58	72,03	62,59	72,11	57,64	-20,07
3	Kelompok umur diatas 60 thn	68,42	90,20	88,89	91,95	71,60	78,67	50,00	-36,44
E. Berdasarkan Tingkat Pendidikan									
1	SLTA	73,77	84,13	75,42	74,84	46,03	64,13	44,17	-31,12
2	Akademi (D3)	72,97	99,07	77,48	67,90	77,08	82,80	65,00	-21,50
3	Sarjana	89,71	92,98	87,65	84,70	72,88	61,40	61,27	-0,21
4	Pasca Sarjana	103,17	108,33	120,00	100,00	108,33	33,33	69,44	108,34

Berdasarkan jenis kelamin responden, tampak bahwa responden laki-laki memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden perempuan, meskipun keduanya tetap dalam range pesimistik. Hal ini terlihat dari nilai IKE laki-laki sebesar 61,06, sedangkan IKE perempuan sebesar 47,74.

Sementara itu, dilihat dari tingkat pengeluaran konsumen, tampak bahwa kelompok responden yang berpengeluaran tinggi memiliki angka IKE yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Angka IKE kelompok responden

berpengeluaran tinggi sebesar 72,73 dimana indeks ini mengindikasikan sikap pesimistik, sedangkan kelompok konsumen berpenghasilan rendah memiliki skor IKE sebesar 51,00 dan 63,64.

Berdasarkan kelompok umur, angka IKE responden pada kelompok umur 40-60 tahun dan kelompok umur diatas 60 tahun mengalami penurunan dan masih dalam range pesimistik, masing-masing memiliki angka IKE sebesar 57,64 dan 50,00. Sedangkan kelompok umur muda mengalami peningkatan angka IKE sebesar 5,20% dari periode survei sebelumnya yang besarnya 51,95 menjadi 54,65. Kondisi ini mencerminkan keyakinan responden terhadap perekonomian makro saat ini, pada kelompok responden usia lebih muda, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok responden berusia tua.

Pada sisi lain, berdasarkan tingkat pendidikan responden, tampak bahwa ada perbedaan antara responden lulusan SLTA dan Sarjana. Angka IKE responden lulusan SLTA mengalami penurunan sebesar 31,12% atau menjadi 44,17. Sementara itu, responden sarjana mengalami penurunan tipis menjadi 61,24, sedangkan pasca sarjana justru meningkat drastis menjadi 69,44. Hal ini mencerminkan sikap kelompok konsumen berpendidikan tinggi relatif lebih pesimistik dalam menganalisis kondisi perekonomian ini meskipun semua responden dalam range pesimistik.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indeks ini mengindikasikan optimisme dari responden terhadap kondisi ekonomi masa mendatang dibandingkan dengan kondisi perekonomian saat ini. Variabel dari indeks ini adalah kondisi penghasilan konsumen, kondisi jumlah pengangguran, dan ketepatan waktu untuk belanja barang tahan lama. Semakin tinggi indeks ini, maka semakin tinggi tingkat keyakinan (optimisme) konsumen atas kondisi perekonomian dimasa mendatang dibandingkan kondisi perekonomian saat ini.

Dari olah data yang dilakukan atas jawaban responden periode survei ini, diperoleh angka IEK sebesar 81,17 atau menurun sebesar 8,46% dari periode sebelumnya. Nilai indeks yang dibawah 100,00 mengindikasikan terjadi penurunan keyakinan responden DIY terhadap kondisi ekonomi dimasa mendatang dibandingkan periode saat ini dan berada dalam range pesimistik. Menurunnya optimisme konsumen DIY terhadap ekonomi makro pada mendatang dipengaruhi oleh pesimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian makro serta masalah pengangguran, meskipun untuk ekspektasi penghasilan masih dalam range optimistik.

Dari sisi jenis kelamin responden, tampak bahwa responden laki-laki memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden perempuan. Hal ini terlihat dari nilai IEK laki-laki sebesar 85,15 sedangkan IEK perempuan sebesar 75,31.

Tabel 7
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
A. Total 200 Responden		112,33	116,83	101,50	115,33	99,00	88,67	81,17	-8,46
B. Berdasarkan Jenis Kelamin									
1	Laki-laki	119,42	121,59	110,13	114,95	100,30	92,45	85,15	-7,90
2	Perempuan	104,81	111,58	92,52	115,77	97,35	84,40	75,31	-10,77
C. Berdasarkan Tingkat Pengeluaran									
1	Diatas Rp 1 juta - Rp 3 juta	108,70	115,63	92,66	109,60	92,66	86,24	77,61	-10,01
2	Diatas Rp 3 juta - Rp 5 juta	115,71	114,63	108,66	121,16	101,56	94,53	91,52	-3,18
3	Diatas Rp 5 juta	114,29	130,30	130,95	131,58	131,48	76,17	72,73	-4,52
D. Berdasarkan Kelompok Umur									
1	Kelompok umur 20-40 thn	107,94	117,86	94,69	112,30	94,67	88,31	87,21	-1,25
2	Kelompok umur 40-60 thn	117,53	117,85	105,45	119,54	104,08	88,44	76,74	-13,23
3	Kelompok umur diatas 60 thn	105,26	105,88	103,17	111,49	92,59	90,67	75,93	-16,26
E. Berdasarkan Tingkat Pendidikan									
1	SLTA	105,46	113,49	99,33	110,69	91,75	87,30	63,33	-27,46
2	Akademi (D3)	101,80	116,67	81,08	117,28	92,71	95,70	96,67	1,01
3	Sarjana	120,58	119,30	112,96	121,31	111,30	89,47	94,61	5,74
4	Pasca Sarjana	119,05	141,67	136,67	127,78	158,33	71,43	72,22	1,11

Sementara itu, dilihat dari tingkat pengeluaran konsumen, tampak bahwa semua kelompok responden mensikapi pesimis, dimana pada konsumen yang berpengeluaran tinggi memiliki angka IEK yang lebih rendah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Angka IEK kelompok responden berpengeluaran tinggi menurun dari 76,19 menjadi 72,73, sedangkan kelompok konsumen berpenghasilan menengah memiliki indeks sebesar 91,52 dan konsumen yang berpengeluaran rendah sebesar 77,61 atau turun sebesar 10,01% dari periode sebelumnya.

Berdasarkan kelompok umur, angka IEK responden pada semua kelompok umur termasuk dalam range pesimistik. Pada kelompok umur 20-40 tahun dan 40-60 tahun, masing-masing memiliki angka IEK sebesar 87,21 dan 76,74, sedangkan kelompok umur tua memiliki angka IEK sebesar 75,93. Kondisi ini mencerminkan keyakinan responden terhadap perekonomian makro mendatang, pada kelompok muda relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok responden berusia tua.

Pada sisi lain, berdasarkan tingkat pendidikan responden, tampak bahwa tidak ada perbedaan antara responden lulusan SLTA dan sarjana, dimana kesemuanya dalam range pesimistik. Angka IEK responden lulusan SLTA relatif

lebih rendah dibandingkan responden sarjana. Pada periode survei ini, nilai IEK responden lulusan SLTA sebesar 63,33, sedangkan sarjana sebesar 94,61 dan pasca sarjana sebesar 72,22. Hal ini mengindikasikan bahwa pada semua tinggi tingkat pendidikan konsumen memiliki derajat keyakinannya terhadap perekonomian dimasa mendatang yang pesimis, terlebih pada kelompok SLTA.

EKSPEKTASI HARGA

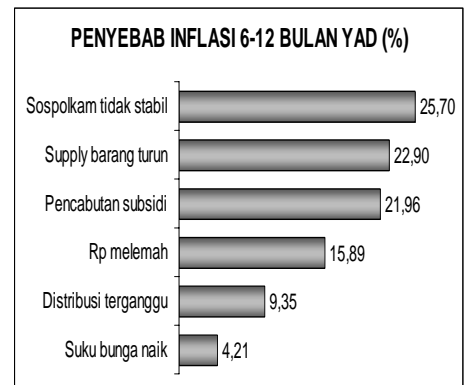
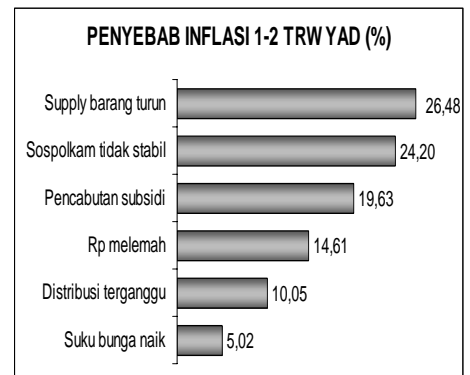
Pada periode survei ini, tampak bahwa ada peningkatan ekspektasi harga dari masyarakat, dimana masyarakat dalam periode survei ini memperkirakan akan terjadi peningkatan harga umum dan masih dalam range pesimistik (dalam kondisi inflasi). Artinya, masyarakat memiliki perkiraan masih akan terjadi inflasi dimasa mendatang, baik inflasi triwulanan maupun tahunan dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada periode survei sebelumnya.

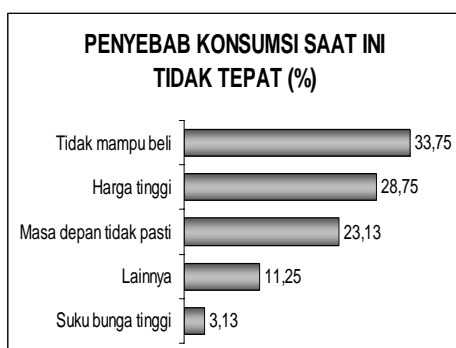
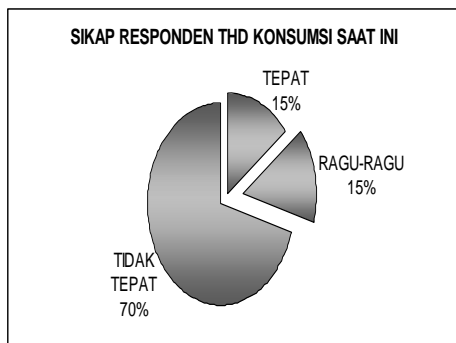
Tabel 8
Ekspektasi Harga

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Inflasi triwulan mendatang	9,50	25,00	19,50	29,00	30,00	31,00	29,00	-6,45
2	Inflasi setahun mendatang	15,00	33,50	22,50	32,00	26,50	29,50	25,50	-13,56
3	Bahan Makanan	12,50	34,50	20,50	28,00	19,50	22,00	17,00	-22,73
4	Bahan Sandang	33,50	38,50	39,00	41,50	36,50	61,00	38,00	-37,70
5	Perumahan	21,00	21,50	21,50	36,00	39,00	30,00	33,00	10,00
6	Transportasi dan Komunikasi	24,00	26,50	19,50	40,50	38,50	33,50	43,00	28,36

Inflasi pada triwulan mendatang lebih disebabkan oleh kondisi non ekonomi (sospol) yang kurang stabil serta rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi. Hal ini juga melatarbelakangi terjadinya inflasi pada periode satu tahun mendatang.

Penurunan persepsi konsumen terhadap inflasi secara umum juga terlihat pada barang yang spesifik, seperti perumahan dan transportasi dan komunikasi, sedangkan pada bahan sandang relatif mendekati deflasi. Kondisi ini terkait dengan dampak akibat bencana alam berupa gempa bumi yang menghancurkan banyak rumah penduduk dan bangunan publik sehingga konsumsi untuk perbaikan rumah menjadi meningkat tajam. Gambaran secara lengkap tentang prakiraan laju inflasi untuk tiga bulan dan satu tahun mendatang dapat dicermati pada Tabel 8.





RENCANA KONSUMSI DAN REKREASI

Meskipun responden masih memperkirakan adanya kenaikan laju inflasi dimasa mendatang, namun para responden masih memperkirakan akan meningkatnya konsumsi pada beberapa barang, seperti sandang, perbaikan rumah, pembelian perabot rumah tangga, dan rekreasi. Namun demikian, dari keseluruhan jenis konsumsi, hanya konsumsi barang sandang yang bernilai optimistik, sedangkan yang lain tetap pesimistik meskipun ada beberapa peningkatan persepsi.

Tabel 9
Rencana Konsumsi dan Rekreasi 1 Tahun Mendatang

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Ketepatan membeli barang	69,00	68,00	46,50	53,50	49,00	44,50	44,00	-1,12
2	Barang Sandang	119,50	111,50	114,00	105,00	99,00	94,00	104,50	11,17
3	Pembelian/perbaikan Rumah	48,00	29,50	35,00	47,50	33,50	60,00	69,00	15,00
4	Peralatan Rumah Tangga	57,50	33,50	40,50	42,50	33,00	34,50	39,50	14,49
5	Perabotan Rumah Tangga	53,50	36,50	39,50	37,00	37,00	32,50	38,00	16,92
6	Kendaraan Bermotor	34,50	26,50	27,50	33,50	29,50	27,00	28,00	3,70
7	Rekreasi	139,50	120,00	97,00	105,00	92,50	73,00	80,00	9,59

Masyarakat pada empat periode survei terakhir ada kecenderungan penurunan sikap dalam hal konsumsi barang-barang tahan lama. Demikian pula ini terjadi pada triwulan ini, dimana masyarakat semakin pesimis untuk melakukan konsumsi di masa mendatang. Beberapa alasan ketidaktepatan konsumsi barang tahan lama dapat dicermati pada grafik di bawah. Prakiraan konsumsi dari responden DIY dapat dicermati pada Tabel 9.

KEYAKINAN TERHADAP INDIKATOR EKONOMI LAINNYA

Sebagian besar konsumen DIY pada periode survei ini merasa lebih pesimistik terhadap indikator makro ekonomi Indonesia. Pada periode survei ini, meskipun sebagian besar indikator pada posisi pesimistik, namun ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan, seperti penguatan kurs maupun ketersediaan barang/jasa.

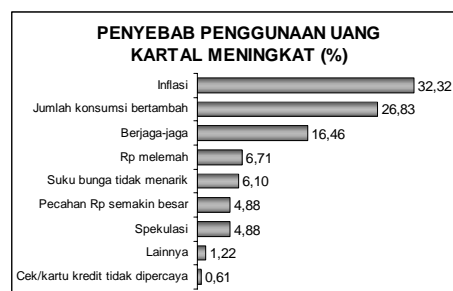
Responden menilai optimis terhadap ketersediaan barang/jasa dalam satu tahun yang akan datang. Hal ini terindikasi dari kenaikan indeks ketersediaan barang/jasa dari 98,00 menjadi 101,00. Sementara itu, untuk indikator suku bunga dan prospek program ekonomi pemerintah, pada periode survei ini mengalami penurunan. Hal ini cukup kontradiktif dengan dikeluarkannya kebijakan moneter pada triwulan ini oleh Bank Indonesia dimana BI telah menurunkan BI Rate. Demikian pula, belum selaras dengan kebijakan menteri keuangan yang

menghimbau industri perbankan untuk menurunkan bunga kredit. Kondisi ini mencerminkan persepsi konsumen pada industri perbankan yang tidak serta merta merespon kebijakan dari pusat, termasuk dalam hal penurunan suku bunga. Tingkat keyakinan responden DIY terhadap berbagai indikator moneter dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Nilai Tukar dan Suku Bunga

No	Keterangan	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Ketersediaan Barang/Jasa satu tahun yad	129,00	135,00	99,00	112,00	108,00	98,00	101,00	3,06
2	Kurs Rupiah terhadap US\$ satu triwulan yad	80,00	96,00	59,00	80,50	85,00	80,50	93,50	16,15
3	Kurs Rupiah terhadap US\$ satu tahun yad	117,50	111,50	79,00	98,00	91,50	82,00	94,50	15,24
4	Suku Bunga simpanan dalam satu triwulan yad	100,00	82,50	97,50	98,50	92,50	96,00	78,00	-18,75
5	Suku Bunga simpanan dalam satu tahun yad	64,00	73,00	102,00	91,00	77,50	87,50	76,00	-13,14
6	Prospek program ekonomi pemerintah	99,50	100,50	71,50	93,50	72,50	76,50	50,00	-34,64

Pada sisi lain, responden juga merasa bahwa pada triwulan mendatang akan terjadi banyak pengeluaran uang kartal. Alasan utama dari pengeluaran kartal tersebut dikarenakan faktor kenaikan harga, peningkatan jumlah konsumsi, serta untuk berjaga-jaga. Faktor inflasi dan peningkatan konsumsi yang diproyeksikan akan menyebabkan penggunaan dana (uang kartal) karena pada triwulan mendatang banyak sekali kegiatan yang meningkatkan konsumsi, seperti Bulan Ramadhan, Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru. Selain itu, pada wilayah Yogyakarta yang juga terkena dampak gempa maka dalam proses pemulihan ini akan memunculkan tarikan permintaan yang tinggi sehingga akan mendorong inflasi dan konsumsi.



Laporan Survei Penjualan Eceran Triwulan III-2006

PENJELASAN UMUM

Survei Penjualan Eceran (SPE) merupakan survei mikro berkala yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan kecenderungan pengeluaran masyarakat (*consumption spending*) melalui sisi penjualan di tingkat pengecer (*retailer*). Survei ini digunakan untuk mengetahui indikasi awal perkembangan sisi permintaan, khususnya terhadap barang konsumsi. Secara spesifik, tujuan dari SPE ini adalah : (1) memperoleh informasi mengenai pergerakan dan kecenderungan pengeluaran masyarakat (*consumption spending*) dan (2) menyusun salah satu indikator dini atas perkembangan perekonomian, terutama dari sisi permintaan.

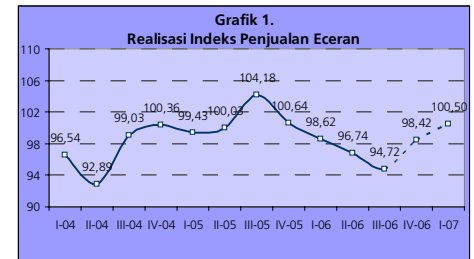
Ruang lingkup SPE adalah penjualan pada tingkat eceran dari seluruh barang yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Pelaksanaan SPE oleh Bank Indonesia Yogyakarta ini mencakup seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden terdiri dari *hypermarket*, *supermarket*, dan toko-toko besar. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 dengan memperhatikan kewajaran proporsi skala usaha responden dan keanekaragaman jenis barang yang dijual.

Instrumen utama SPE adalah kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai ekspektasi penjual terhadap perkembangan harga dan suku bunga kredit, masing-masing pada triwulan berjalan dan ekspektasi pada 1 dan 2 triwulan mendatang. Di samping pertanyaan kuantitatif berupa total penjualan untuk masing-masing kelompok yang dirinci lebih jauh ke dalam sub-sub kelompok. Adapun kelompok barang yang di survei terbagi ke dalam 9 kelompok dengan perincian sebagai berikut: Kelompok Bahan Konstruksi, Kelompok Kendaraan dan Suku Cadangnya, Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga, Kelompok Barang Kerajinan dan Mainan, Kelompok Makanan dan Tembakau, Kelompok Pakaian dan Perlengkapannya, Kelompok Bahan Kimia, Kelompok Bahan Bakar dan Kelompok Peralatan Tulis.

PERKEMBANGAN PENJUALAN ECERAN

Survei triwulan III-2006 perlu mendapat catatan khusus. Serupa dengan survei triwulan II-2006, data yang diperoleh pada survei periode ini sedikit banyak juga belum normal. Hal ini terkait dengan peristiwa gempa tektonik yang melanda wilayah DIY pada tanggal 27 Mei 2006 yang saat ini masih pada tahap rehabilitasi.

Survei menunjukkan Indeks riil penjualan eceran triwulan III-2006 mengalami penurunan yang relatif cukup signifikan dibandingkan dengan indeks riil penjualan eceran triwulan II-2006. Secara lebih spesifik, indeks riil penjualan eceran triwulan III 2006 mengalami penurunan sebesar 2,02 poin dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan II 2006, indeks riil penjualan eceran adalah sebesar 96,74 dan kini menurun menjadi 94,72 pada triwulan III-2006. Kecenderungan penurunan indeks penjualan eceran ini didorong oleh penurunan indeks penjualan yang terjadi pada 5 (lima) kelompok barang, yaitu kelompok barang Kendaraan & Suku Cadang, kelompok barang Perlengkapan Rumah Tangga, kelompok barang Kerajinan & Mainan, kelompok barang Pakaian & Perlengkapannya, dan kelompok barang Bahan Bakar Minyak.



Tabel 1
Indeks Riil Pedangan Eceran

No	Kelompok Barang	2005				2006			Ptumb (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Bahan Bangunan & Konstruksi	28,03	32,55	32,86	31,99	18,44	24,49	24,70	0,86
2	Kendaraan & Suku Cadang	131,13	132,94	131,78	109,46	111,38	98,36	98,34	-0,02
3	Perlengkapan Rumah Tangga	156,60	168,66	160,92	135,30	135,83	125,71	113,71	-9,55
4	Barang Kerajinan & Mainan	148,29	132,53	139,71	145,61	145,22	134,84	112,79	-16,35
5	Makanan, Minuman & Tembakau	69,44	72,00	70,63	87,14	77,76	82,01	88,59	8,02
6	Pakaian & Perlengkapannya	131,59	113,24	121,39	127,01	121,76	119,44	117,52	-1,61
7	Farmasi & Kosmetik	87,98	86,09	98,71	100,82	101,82	104,23	106,57	2,25
8	Bahan Bakar Minyak	73,36	82,06	90,81	84,54	101,75	100,93	98,31	-2,60
9	Perlengkapan Tulis	68,42	80,21	90,78	83,92	73,63	80,63	81,94	1,62
Seluruh Barang		99,43	100,03	104,18	100,64	98,62	96,74	94,72	-2,09

Bencana alam yang menimpa Daerah Istimewa Yogyakarta telah membawa dampak kerusakan sendi-sendi perekonomian yang ada. Sarana dan prasarana perdagangan yang hancur atau rusak sedikit banyak mempengaruhi distribusi barang. Prasarana tempat usaha yang hancur membawa dampak kepada para pemilik usaha untuk melakukan pengalihan alokasi dana dari dana modal kerja kepada dana perbaikan sarana tempat usaha. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi keputusan jumlah persediaan dan distribusi barang. Daya beli masyarakat yang menurun juga turut menjelaskan fenomena penurunan indeks perdagangan eceran di DIY. Tingkat inflasi yang relatif meningkat akibat kenaikan harga BBM dan bencana alam telah menurunkan daya beli masyarakat dan sedikit banyak telah merubah pola konsumsi masyarakat.

Ditinjau dari nilai indeks penjualannya, kelima kelompok barang yang mengalami penurunan tersebut, secara rata-rata mengalami penurunan indeks penjualan sebesar 2,09 persen pada triwulan III-2006.

Kelompok barang Kendaraan & Suku Cadang secara umum relatif stabil, ditunjukkan dari indeks penjualan eceran sebesar 98,36 poin pada triwulan II-2006 menjadi 98,34 poin pada triwulan III-2006. Penurunan yang relatif rendah,

yaitu sebesar 0,02 poin ini terjadi baik kepada penjualan unit kendaraannya maupun pada penjualan suku cadang. Melemahnya daya beli masyarakat menjadi pemicu dari penurunan ini. Masyarakat diduga melakukan rasionalisasi terhadap pengeluaran konsumsi untuk membeli kendaraan dalam masa sulit dimana daya beli masyarakat sedang menurun.

Kelompok barang Perlengkapan Rumah Tangga mengalami penurunan indeks penjualan eceran sebesar 10%, ditunjukkan dari angka indeks sebesar 125,71 poin pada triwulan II-2006 menjadi 113,71 pada triwulan III-2006. Karakteristik penjualan barang perlengkapan rumah tangga seperti audio dan meubel menurut penjelasan para pedagang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendatang yang hadir ke kota Yogyakarta, terutama para pelajar dan mahasiswa. Bencana alam yang terjadi pada bulan Mei 2006 telah membawa dampak kepada berkurangnya jumlah pendatang yang masuk ke kota Yogyakarta, hal ini berdampak kepada omset penjualan mereka.

Kelompok barang Kerajinan & Mainan pada periode triwulan II hingga III-2006 mengalami penurunan sebesar 9% pada indeks penjualan mereka. Beberapa pedagang kerajinan serta elektronika seperti komputer menyatakan sedikit tertolong penjualan mereka oleh banyaknya *event* pameran yang dilakukan di DIY pada triwulan III-2006, diharapkan strategi pameran ini akan terus dilakukan hingga triwulan IV ke depan. Proses rehabilitasi sarana produksi kerajinan di wilayah DIY sedang berjalan, diharapkan kegiatan distribusi barang kerajinan akan kembali normal pada triwulan IV-2006 hingga triwulan I-2007.

Berdasarkan survei yang dilakukan, pedagang kelompok barang Pakaiannya & Perlengkapannya mengalami penurunan indeks penjualan sebesar -1,61% dibandingkan indeks penjualan triwulan sebelumnya. Secara umum alasan yang diberikan oleh para responden dari kelompok ini adalah faktor daya beli masyarakat serta pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan sehingga berimbas kepada tingkat penjualan mereka. Dirasakan oleh para pedagang bahwa daya beli masyarakat berkurang, sehingga konsumen lebih memilih mengalokasikan anggaran yang dimilikinya untuk kegiatan yang sangat mendasar dan tidak berlebihan. Dengan kata lain terjadi rasionalisasi terhadap pola konsumsi masyarakat di saat daya beli mengalami penurunan.

Indeks riil penjualan eceran kelompok barang Bahan Bakar Minyak (BBM) menunjukkan adanya penurunan pada periode triwulan III-2006, yaitu sebesar -2,60%. Secara detail ditunjukkan oleh penurunan indeks penjualan dari 100,93 poin pada triwulan II-2006 menjadi 98,31 poin pada triwulan III-2006. Penurunan ini terutama disebabkan sekali lagi oleh meningkatnya harga bahan bakar yang membuat masyarakat menurunkan tingkat konsumsinya.

Mencermati indeks penjualan eceran sejak triwulan II-2005 hingga triwulan III-2006, dapat diperoleh gambaran bahwa secara umum 9 kelompok industri yang ada di DIY menunjukkan penurunan indeks penjualan eceran, meskipun terjadi sedikit lonjakan pada triwulan III-2005 namun setelah periode tersebut trend menunjukkan penurunan, bahkan indeks penjualan periode triwulan III-2006 jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya. Terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada triwulan III-2005, dikarenakan terjadinya perubahan pola produksi dan konsumsi sebagai akibat adanya shock kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Namun setelah masyarakat mampu melakukan penyesuaian maka indeks penjualan kembali turun hingga triwulan III-2006. Khusus mengenai triwulan III ini juga diperparah dengan terjadinya bencana gempa tektonik yang telah merusak sebagian perekonomian DIY. Dimulai dengan indeks penjualan eceran sebesar 100,03 pada triwulan II-2005, meningkat secara signifikan menjadi 104,18 pada triwulan III-2005 selanjutnya menurun menjadi 100,64 pada triwulan IV-2005 dan akhirnya menurun kembali pada tingkat 98,62 pada triwulan I-2006 dan menjadi 96,74 pada triwulan II-2006, terakhir menjadi 94,72 pada triwulan III-2006.

Kelompok barang Bahan Bangunan & Konstruksi tercatat mengalami peningkatan indeks penjualan sebesar 0,86%, ditunjukkan dari indeks penjualan eceran sebesar 24,49 poin pada triwulan II-2006 menjadi 24,70 poin pada triwulan III 2006. Penurunan ini terkait belum berjalannya proses pembangunan infrastruktur yang terjadi di DIY. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua REI Yogyakarta, Industri perumahan di DIY sementara waktu akan mengalami penurunan omset penjualan, namun demikian apabila dana rekonstruksi infrastruktur sudah dapat disalurkan maka akan ada harapan industri kelompok bahan bangunan akan mengalami kenaikan penjualan kembali.

Pedagang kelompok barang Makanan, Minuman & Tembakau mengalami kenaikan indeks penjualan secara rata-rata sebesar 8,02% pada periode triwulan III-2006. Beberapa pedagang menyebutkan bahwa meskipun terjadi peningkatan penjualan makanan namun sesungguhnya prosentase peningkatannya masih di bawah periode triwulan sebelumnya yang mencapai kurang lebih 35%.

Pengusaha apotik dan bahan kimia lainnya menyatakan bahwa harga obat sesungguhnya relatif stabil meskipun terdapat sedikit terpengaruh oleh kenaikan BBM, namun sedikit menguatnya nilai rupiah juga mengakibatkan harga obat import relatif menjadi lebih terjangkau. Disamping itu, perusahaan obat kini juga mengeluarkan banyak produk-produk baru pada harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya mampu mendongkrak penjualan obat-

obatan dan bahan kimia. Bencana alam juga mampu mendorong tingkat penjualan obat-obatan di setiap apotik yang ada. Secara lebih spesifik kelompok pedagang ini secara rata-rata mengalami kenaikan penjualan sebesar 2,25% dari periode triwulan III 2006.

Kelompok barang Perlengkapan Tulis juga menunjukkan adanya kenaikan indeks riil penjualan eceran pada triwulan III-2006 sebesar 1,62%, yaitu dari 80,63 poin pada triwulan II-2006 menjadi 81,94 poin pada triwulan III-2006. Beberapa kegiatan kemanusiaan dalam hal rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah DIY terkait dengan bencana alam, mengakibatkan adanya lonjakan permintaan terhadap peralatan alat tulis dan buku.

Survei mencatat bahwa untuk periode tiga bulan ke depan, triwulan IV-2006, rata-rata penjual memiliki prediksi akan mengalami kenaikan penjualan. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan adanya hari raya keagamaan. Indeks penjualan eceran diperkirakan akan meningkat sebesar 4% dari indeks penjualan sebesar 94,72 pada triwulan III-2006 menjadi 98,42 pada triwulan IV-2006.

Kelompok barang Perlengkapan Rumah Tangga, kelompok barang Kerajinan & Mainan, kelompok barang Makanan, Minuman & Tembakau, kelompok barang Farmasi & Kosmetik serta kelompok barang Bahan Bakar Minyak memiliki ekspektasi penjualan secara rata-rata meningkat. Pedagang kelompok barang-barang ini memiliki ekspektasi dalam 3 bulan ke depan yang bertepatan dengan perayaan hari raya lebaran dan natal akan mampu menaikkan tingkat penjualan barang mereka.

Sebaliknya pedagang kelompok barang Bahan Bangunan & Konstruksi, kelompok barang Kendaraan & Suku Cadang serta kelompok barang Peralatan Tulis memprediksi akan mengalami penurunan indeks riil penjualan pada triwulan IV-2006. Hal ini menurut pelaku usaha bahan bangunan terkait dengan belum stabilnya masa pemulihan ekonomi pasca gempa. Kredit perbankan untuk sektor perumahan diperkirakan juga belum dapat optimal. Demikian halnya juga terjadi kepada pedagang dari kelompok barang Kendaraan & Suku Cadang. Mereka memperkirakan akan mengalami penurunan penjualan pada triwulan IV-2006. Penurunan ini diperkirakan karena ekspektasi daya beli masyarakat yang relatif belum akan membaik dalam jangka panjang.

PERKIRAAN HARGA UMUM DAN SUKU BUNGA KREDIT

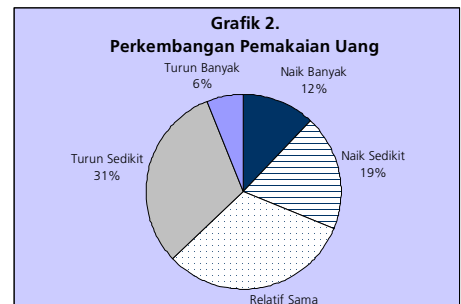
Survei menunjukkan bahwa pada triwulan III-2006 sebagian responden memperkirakan akan terjadi peningkatan harga umum untuk 3 bulan mendatang

dan hal ini diperkirakan akan terus berlangsung untuk 6 bulan mendatang. Saldo bersih yang tercatat untuk perkiraan harga umum 3 bulan mendatang adalah sebesar 25% dan untuk 6 bulan mendatang adalah sebesar 12%. Seperti telah disampaikan di atas, bahwa kenaikan harga BBM serta kelangkaan barang akibat gempa tektonik masih akan membawa dampak yang cukup signifikan kepada kenaikan harga-harga barang komoditi yang dijual di DIY. Hal ini akan lebih besar lagi kemungkinannya apabila pemerintah jadi menaikkan tarif dasar listrik dalam jangka waktu dekat.

Suku bunga kredit diperkirakan akan mengalami kenaikan untuk masa 3 bulan mendatang, dengan saldo bersih yang tercatat sebesar 3%. Adapun untuk masa 6 bulan mendatang suku bunga kredit diperkirakan akan juga mengalami peningkatan terbukti dari nilai saldo bersih sebesar 2%.

PENGUNAAN UANG KERTAS DAN LOGAM

Survei menunjukkan pemakaian uang kertas dan logam dalam tiga bulan terakhir relatif meningkat seperti ditunjukkan oleh 19% jawaban dari responden yang ada. Adapun yang mengaku sama mencapai 32% dan sisanya 37% menjawab menurun. Sehingga secara mayoritas memang dalam 3 bulan terakhir pemakaian uang kertas dan logam mengalami sedikit penurunan akibat perubahan pola konsumsi dari masyarakat.



Laporan Survei Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III-2006

PENJELASAN UMUM

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) atau biasa dikenal pula dengan istilah “*business survey*” merupakan salah satu kegiatan survei yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendapatkan informasi jangka pendek mengenai indikasi arah perkembangan perekonomian secara langsung dan sesegera mungkin yang akan digunakan untuk keperluan penyusunan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi. Informasi tersebut berupa kondisi dan ekspektasi kegiatan usaha sejumlah perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Secara umum sifat informasi yang akan diperoleh dalam survei ini adalah : (1) informasi kondisi triwulan sebelum survei (*past business performance*); (2) informasi kondisi usaha pada saat triwulan survei (*present business performance*); dan (3) informasi mengenai tendensi/ arah kegiatan dunia usaha pada satu triwulan mendatang (*future business estimation*).

SKDU dilakukan melalui suatu pendekatan survei sampel yang sangat berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan survei sampel, maka sejumlah responden yang terpilih dalam survei ini menjadi sumber utama informasi yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan terutama melalui wawancara dan observasi. Dalam hal responden dipandang telah memahami survei ini, misalnya telah sering disurvei, mereka dapat menjawab sendiri kuesioner yang telah dikirimkan sebelumnya, namun petugas survei tetap perlu meneliti semua jawaban yang diberikan dan menghubungi responden dimaksud jika memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Responden dalam survei ini dipilih dengan menggunakan metode *stratified random sampling*, yaitu perusahaan dipilih secara acak dari suatu kelompok lapangan usaha (sektor ekonomi) tertentu. Jumlah responden untuk wilayah DIY diharapkan sekitar 164 perusahaan dan dapat ditambah atau disesuaikan agar masing-masing sektor ekonomi dapat diwakili secara proporsional. Level yang disurvei adalah usaha yang dianggap representatif (perusahaan-perusahaan besar berdasarkan nilai produksi/penjualan/penghasilan operasionalnya).

Pengolahan data hasil survei ini dilakukan dengan metode Saldo Bersih (SB) atau *net balance*, yakni selisih jumlah responden yang memberikan jawaban “positif” (ada kenaikan kegiatan usaha) dengan jumlah responden yang

memberikan jawaban “negatif” (ada penurunan kegiatan usaha). Untuk melengkapi analisis juga digunakan metode Saldo Bersih Tertimbang (SBT) atau *weighted net balance*, masing-masing sektor, yakni SB suatu sektor dikalikan dengan bobot sektor yang bersangkutan. Sementara itu simpulan kegiatan usaha, baik informasi mengenai harga jual maupun penggunaan tenaga kerja diukur dengan menjumlahkan SBT seluruh sektor.

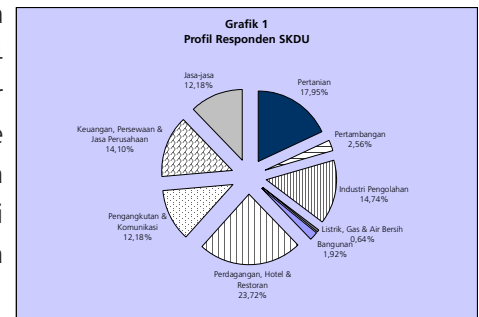
PROFIL RESPONDEN

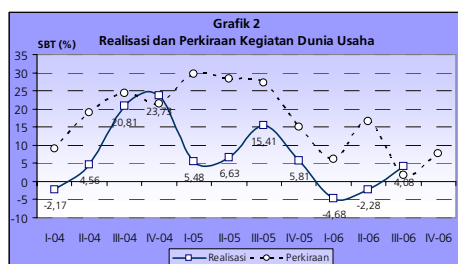
Dalam rangka penyesuaian jumlah responden SKDU secara nasional, maka jumlah responden SKDU di wilayah DIY sejak triwulan I-2005 menjadi 164 responden. Pada triwulan III-2006 jumlah responden yang mengembalikan kuesioner tercatat sebesar 157 responden atau dengan *response rate* 95,73%. Angka *response rate* ini mengalami penurunan sejak awal tahun, yaitu sebesar 97,56% pada triwulan I-2006 dan sebesar 96,34% pada triwulan II-2006. Meskipun mengalami penurunan sejak awal tahun, namun angka *response rate* ini lebih besar jika dibandingkan dengan triwulan III-2005 yang tercatat hanya sebesar 93,90%.

Penyebaran responden pada triwulan laporan ini tidak berbeda dengan triwulan sebelumnya yang masih didominasi oleh lima sektor penyumbang PDRB terbesar di DIY yaitu sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; sektor Pertanian; sektor Industri Pengolahan; sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; dan sektor Jasa-jasa dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 37, 28, 23, 22 dan 19 responden atau mewakili 82,17% dari total responden yang mengembalikan kuesioner.

KEGIATAN USAHA

Tidak sama halnya yang terjadi pada triwulan sebelumnya, realisasi optimisme para responden di wilayah DIY pada triwulan III-2006 lebih tinggi jika dibandingkan ekspektasi para responden SKDU pada periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) realisasi kegiatan dunia usaha pada triwulan III-2006 sebesar 4,08% atau lebih tinggi dibandingkan ekspektasi para responden triwulan sebelumnya yaitu 1,66%. Angka realisasi pada triwulan laporan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi SBT triwulan sebelumnya yang negatif sebesar -2,28%. Peningkatan angka realisasi ini memberikan harapan terhadap perbaikan ekonomi DIY yang sempat terpukul setelah terjadinya kenaikan BBM pada 1 Oktober 2005 dan Gempa Tektonik 27 Mei 2006.





Selama periode survei, 7 sektor ekonomi mengalami peningkatan kegiatan usaha, sedangkan 2 sektor lainnya mengalami penurunan. 3 sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan kenaikan SBT 3,58% dari -1,73% menjadi 1,85%, sektor Bangunan dengan kenaikan SBT 3,40% dari 0,00% menjadi 3,40%, dan sektor Pertanian dengan kenaikan SBT 2,59% dari -1,18% menjadi 1,41%.

Tabel 1
Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Dunia Usaha DIY
(%, SBT)

No	Sektor	2005								2006							
		I		II		III		IV		I		II		III		IV	
		P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	
1	Pertanian	5,93	8,64	5,02	2,78	7,35	4,06	1,23	7,41	2,97	3,76	2,94	(1,18)	(0,05)	1,41	4,17	
2	Penggalan	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	(0,36)	0,72	0,00	0,00	(0,72)	0,72	0,72	1,07	
3	Industri Pengolahan	1,53	(1,45)	3,54	3,12	3,60	2,89	0,99	2,30	0,17	(2,98)	1,10	1,84	4,29	(2,09)	0,10	
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,49	0,42	3,40	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	(0,42)	0,42	0,42	0,42	
5	Bangunan	6,81	0,00	3,39	(3,40)	3,40	(3,40)	0,00	(3,40)	0,00	3,40	6,81	0,00	0,00	3,40	0,00	
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	7,77	(5,09)	3,40	(1,38)	3,88	3,25	5,44	(1,73)	(1,45)	(4,50)	1,89	(0,39)	0,30	0,09	2,52	
7	Pengangkutan & Komunikasi	2,55	1,74	3,16	1,30	6,84	2,94	2,52	(2,95)	(0,64)	(3,29)	1,33	1,52	(1,90)	(0,60)	2,52	
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,01	1,04	5,65	2,86	0,89	4,10	1,95	3,22	3,90	0,08	2,35	(1,73)	(1,53)	1,85	(3,09)	
9	Jasa-jasa	1,48	(0,18)	0,70	0,93	0,84	1,15	1,79	0,90	0,10	(1,57)	(0,19)	(1,20)	(0,59)	(1,12)	0,00	
Seluruh Sektor		29,57	5,48	28,26	6,63	27,22	15,41	15,06	5,81	6,19	(4,68)	16,65	(2,28)	1,66	4,08	7,71	

Keterangan:
P = Perkiraan
R = Realisasi

Sedangkan 2 sektor yang mengalami penurunan kegiatan usaha adalah sektor Industri Pengolahan dengan penurunan SBT 3,93% dari 1,84% menjadi -2,09%, serta sektor Industri Pengangkutan dan Komunikasi dengan penurunan SBT 2,12% dari 1,52% menjadi -0,60%.

Peningkatan pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan disebabkan adanya peningkatan SBT dari subsektor Jasa Perusahaan sebesar 4,31% dari -1,23% menjadi 3,08%. Sedangkan peningkatan pada sektor Pertanian disebabkan adanya peningkatan SBT pada subsektor Tanaman Pangan dengan peningkatan SBT sebesar 1,98% dari 0,00% menjadi 1,98%.

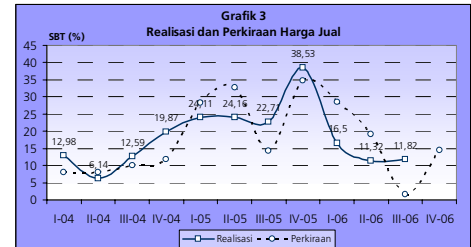
Penurunan SBT pada sektor Industri Pengolahan didorong oleh penurunan SBT pada subsektor Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar -3,83% menjadi 0,00% dan subsektor Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya sebesar 0,13% menjadi -0,13%. Sedangkan penurunan SBT pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi didorong oleh penurunan SBT pada subsektor Angkutan Jalan Raya sebesar -1,20% menjadi -0,60%, subsektor Angkutan Udara sebesar -0,49% menjadi 0,00% dan subsektor Komunikasi sebesar 0,44% menjadi 0,00%.

Responden SKDU di DIY pada triwulan laporan menyatakan optimismenya dalam memperkirakan kondisi kegiatan dunia usaha triwulan IV-2006, tercermin dari nilai SBT ekspektasi kegiatan usaha sebesar 7,71%, lebih tinggi dari nilai SBT realisasi kegiatan triwulan III-2006 sebesar 4,08%, dan nilai SBT perkiraan kegiatan usaha triwulan III-2006 sebesar 1,66%.

HARGA JUAL

Harga jual produk/jasa responden SKDU mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,50% dari 11,32% menjadi 11,82%. Angka realisasi ini jauh melebihi dari prediksi pelaku usaha pada triwulan sebelumnya yakni dengan SBT sebesar 1,65%. Desakan inflasi yang terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 2,32% menyebabkan pelaku usaha menaikkan harga jual barang produksinya. Sehingga pada triwulan laporan para pelaku usaha menyatakan kenaikan harga jual, terutama terjadi di sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan SBT dari 1,54% menjadi 1,80% dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kenaikan SBT dari 0,70% menjadi 2,00%. Sementara itu pelaku usaha yang justru menyatakan sebaliknya (menurunkan harga jual) adalah pelaku usaha di sektor Pertanian dari SBT sebesar 3,78% menjadi 3,59%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dari SBT sebesar 2,27% menjadi 1,19% serta sektor Jasa-jasa dari SBT sebesar -0,37% menjadi -0,78%.

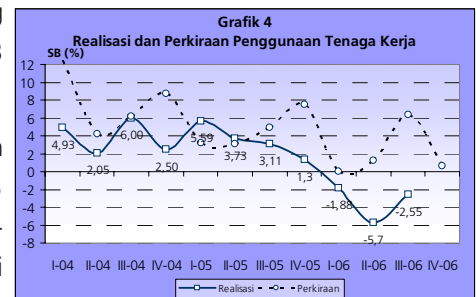
Para pelaku usaha selanjutnya memperkirakan terjadinya kenaikan harga-harga pada triwulan mendatang sebagaimana tercermin dari nilai SBT perkiraan harga jual triwulan IV-2006 yang mencapai 14,54%.



PENGGUNAAN TENAGA KERJA

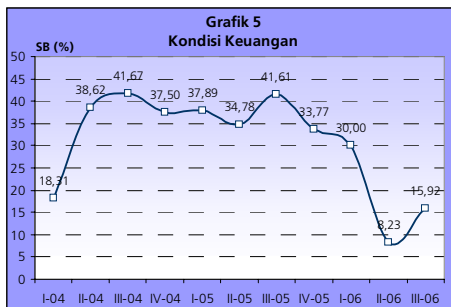
Mulai menggeliatnya perekonomian DIY pasca gempa mendorong peningkatan penggunaan tenaga kerja, yang tercermin dari kenaikan angka SB dari -5,70% pada triwulan sebelumnya menjadi -2,55%.

Berdasarkan sektor ekonomi, sektor yang menyatakan peningkatan penggunaan kerja adalah sektor Industri Pengolahan dengan nilai SBT dari -0,36% menjadi 0,40%, sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan nilai SBT dari -0,65% menjadi -0,11%, dan sektor Jasa-jasa dengan nilai SBT dari -0,59% menjadi -0,19%. Selanjutnya para pelaku usaha justru menyatakan rasa optimisme terhadap penggunaan tenaga kerja untuk periode selanjutnya, yang tercermin dari nilai SB sebesar 0,64%.



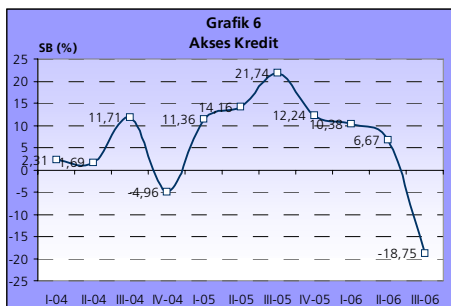
KONDISI KEUANGAN

Pada triwulan laporan kondisi keuangan pelaku usaha yang menjadi responden survei ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, tercermin dari peningkatan nilai SB sebesar 7,69%, dari 8,23% pada triwulan



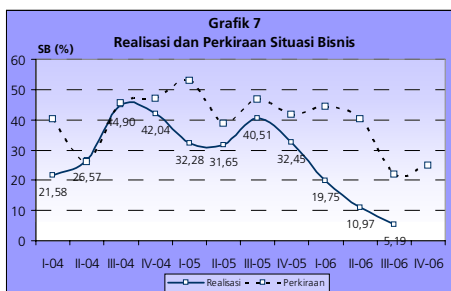
sebelumnya menjadi 15,92% pada triwulan laporan. Peningkatan kondisi keuangan ini dirasakan oleh sektor Pertanian dengan kenaikan nilai SBT dari -1,32% menjadi 4,25%, sektor Industri Pengolahan dengan kenaikan nilai SBT dari 1,95% menjadi 2,46%, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan kenaikan nilai SBT dari 1,36% menjadi 2,06%. Sedangkan sektor yang kondisi keuangannya justru memburuk adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai SBT yang turun dari 3,95% menjadi 2,59% dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang turun dari 2,59% menjadi 0,33%.

AKSES KREDIT



Pada triwulan laporan responden memberikan pernyataan bahwa akses kredit ke Perbankan semakin sulit, hal ini tercermin dari SB negatif indikator akses kredit yang tercatat sebesar -18,75%, lebih kecil jika dibandingkan dengan SB pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,67%. Kondisi ini seiring dengan peningkatan Kredit Perbankan yang hanya mencapai 4,77% dikarenakan semakin ketatnya persyaratan pemberian Kredit Perbankan terkait adanya peningkatan rasio Kredit bermasalah (NPL) yang semakin tinggi yaitu sebesar 6,37% pada triwulan laporan. Namun demikian, terdapat 1 sektor yang menyatakan memperoleh kemudahan akses Kredit, yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan peningkatan nilai SBT dari 8,09% menjadi 8,87%.

SITUASI BISNIS



Persepsi responden terhadap situasi bisnis selama triwulan laporan pada umumnya ikut menurun, sebagaimana tercermin dari SB Positif yang turun drastis dari 19,75% pada triwulan III-2006 menjadi 5,19% pada triwulan laporan. Namun demikian, responden mengambil sikap optimis dalam memprediksi situasi bisnis untuk periode yang akan datang, tercermin dari kenaikan nilai SB Positif dari 21,94% pada triwulan III-2006 menjadi 24,68% pada triwulan IV-2006.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Laporan Survei Harga Properti Residensial Triwulan III-2006

PROFIL RESPONDEN

Pada triwulan III-2006, Survei Harga Properti Residensial (SHPR) dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari responden yang berjumlah 50 pengembang, sama dengan jumlah responden periode sebelumnya. Dari 50 responden tersebut, menurut status keanggotaan dalam Real Estate Indonesia (REI) Cabang Yogyakarta, tercatat sebanyak 33 responden sebagai anggota REI dan 17 responden bukan anggota REI.

Tabel 1
Sumbangan Tipe Bangunan terhadap Kenaikan/Penurunan
Jumlah Rumah yang Dibangun dan Jumlah Rumah yang Dijual

No	Tipe (m ²)	Rumah yang Dibangun												Rumah yang Dijual					
		2005				2006				2005				2006					
		I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III				
1	21 - 35	22,22	-3,61	-2,19	2,02	-10,23	-14,29	-2,14	15,29	-5,43	-6,59	6,81	-19,68	-2,87	-0,57				
2	36	5,93	0,00	0,00	0,00	-11,70	5,49	0,71	13,89	0,00	0,00	0,00	-13,25	4,02	1,14				
3	37 - 45	40,74	-3,97	1,09	-3,54	-7,31	4,76	0,00	31,25	-1,55	0,00	-8,99	-11,65	6,32	0,00				
4	46 - 55	8,15	-7,94	3,28	5,05	-1,75	4,40	2,50	7,64	-14,34	11,38	5,06	0,00	-5,75	6,29				
5	56 - 69	6,67	-1,08	0,00	0,00	-2,63	0,00	0,00	2,78	-1,16	0,00	0,00	-2,41	-1,15	0,00				
6	70	1,48	0,00	0,00	-3,03	1,46	-1,47	1,07	3,47	0,00	0,00	-2,25	1,20	-2,30	1,71				
7	71 - 90	1,48	-1,44	2,19	-4,04	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,62	1,20	-1,15	0,57				
8	91 - 120	2,96	-3,97	3,83	-4,55	-1,46	3,30	-1,79	-1,39	-0,78	0,60	-1,12	-0,40	2,87	-2,86				
9	121 - 150	4,44	-2,17	0,00	-1,52	1,46	-0,37	0,00	1,39	-1,55	1,20	-1,69	1,20	0,00	0,57				
10	151 - 200	2,96	-4,33	0,00	-2,02	0,88	0,37	0,00	-0,69	-3,88	0,00	-2,25	0,80	0,57	0,00				
11	> 200	8,15	-5,42	0,00	-0,51	0,00	0,37	0,00	5,56	-6,59	0,00	-0,56	0,00	0,00	0,00				
Total		105,19	-33,93	8,20	-12,14	-30,12	2,56	0,36	79,17	-38,27	6,59	-10,61	-42,97	0,57	6,86				

JUMLAH RUMAH YANG DIJUAL DAN DIBANGUN

Sejalan dengan perkembangan kinerja perekonomian DIY pada triwulan I-II-2006 yang tumbuh secara 2,24% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya dan 1,69% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, aktivitas bisnis perumahan (properti residensial) di wilayah DIY juga menunjukkan perkembangan positif, sebagaimana tercermin dari jumlah penjualan rumah yang naik 6,86% (qtq), lebih besar dibandingkan laju peningkatan pada triwulan II-2006 yang hanya tercatat sebesar 0,57% (qtq). Peningkatan volume bisnis perumahan tersebut disinyalir sebagai dampak positif meningkatnya permintaan rumah yang sesuai dengan siklusnya cenderung naik pada setiap tahun ajaran baru yang jatuh pada setiap triwulan ketiga. Membaiknya kinerja bisnis properti residensial tersebut juga terkonfirmasi oleh perkembangan kinerja sektor Bangunan yang pada triwulan ini tumbuh pesat sebesar 8,12% (qtq).

Menurut tipe rumah berdasarkan luas bangunan, naiknya jumlah penjualan rumah pada triwulan ini terutama ditunjang oleh pesatnya laju pertumbuhan penjualan rumah tipe 46-55 m². Terhadap total pertumbuhan jumlah rumah yang terjual, tipe rumah dimaksud memberikan andil positif terbesar hingga 6,29%, disusul kemudian oleh tipe 70, tipe 36 dan tipe 121-150 m², yang memberikan andil masing-masing sebesar 1,71%, 1,14% dan 0,57%. Sedangkan andil negatif berasal dari tipe 91-120 dan tipe 21-35 m², sementara andil dari tipe rumah lainnya terhadap total pertumbuhan penjualan rumah tercatat nihil.

Dari sisi jumlah rumah yang dibangun, juga terdapat pertumbuhan positif namun angkanya masih lebih kecil dibandingkan angka pertumbuhan jumlah rumah yang terjual. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perkembangan jumlah yang dibangun naik tipis sebesar 0,36% (qtq). Hal mengindikasikan bahwa para pebisnis properti memanfaatkan stok yang tersedia untuk mengimbangi naiknya permintaan rumah baru bersamaan dengan tibanya tahun ajaran baru. Peningkatan jumlah yang dibangun terdapat pada tipe 46-55 m², tipe 70 m², dan tipe 36 m², dengan andil positif masing-masing sebesar 2,50%, 1,07% dan 0,71%, sedangkan andil negatif berasal dari tipe 21-35 m² dengan andil sebesar -2,14% dan tipe 91-120 sebesar -1,79%.

Tabel 2
Sumbangan Tipe Rumah terhadap
Kenaikan/Penurunan Harga Rumah

No	Tipe (m ²)	2005				2006			%
		I	II	III	III	I	II	III	
1	21 - 35	0,03	-0,02	0,00	-1,68	0,00	0,01	-0,02	
2	36	0,52	0,00	-0,26	0,00	-0,01	0,04	0,00	
3	37 - 45	0,20	0,00	-0,02	0,58	-0,01	0,12	0,04	
4	46 - 55	0,46	-0,08	0,18	0,17	0,00	0,00	0,15	
5	56 - 69	0,50	0,40	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
6	70	0,65	0,00	0,81	0,09	0,00	0,00	0,00	
7	71 - 90	0,87	0,00	-0,03	0,31	0,00	0,00	0,14	
8	91 - 120	0,41	-0,20	0,00	0,76	0,02	0,00	0,23	
9	121 - 150	0,00	0,10	0,00	2,49	0,02	0,34	0,30	
10	151 - 200	0,33	0,03	0,00	2,08	0,00	0,36	0,42	
11	> 200	-1,04	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	Total	2,92	1,20	0,69	4,85	0,01	0,87	1,26	

PERKEMBANGAN HARGA RUMAH

Sementara dari sisi perkembangan harga rumah pada bisnis properti DIY pada triwulan III-2006 secara umum dikatakan relatif stabil. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, perkembangan harga rumah hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 1,26% (qtq), meskipun harga bahan bangunan dan konstruksi cenderung meningkat pada periode pasca gempa dan permintaan cenderung meningkat. Fenomena ini menggambarkan bahwa para pelaku bisnis di sektor

properti perumahan cenderung bersikap “wait and see” dalam merespon mulai naiknya permintaan dan bahkan tidak segan-segan untuk menurunkan margin keuntungannya sambil menunggu pulihnya daya beli masyarakat pasca gempa.

Peningkatan harga rumah pada triwulan ini terutama didorong oleh perkembangan harga rumah terutama tipe menengah-atas. Tipe 151-200 m² tercatat sebagai pemberi andil positif terbesar terhadap total peningkatan harga rumah, yakni 0,42%, selanjutnya diikuti oleh tipe rumah di bawahnya (lihat Tabel 2). Sedangkan andil negatif disumbang tipe 21-35 yang tercatat -0,02%.

PERKEMBANGAN HARGA TANAH

Peningkatan juga terjadi pada perkembangan harga tanah bisnis properti perumahan DIY. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, harga tanah naik tipis sebesar 0,86% (qtq). Sumbangan positif berasal dari perkembangan harga tanah pada tiga tipe rumah yaitu tipe 151-200 m² dengan sumbangan sebesar 0,27%, disusul oleh tipe 37-45 m² dan tipe 36 m² masing-masing sebesar 0,22% dan 0,18%.

Tabel 3
Sumbangan Tipe Rumah terhadap
Kenaikan/Penurunan Harga Tanah

No	Tipe (m ²)	2005				2006			%
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	21 - 35	0,16	0,10	0,00	-8,19	0,09	0,47	0,00	
2	36	1,25	0,00	0,44	0,80	0,44	0,00	0,18	
3	37 - 45	1,25	0,08	0,00	2,64	0,44	0,13	0,22	
4	46 - 55	0,83	0,07	0,33	0,50	0,18	0,10	0,00	
5	56 - 69	1,25	-0,42	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	
6	70	1,25	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	
7	71 - 90	3,55	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	
8	91 - 120	1,67	0,07	0,87	0,80	0,00	0,00	0,00	
9	121 - 150	2,82	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	
10	151 - 200	2,50	0,00	0,00	0,60	0,00	0,31	0,27	
11	> 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		16,53	-0,09	1,64	6,95	1,15	1,02	0,68	

Halaman ini sengaja dikosongkan.